

**PASANG SURUT IDENTITAS:
RELASI MASYARAKAT TIONGHOA DENGAN MASYARAKAT
MUSLIM DI KOTA PALU, 1921-1973**



SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana
Humaniora (S.Hum), pada Program Studi Sejarah Peradaban Islam (SPI),
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD), Universitas Islam Negeri
(UIN) Datokarama Palu.**

Oleh:

JEFRIANTO

NIM: 19.4.1.900.08

**FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA
PALU, SULAWESI TENGAH**

2023

HALAMAN PERSEMBAHAN

Untuk Ayah, Alm. Mohammad Ceng Putong dan Ibu, Nakoria, maaf harus menunggu 15 tahun, untuk melihat saya meraih gelar sarjana.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, saya yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau buatan orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Palu, 18 Juli 2023 M
29 Dzulhijjah 1444 H

Penyusun

Jefrianto
NIM: 19.4.1.900.08

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Pasang Surut Identitas: Relasi Masyarakat Tionghoa Dengan Masyarakat Muslim di Kota Palu, 1921-1973”, oleh mahasiswa atas nama Jefrianto, NIM. 19.4.1.900.08, mahasiswa Program Studi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diujikan

Palu, Juli 2023 M
Dzulhijjah 1444 H

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Lukman S. Thahir, M.Ag
NIP: 19650901 199603 1 001

Pembimbing II



Mohammad Sairin, S.Pd., M.A
NIP: 19890103 201903 1 007

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Jefrianto NIM. 19.4.1.900.08 dengan judul "Pasang Surut Identitas: Relasi Masyarakat Tionghoa Dengan Masyarakat Muslim di Kota Palu, 1921 – 1973", yang telah diujikan di hadapan dewan penguji Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu pada tanggal 25 Juli 2023 M yang bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1445 H. Skripsi ini dipandang telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah, yang dapat diterima sebagai persyaratan, guna memperoleh gelar Sarjana Humaniora (S.Hum) pada Program Studi Sejarah Peradaban Islam (SPI), dengan beberapa perbaikan.

DEWAN PENGUJI

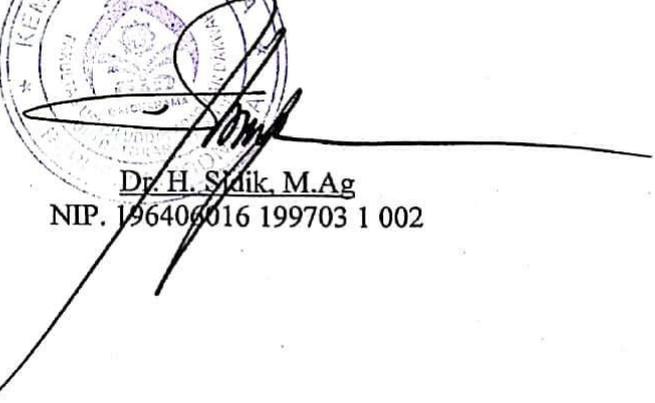
Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Mohammad Sairin, S.Pd., MA	
Munaqisy I	Prof. Dr. H. Zainal Abidin, M.Ag	
Munaqisy II	Drs. H. Iskandar, M.Sos.I	
Pembimbing I	Prof. Dr. H. Lukman S. Thahir, M.Ag	
Pembimbing II	Mohammad Sairin, S.Pd., MA	

Mengetahui:

a.n. Ketua Program Studi
Sejarah Peradaban Islam
Sekretaris


Mohammad Sairin, S.Pd., MA
NIP. 19890103 201903 1 007

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan
Dakwah


Dr. H. Saidik, M.Ag
NIP. 196406016 199703 1 002

v

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هُوَ وَالسَّلَامُ عَلَيْهِ أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةَ الْحَمْدُ لِلَّهِ
لَهُ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَوْلِيَاءِ الْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا

Alhamdulillah segala puji syukur bagi Allah SWT, Tuhan Semesta Alam karena berkat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, yang berjudul “Pasang Surut Identitas: Relasi Masyarakat Tionghoa Dengan Masyarakat Muslim di Kota Palu, 1921-1973”. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menyampaikan risalah untuk menyelamatkan kehidupan manusia dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang, untuk mendapatkan syafaat-Nya di hari akhir kelak. Penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada orang tua, ayah Alm. Mohammad Ceng Putong, dan ibu, Nakoria, Ayah dan Ibu Mertua, Darsan Indra Jaya dan Salmiwati, yang telah membesarkan, mendidik, membimbing, memotivasi, membiayai dan mengasuh penulis dengan sabar, ikhlas, penuh cinta kasih dan sayang, selalu mendoakan penulis, sehingga dapat menyelesaikan studi dari jenjang dasar hingga sarjana. Terima kasih kepada istri, Nurdian Sri Fitriana dan putri semata wayangku, Raisa Az-Zhira, yang terus memberikan semangat dan rela waktu berkumpul bersama keluarga tersita dengan kesibukan menyelesaikan studi.

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya penulis menemukan beberapa hambatan tetapi dengan adanya bimbingan, pengarahan dan bantuan dari semua pihak kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan sedalam - dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd selaku Rektor UIN Datokarama Palu beserta segenap unsur pimpinan UIN Datokarama Palu.
2. Bapak Dr. H. Sidik, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, beserta segenap unsur pimpinan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk vii menuntut ilmu pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah sehingga menyelesaikan studi dengan baik.
3. Bapak Mohammad Patri Arifin S.Th.I,M.Th.I selaku Ketua Program Studi Sejarah Peradaban Islam, yang telah memberikan semangat, dukungan, agar penulis segera menyelesaikan studi.
4. Bapak Mohammad Sairin, S,Pd., MA selaku Sekertaris Progam Studi Sejarah Peradaban Islam juga pembimbing II, yang telah memberikan semangat serta dukungan, baik moril maupun materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Terima kasih juga sudah menjadi sosok kakak yang baik bagi penulis, sebagai tempat bertukar pikiran dan berproses.
5. Bapak Prof. Dr. H. Lukman S. Thahir, M.Ag selaku pembimbing I yang telah memberikan semangat serta dukungan agar penulis segera menyelesaikan studi.
6. Bapak/ibu bagian Staf Akademik Kemahasiswaan (AKMAH) dan bagian umum yang telah banyak memberikan informasi, arahan, aturan dan mempermudah penyusun dalam segala proses pengurusan akademik.
7. Bapak/ibu Dosen UIN Datokarama Palu yang telah memberikan ilmunya kepada penyusun selama proses studi berlangsung, sehingga penyusun memiliki wawasan keilmuan, baik secara teori maupun aplikatif.

8. Kepala Perpustakaan UIN Datokarama Palu dan seluruh staf Perpustakaan UIN Datokarama Palu dan juga kepada Perpustakaan Daerah Sulawesi Tengah, yang dengan tulus telah memberikan pelayanan dan mencari referensi sebagai bahan penulis skripsi ini.
9. Para informan, Wijaya Chandra (Ko Awi), Ricky Chowindra (Ko Akiong), Tedi Halim, Lim Boen Hou, Djon Tanod, Ito Lawputra, Namin, serta Keluarga Besar Putong, yang telah bersedia memberikan informasi berharga kepada penulis, dalam rangka penelitian skripsi ini.
10. Keluarga Besar Komunitas Batu Karang (kak Sairin, kak Fatma, Unang, Fadlan, Komang, Firman, Silfiani, Riska, Adi Setiawan, Reza Aditama), yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis selama menempuh pendidikan, juga menjadi keluarga kedua bagi penulis.
11. Kak Wilman D. Lumangino, yang telah percaya kepada penulis untuk bisa mengeksekusi skripsi ini dengan baik. Terima kasih telah menjadi sosok ayah, kakak, dan teman diskusi bagi penulis.
12. Keluarga Besar Komunitas Historia Sulawesi Tengah (KHST) (Anto, Mat, Pai, Ewin, Abdi, Alm. Andi Alimuddin Rauf, Iwan Mangge Pore, Ardin), yang kebersamaan penulis dalam upaya membumikan sejarah dan budaya lokal Sulteng.
13. Keluarga Besar SKP-HAM Sulteng (Kak Ela, Kang Daus, Korta, Dewi, serta para korban pelanggaran HAM 65/66 di Palu), yang memberi semangat dan dukungan kepada penulis untuk mengejar mimpi menjadi sejarawan.
14. Keluarga Besar Harian Mercusuar (pak Tri Putra Toana, mas Temu Sutrisno, pak Tasman Banto, kak Tini Nainggolan, alm. Angki, kak Amar, Iki, pak Ciling, Resti, Besse, Rustam, pak Indar, Alfrits Semen, Ervin, dll),

terima kasih telah mendukung penulis untuk tetap melanjutkan pendidikan, di tengah kesibukan pekerjaan sebagai jurnalis.

15. Tim Mawar SPI (Herlinda, Utari Andrayani, Iin Dzulfaizah), terima kasih telah memberikan pengalaman berharga bagi penulis selama menempuh studi di Program Studi Sejarah Peradaban Islam

16. Teman-teman SPI angkatan 2019 (Taufik, Sahril, Fatimah, Isra, Putri, Reni, Sarifah, Nurkhalifah, Habib, Iki, Habil, Sofyan, Suci, Haikal, Kamaria), terima kasih telah menjadi support system yang menyenangkan. Semoga kita bisa wisuda sama-sama.

Akhirnya, tidak ada kata lain yang dapat penulis sampaikan, selain ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian studi ini. Memutuskan untuk kembali kuliah setelah pengalaman tidak berhasil menyelesaikan studi sebelumnya, merupakan pergulatan sendiri dalam batin penulis. Tanpa dukungan dan semangat dari semua pihak, skripsi ini tidak akan hadir.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Penegasan Istilah.....	6
1. Masyarakat	6
2. Tionghoa	7
3. Eksistensi.....	10
4. Identitas.....	10
5. Relasi	11
E. Garis-garis Besar Isi	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori.....	17
1. Eksistensi.....	17
2. Identitas.....	18
3. Relasi Sosial	18

C. Kerangka Pemikiran.....	19
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Desain Penelitian	20
B. Lokasi Penelitian	20
C. Kehadiran Peneliti	21
D. Data dan Sumber Data	21
E. Tehnik Pengumpulan Data	22
F. Pengecekan Keabsahan Data	23
G. Tehnik Analisis Data.....	24
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Gambaran Sejarah Kota Palu	26
B. Asal Usul Masyarakat Tionghoa di Palu	44
C. Menjadi Kaili: Perubahan Identitas Masyarakat Tionghoa di Palu	62
D. <i>Chung Hwa Xue Xiao</i> : Eksistensi Masyarakat Tionghoa di Palu	89
E. Relasi Sosial Dengan Masyarakat Muslim di Palu	105
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	115
B. Saran-saran.....	116
DAFTAR PUSTAKA	117
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Penduduk Palu 1906-1961.....	41
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Palu tahun 1938	32
Gambar 2. Kapal S.S. Rumphius	34
Gambar 3. Gudang Garam di wilayah Talise.....	38
Gambar 4. Tjioe Thian Siong.....	52
Gambar 5. <i>Chung Hwa School</i> di Donggala pada tahun 1950-an.....	55
Gambar 6. Oe Khian (Toke Kiala).....	59
Gambar 7. Engelbert Lie Eng Tjhiang	60
Gambar 8. Maria Alberta Putung (Oe Kim Lian Nio)	61
Gambar 9. Dokumen Sakramen Kawin Lie Eng Tjhiang tahun 1927	62
Gambar 10. Situasi pasar di Palu tahun 1924	75
Gambar 11. Ny. Phan A Lin	83
Gambar 12. Aktivitas sembahyang di Klenteng <i>Kwan Im Miao</i>	84
Gambar 13. Pelantikan dr. Albert Lie Putong tahun 1986.....	86
Gambar 14. Bangunan <i>Gouvernements School</i> di Palu	90
Gambar 15. <i>Chung Hwa Xue Xiao</i> tahun 1932.....	95
Gambar 16. <i>Chung Hwa Xue Xiao</i> tahun 1950-an.....	98
Gambar 17. Bangunan bekas Toko Sulinda di Jalan Sungai Miu.....	112

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Lembar Pengajuan Judul Skripsi

Lampiran 2. Surat Keterangan Pembimbing

Lampiran 3. Surat Keterangan Izin Penelitian

ABSTRAK

Nama : Jefrianto

NIM : 19.4.1.900.08

Judul : Pasang Surut Identitas: Relasi Masyarakat Tionghoa Dengan
Masyarakat Muslim di Kota Palu, 1921-1973

Skripsi ini berjudul Pasang Surut Identitas: Relasi Masyarakat Tionghoa Dengan Masyarakat Muslim di Kota Palu, 1921-1973. Fokus penelitian ini mengenai transformasi identitas masyarakat Tionghoa di Kota Palu. Rumusan masalah pada skripsi ini, ingin mengetahui proses kedatangan, proses pembauran dan eksistensi, serta relasi masyarakat Tionghoa dengan masyarakat muslim di Kota Palu. Pokok permasalahannya adalah: 1) bagaimana proses kedatangan masyarakat Tionghoa di Kota Palu?; 2) bagaimana proses pembauran dan eksistensi masyarakat Tionghoa di Kota Palu?; 3) bagaimana relasi sosial masyarakat Tionghoa dengan masyarakat muslim di Kota Palu. Tujuan penelitian skripsi ini adalah: 1) mengungkapkan proses kedatangan masyarakat Tionghoa di Kota Palu; 2) mengungkapkan proses pembauran dan eksistensi masyarakat Tionghoa di Kota Palu; 3) mengungkapkan relasi sosial masyarakat Tionghoa dengan masyarakat muslim di Kota Palu.

Tulisan ini menggunakan metode sejarah, yang terdiri empat tahap, yaitu heuristik (mencari dan menggunakan dokumen sejarah), kritik sumber (yang terdiri dari kritik ekstren dan intern), interpretasi, dan historiografi (penulisan sejarah). Untuk mengumpulkan sumber sejarah penulis mengumpulkan sumber sejarah yang berkaitan dengan topik penelitian penulis, berupa sumber lisan dan tulisan, dengan dikategorikan pada sumber primer (dokumen pribadi, wawancara tokoh dan aktivitas yang terlibat dalam topik penelitian) dan sumber sekunder (buku, majalah ilmiah, skripsi, jurnal, manuskrip, dokumen resmi dan foto atau gambar).

Hasil penelitian skripsi ini menemukan tiga hal, yaitu: 1) Transformasi identitas menjadi cara orang Tionghoa di Palu beradaptasi; 2) Transformasi identitas orang Tionghoa di Palu hadir lewat pembauran dan eksistensi dalam bidang sosial, ekonomi dan budaya, yang melahirkan istilah Cina Kaili; 3) Peristiwa G30S mengubah identitas orang Tionghoa di Palu dari inklusif menjadi eksklusif, akibat trauma yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Kata kunci: Tionghoa, Masyarakat, Transformasi, Identitas, Relasi Sosial

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Eksistensi masyarakat Tionghoa menghadirkan perubahan ekonomi dan sosial di Kota Palu. Perubahan ini lahir dari kemampuan mereka membaaur dengan lingkungannya. Kemampuan membaaur ini sejalan dengan pandangan mengenai eksistensi yang dikemukakan oleh Abidin Zaenal, bahwa eksistensi sebagai suatu proses yang dinamis, menjadi atau mengada. Eksistensi tidak bersifat kaku dan terhenti, melainkan lentur atau kenyal dan mengalami perkembangan atau sebaliknya kemunduran, tergantung pada kemampuan dalam mengaktualisasikan potensi-potensinya. Eksistensi selalu bersifat historis dan menuju masa depan.¹ Perubahan ekonomi dan sosial ini berkelindan, seiring upaya mereka menanggalkan identitas ketionghoannya dan menjadi Kaili. Transformasi identitas ini adalah upaya mereka untuk menyatu dalam sistem sosial setempat, untuk menegaskan eksistensi sosial dan ekonominya. Eksistensi sosial mereka hadir lewat identitas baru sebagai masyarakat Kaili, yang kemudian menjadi pintu masuk eksistensi ekonomi mereka sebagai pedagang. Identitas baru ini memberikan akses kepada mereka terkait keamanan dan kemudahan dalam aktivitas perdagangan mereka sehari-hari.

Orang Tionghoa telah ada di Palu sejak pertengahan abad XIX. Mereka masuk melalui Wani, tetapi yang paling umum berasal dari Donggala.² Wani dan

¹ Anton Bakker, *Filsafat Sejarah: Refleksi Sistematis* (Yogyakarta: Thafa Media, 2018), 149.

² Fatma, "Bulonggo, Perubahan Pola Pewarisan Dalam Keluarga Saudagar dan Bangsawan Kaili di Palu 1920-1992" (Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2016), 132.

Donggala merupakan dua wilayah yang menjadi pelabuhan dagang di Teluk Palu yang memungkinkan penyerbukan lintas budaya (*cross cultural fertilization*).³ Sebagian besar orang Tionghoa di Palu berasal dari Surabaya, Banjar, Makassar, dan Manado.⁴ Pada akhir abad tersebut, orang Tionghoa mulai mendapat tempat sebagai pedagang.⁵ Hingga abad XX, Palu yang saat itu merupakan sebuah kerajaan, juga dihuni oleh berbagai suku bangsa. Ada orang Bugis, Mandar, Manado, Minahasa, Melayu, Minang, Banjar, dan Arab. Berarti tidak hanya orang Tionghoa yang hidup berdampingan dengan masyarakat Kaili. Mereka telah beranak pinak, bahkan telah berhasil membangun kehidupan sosial ekonomi yang kuat di Palu. Akibat dari pembaurannya itu, maka sebagian besar para pendatang tersebut, telah menjadi bagian dari masyarakat Kaili, yang merupakan masyarakat mayoritas di wilayah Palu. Menjadi Kaili adalah salah satu cara mereka untuk dapat hidup damai dan layak di negeri asing seperti Palu.⁶

Menjadi Kaili dapat dikatakan sebagai cara masyarakat pendatang, seperti masyarakat Tionghoa, agar dapat hidup damai dan layak di wilayah Palu. Hal ini menjadi bukti upaya membangun identitas baru untuk mendefinisikan posisi mereka dalam masyarakat, bahkan ber transformasi ke dalam struktur sosial setempat. Upaya membangun identitas baru ini sendiri, dilakukan melalui metode perkawinan. Para perantau dari Tiongkok yang datang ke Palu menikahi

³ Mohammad Sairin, "Dunia Maritim Teluk Palu Masa Prakolonial," *Jurnal Midden Celebes* 1, no. 1 (2012).

⁴ Daerah asal para imigran Tionghoa ini, kemudian melekat menjadi penyebutan atau pengelompokan masyarakat Tionghoa di Kota Palu, seperti Cina Surabaya, Cina Donggala, Cina Banjar, Cina Makassar dan Cina Manado. Jhon Tanod, "Daerah Asal Imigran Tionghoa," interview by Jefrianto, June 16, 2021.

⁵ "Bulonggo, Perubahan Pola Pewarisan Dalam Keluarga Saudagar dan Bangsawan Kaili di Palu 1920-1992," 132.

⁶ *Ibid.*, 40.

penduduk setempat. Tujuannya adalah untuk meleburkan diri dalam struktur sosial setempat sehingga dapat mengakses hidup damai dan layak.⁷

Cara yang dipilih oleh orang Tionghoa adalah berdagang. Selain berdagang, masyarakat Tionghoa membangun identitasnya melalui jalur pendidikan, yakni dengan mendirikan sekolah *Chung Hwa Xue Xiao* di Palu. Sekolah tersebut tidak hanya menerima siswa keturunan Tionghoa, tetapi juga siswa dari masyarakat lokal dan masyarakat pendatang lainnya, yang bermukim di sekitar kawasan tempat tinggal masyarakat Tionghoa di Kota Palu.⁸ Kebijakan membuka akses pendidikan seluas-luasnya ini, membuat masyarakat Tionghoa dapat diterima dan diposisikan dengan baik oleh masyarakat Palu.

Fenomena di atas tadi, sejalan dengan penjelasan Bambang Purwanto bahwa salah satu alasan masyarakat Tionghoa membuka diri terkait dunia pendidikan, baik itu menyekolahkan anaknya di sekolah non Tionghoa atau membuka akses Sekolah Tionghoa untuk kalangan pribumi, adalah kesadaran pada diri orang tua para siswa tersebut untuk sejak awal memberi dasar kepada anak-anak mereka tentang arti keberagaman, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun berbangsa.⁹ Bambang Purwanto juga menjelaskan bahwa

⁷ Moh. Ceng Putong, "Upaya Membangun Identitas Baru," interview by Jefrianto, June 17, 2021. Moh. Ceng Putong merupakan warga peranakan Tionghoa yang menikah dengan warga lokal pada tahun 1980 dan kini bertransformasi menjadi warga lokal dengan berjualan makanan. Namin, "Perkawinan Campur Orang Tionghoa," interview by Jefrianto, March 27, 2021. Perkawinan campur antara orang Tionghoa dan masyarakat lokal ini menghasilkan apa yang disebut masyarakat peranakan. Masyarakat peranakan ini biasa disebut dengan sebutan Cina Kaili. Leo Suryadinata, "Negara dan Minoritas Tionghoa di Indonesia," *Wacana* 1, no. 2 (Oktober 1999): 224.

⁸ Tedi Halim, "Identitas Masyarakat Tionghoa Lewat Pendidikan," interview by Jefrianto, June 16, 2021.

⁹ Bambang Purwanto, "Pertahankan Ruang Inklusif Bangsa," *kompas.id*, last modified June 15, 2021, accessed December 6, 2022, <https://www.kompas.id/baca/opini/2021/06/16/pertahankan-ruang-inklusif-bangsa>.

masyarakat pribumi dan pendatang atau masyarakat pendatang, telah menjalani kehidupan sehari-hari secara damai tanpa prasangka, sejak lebih dari satu abad sebelumnya. Cara berpikir positif itu bersambut dengan sikap masyarakat pendatang, yang juga menyadari tentang arti penting dari hidup damai dalam keberagaman.¹⁰

Masyarakat Tionghoa di Palu menempati wilayah Ujuna, Kampung Baru dan Siranindi. Selain mereka, ketiga wilayah ini juga dihuni oleh masyarakat pendatang lainnya. Pemerintah Hindia Belanda melokalisir pemukiman masyarakat pendatang, berdasarkan kelompok etniknya masing-masing. Masing-masing kelompok etnik memiliki pemimpin yang disebut sebagai kapitan/kapten.¹¹ Kehadiran para pendatang tersebut mengakibatkan masyarakat Palu menjadi heterogen. Heterogenitas ini yang mendorong masyarakat Tionghoa yang ada di Palu untuk membaaur. Pembauran ini dapat dilihat dari kemampuan masyarakat Tionghoa di Kota Palu, untuk menggunakan bahasa daerah setempat, yakni bahasa Kaili dengan cukup fasih, sebagai bahasa sehari-hari. Kemampuan berbaur masyarakat Tionghoa ini, diyakini sebagai salah satu upaya untuk membentuk identitas baru, yang mendefinisikan posisi mereka dalam masyarakat dan transformasi ke dalam struktur sosial setempat, sehingga mereka memiliki akses terhadap keamanan dan pangsa pasar yang lebih luas untuk memasarkan barang dagangannya. Kemudian, kawasan tempat tinggal mereka yang tidak jauh dari pasar, selain memudahkan mereka untuk berdagang, juga memiliki fungsi

¹⁰ Ibid.

¹¹ Kapitein atau Kapitan, berasal dari bahasa Spanyol untuk kapten. Kapitan adalah sebuah gelar yang diberikan kepada kepala kelompok ras. Seorang kapitan diberikan kekuasaan oleh pemerintah kolonial untuk mengatur urusan kelompok ras tersebut, yang berkenaan dengan agama dan adat istiadat. Kapitan juga diharapkan untuk menyelesaikan pertikaian di antara kelompok rasnya, sehubungan dengan hukum adat. Suryadinata, "Negara dan Minoritas Tionghoa di Indonesia," 227.

lain yakni sebagai sarana pembauran mereka dengan masyarakat lokal dan masyarakat pendatang lainnya.

Perubahan identitas masyarakat Tionghoa menjadi masyarakat Kaili ini, kemudian menemui titik balik pasca peristiwa G30S pada tahun 1965. Stigma komunis dari masyarakat, serta perlakuan diskriminatif dari pemerintah lewat pemberlakuan sejumlah aturan yang dikhususkan kepada masyarakat Tionghoa, meninggalkan trauma mendalam bagi mereka. Trauma ini kemudian diwariskan dari generasi ke generasi dan mengubah identitas masyarakat Tionghoa di Kota Palu yang semula inklusif menjadi eksklusif.

Penelitian tentang masyarakat Tionghoa di Kota Palu sendiri, belum pernah dilakukan sebelumnya. Namun, penelitian terhadap masyarakat pendatang lainnya di Kota Palu, sudah pernah dilakukan, baik dalam bentuk artikel maupun skripsi, misalnya tentang masyarakat Arab di Kota Palu¹², serta masyarakat Bali di Kota Palu.¹³ Untuk itu penulis merasa perlu melakukan kajian terhadap sejarah masyarakat Tionghoa di Kota Palu, untuk melihat eksistensi masyarakat Tionghoa di Kota Palu, serta memperkaya kajian sejarah tentang masyarakat pendatang di Kota Palu.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas, maka pokok permasalahan penelitian ini adalah

1. Bagaimana proses kedatangan masyarakat Tionghoa di Kota Palu?
2. Bagaimana proses pembauran dan eksistensi masyarakat Tionghoa di Kota

¹² Popy Nursiah Pusadan, "Keberadaan Masyarakat Arab Di Kota Palu" (Skripsi, Universitas Tadulako, 2009).

¹³ I Wayan Subagja, "Dewata Di Tanah Kaili: Transformasi Sosio-Kultural Orang Bali Di Palu (1983-2008)" (Skripsi, Universitas Tadulako, 2009).

Palu?

3. Bagaimana relasi masyarakat Tionghoa dan masyarakat Muslim di Kota Palu?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bermaksud mengungkapkan proses kedatangan, pembauran, mencapai eksistensi serta bentuk eksistensi masyarakat Tionghoa di Kota Palu, serta relasinya dengan masyarakat Muslim di Kota Palu.

Adapun kegunaan penelitian ini, yaitu memperkaya kajian sejarah tentang masyarakat pendatang di Kota Palu, yang belum banyak dikaji oleh para sejarawan, baik di Kota Palu maupun di luar Kota Palu.

D. Penegasan Istilah

Pada bagian ini, penulis membatasi dan menegaskan istilah-istilah yang akan digunakan pada penulisan skripsi ini. Hal tersebut bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami dengan jelas istilah yang ada di dalam penelitian ini.

1. Masyarakat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.¹⁴ Menurut Ralph Linton, masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka

¹⁴ “Hasil Pencarian - KBBI Daring,” accessed July 27, 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Masyarakat>.

sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.¹⁵

Masyarakat menurut Selo Soemardjan, adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan dan mereka mempunyai kesamaan wilayah, identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan.¹⁶

2. Tionghoa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Tionghoa adalah istilah untuk orang atau bangsa yang berasal dari Tiongkok; Cina.¹⁷ Penggunaan istilah Tionghoa di Indonesia dilakukan oleh Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono pada Maret 2014, lewat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pencabutan Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE-06/Pres.Kab/6/1967, Tanggal 28 Juni 1967. Keppres itu ditetapkan pada 12 Maret 2014.¹⁸

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka dalam semua kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, penggunaan istilah orang dan atau komunitas Tjina/China/Cina diubah menjadi orang dan atau komunitas Tionghoa dan untuk penyebutan negara Republik Rakyat China diubah menjadi Republik Rakyat Tiongkok.¹⁹

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, 47th ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 22.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ "Hasil Pencarian - KBBI Daring," accessed July 27, 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Tionghoa>.

¹⁸ Kompas Cyber Media, "SBY dan Digantinya Istilah 'China' Jadi 'Tionghoa'...", *KOMPAS.com*, last modified January 31, 2022, accessed January 25, 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/01/05500071/sby-dan-digantinya-istilah-china-jadi-tionghoa-->.

¹⁹ Ibid.

Dalam Keppres itu dikatakan bahwa Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE-06/Pres.Kab/6/1967 yang pada pokoknya mengganti penggunaan istilah "Tionghoa/Tionggok" dengan istilah "Tjina" dinilai telah menimbulkan dampak psikososial-diskriminatif dalam relasi sosial yang dialami warga Indonesia keturunan Tionghoa. Sementara, pandangan dan perlakuan diskriminatif terhadap seseorang, kelompok, komunitas, dan atau ras tertentu pada dasarnya melanggar nilai prinsip perlindungan HAM, sehingga bertentangan dengan UUD 1945, Undang-undang tentang HAM, dan UU tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.²⁰

Alasan lain Keppres ini diterbitkan adalah juga ketika UUD 1945 ditetapkan, para perumus UUD tidak menggunakan sebutan "Cina", melainkan menggunakan frasa "peranakan Tionghoa". Istilah ini merujuk pada orang-orang bangsa lain yang dapat menjadi warga negara jika kedudukan dan tempat tinggalnya di Indonesia mengakui Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada NKRI.²¹

Langkah yang ditempuh SBY itu menjadi bagian dari perjalanan panjang sejarah etnis Tionghoa di Indonesia. Pada era Orde Lama, Imlek tidak bisa lepas dari dinamika politik Tanah Air. Saat itu, Presiden Soekarno membangun persahabatan dengan pemerintah Cina, sehingga perayaan Imlek diberi tempat. Soekarno juga menerbitkan Ketetapan Pemerintah tentang Hari Raya Umat Beragama Nomor 2/OEM Tahun 1946. Pada butir Pasal 4 disebutkan, Tahun Baru Imlek, Ceng Beng (berziarah dan membersihkan makam leluhur) dan hari lahir serta wafatnya Khonghucu ditetapkan sebagai hari libur.²²

²⁰ Ibid.

²¹ Ibid.

²² Ibid.

Berlanjut ke era Orde Baru, etnis Tionghoa mengalami kekangan dari pemerintah. Kala itu, Presiden Soeharto mengeluarkan Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 14/1967 tentang Pembatasan Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Tiongkok. Inpres tersebut menetapkan bahwa seluruh upacara agama, kepercayaan dan adat istiadat Tiongkok hanya boleh dirayakan di lingkungan keluarga dan dalam ruangan tertutup. Dengan Inpres itu, seluruh perayaan tradisi dan keagamaan etnis Tionghoa termasuk Tahun Baru Imlek, Cap Go Meh, dan sebagainya dilarang dirayakan secara terbuka. Bahkan, tarian Barongsai dan Liong dilarang dipertunjukkan pada publik.²³

Pada masa kepemimpinan Soeharto itulah Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor 06 Tahun 1967 diterbitkan, bersamaan dengan Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 286/KP/XII/1978 yang isinya menganjurkan WNI keturunan yang masih menggunakan tiga nama untuk mengganti dengan nama Indonesia sebagai upaya asimilasi. Bahkan, etnis Tionghoa dianjurkan menikah dengan penduduk setempat, menanggalkan bahasa, agama, kepercayaan, dan adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari.²⁴

Pembatasan terhadap etnis Tionghoa baru berakhir di masa Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Kala itu, ia membuka kebebasan beragama bagi masyarakat Tionghoa. Hal tersebut ditandai dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 19/2001 pada tanggal 9 April 2001 yang meresmikan Imlek sebagai hari libur fakultatif (hanya berlaku bagi mereka yang merayakannya). Kebijakan Gus Dur kemudian disempurnakan oleh Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri. Dia mengeluarkan Keputusan Presiden Republik

²³ Ibid.

²⁴ Ibid.

Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hari Tahun Baru Imlek sebagai hari Libur Nasional.²⁵

Koentjaraningrat mengatakan, Tionghoa dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu Tionghoa Totok dan Tionghoa Keturunan. Tionghoa Totok adalah orang Tionghoa yang lahir di Tionghoa dan Indonesia, juga merupakan hasil dari perkawinan sesama Tionghoa. Tionghoa keturunan adalah orang Tionghoa yang lahir di Indonesia dan merupakan hasil perkawinan campur antara orang Tionghoa dengan orang Indonesia.²⁶

3. Eksistensi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Eksistensi adalah hal berada; keberadaan.²⁷ Abidin Zaenal menyebut eksistensi sebagai suatu proses yang dinamis, menjadi atau mengada. Eksistensi tidak bersifat kaku dan terhenti, melainkan lentur atau kenyal dan mengalami perkembangan atau sebaliknya kemunduran, tergantung pada kemampuan dalam mengaktualisasikan potensi-potensinya. Eksistensi selalu bersifat historis dan menuju masa depan.²⁸

4. Identitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), identitas adalah jati diri.²⁹ Identitas adalah bagian dari konsep diri seseorang yang berasal dari pengetahuan mereka tentang keanggotaan dalam suatu kelompok sosial,

²⁵ Ibid.

²⁶ Koentjaraningrat, *Manusia Dan Kebudayaan Di Indonesia*, 19th ed. (Jakarta: Djambatan, 2002).

²⁷ “Hasil Pencarian - KBBI Daring,” accessed July 27, 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Eksistensi>.

²⁸ Bakker, *Filsafat sejarah*, 149.

²⁹ “Hasil Pencarian - KBBI Daring,” accessed July 27, 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/identitas>.

bersamaan dengan signifikansi nilai dan emosional dari keanggotaan tersebut.³⁰

5. Relasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), relasi adalah hubungan, hubungan pertalian; kenalan, serta langganan.³¹ Secara spesifik, relasi sosial merupakan suatu hubungan antara dua individu yang disebut dengan “dyad”, tiga individu disebut dengan “triad” atau lebih yang disebut dengan “kelompok sosial.”³² Ada lima aspek penting dalam sebuah relasi sosial, yakni dukungan, konflik, dominasi, kekuasaan dan status.³³ Relasi sosial juga membentuk jaringan sosial dan politik. Jaringan ini diciptakan, dipelihara dan dimanfaatkan jika perlu.³⁴

E. Garis-garis Besar Isi

Pada bagian ini, penulis akan memberikan gambaran mengenai isi proposal skripsi, sebagai informasi awal mengenai masalah yang akan diteliti. Proposal skripsi ini terdiri dari lima bab yang terdiri dari beberapa sub bab.

Bab I, menguraikan beberapa hal, seperti latar belakang yang mengurai dasar berpikir sehingga penelitian ini diperlukan, kemudian rumusan masalah yang mendeskripsikan masalah-masalah yang hendak menjadi fokus penelitian,

³⁰ Henri Tajfel and John C. Turner, “The Social Identity Theory of Intergroup Behavior,” in *Political Psychology*, 1st ed. (London: Psychology Press, 2004).

³¹ Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 1286.

³² Arie W. Kruglanski and E. Tory Higgins, eds., *Social Psychology: Handbook of Basic Principles*, 2nd ed. (New York: Guilford Press, 2007).

³³ Irene H. A. De Goede, Susan J. T. Branje, and Wim H. J. Meeus, “Developmental Changes in Adolescents’ Perceptions of Relationships with Their Parents,” *Journal of Youth and Adolescence* 38, no. 1 (January 2009): 75–88.

³⁴ Heddy Shri Ahimsa-Putra, “Prologue: Dari Ekonomi Moral, Rasional Ke Politik Usaha,” in *Ekonomi Moral, Rasional Dan Politik Dalam Industri Kecil Di Jawa* (Yogyakarta: Kepel Press, 2003), 8–9.

kemudian tujuan dan manfaat penelitian yang mengurai sasaran dan kegunaan penelitian ini, penegasan istilah untuk memudahkan pembaca memahami istilah-istilah di dalam penulisan, serta garis-garis besar isi untuk memudahkan pembaca melihat skema isi dari proposal skripsi ini.

Bab II, berisi tentang kajian pustaka yang terdiri dari penelitian-penelitian terdahulu, untuk melihat korelasi dan perbedaan tema penelitian yang diambil dengan penelitian sebelumnya. Kemudian, kajian teori yang digunakan untuk melihat landasan teori yang memperkuat hipotesis dalam penelitian ini.

Bab III, menguraikan tentang metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini. Metode penelitian ini juga menyangkut jenis penelitian yang dilakukan, yakni penelitian sejarah, dengan empat metode, yakni heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Selanjutnya, desain penelitian, lokasi penelitian dan kehadiran peneliti, memberikan gambaran mengenai konteks penelitian yang akan dilakukan.

Bab IV, berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari sejumlah sub bab seperti Gambaran Sejarah Kota Palu, Asal Usul Masyarakat Tionghoa di Kota Palu, Menjadi Kaili: Perubahan Identitas Masyarakat Tionghoa di Kota Palu, *Chung Hwa Xue Xiao*: Penanda Identitas Masyarakat Tionghoa di Kota Palu, serta Relasi Masyarakat Tionghoa dengan masyarakat Muslim di Kota Palu.

Bab V, menguraikan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan saran sebagai jawaban dari permasalahan yang diteliti.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang masyarakat Tionghoa di Indonesia, sudah dilakukan oleh sejumlah penulis. Ong Hok Ham misalnya, menulis tentang *Riwayat Tionghoa Peranakan di Jawa*.¹ Dalam tulisannya, Ong Hok Ham membahas mengenai sejarah sosial dan politik orang Tionghoa peranakan di Jawa, yang menjelaskan landasan berpikir dan pandangan Ong terhadap kedudukan, baik masa lalu, masa kini dan masa akan datang orang Tionghoa peranakan dalam masyarakat Indonesia. Menurut Ong, asimilasi atau peleburan menjadi orang Indonesia “asli” adalah solusi bagi orang Tionghoa peranakan di Jawa untuk keluar dari label minoritas yang melekat pada mereka. Asimilasi sebagai upaya menghilangkan identifikasi sebagai anggota golongan minoritas ini, dapat dilakukan dengan perubahan nama, suasana pendidikan, sekolah campuran dan hal lainnya. Hal ini menjadi penting, karena seorang anggota minoritas menurutnya dapat memperbaiki kedudukannya sebagai perseorangan tetapi ia tidak mungkin mempertahankan atau memperbaiki kedudukan minoritas sebagai golongan.²

Selanjutnya, karya Andjarwati Noordjanah tentang *Komunitas Tionghoa di Surabaya*.³ Dalam tulisannya, Andjarwati membahas mengenai konteks sejarah Surabaya sebagai sebuah kota dari masa kolonial hingga masa kemerdekaan, serta

¹ Ong Hok Ham, *Riwayat Tionghoa Peranakan Di Jawa* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2009).

² *Ibid.*, 157–158.

³ Andjarwati Noordjanah, *Komunitas Tionghoa Di Surabaya* (Yogyakarta: Ombak, 2010).

hubungannya dengan kehadiran masyarakat Tionghoa di sana. Menurut Andjarwati, golongan Tionghoa pada masa kekuasaan Belanda di Surabaya pada awal abad ke-20 berbeda dengan mereka yang hidup pada dekade awal abad ini. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah turut berperan dalam melahirkan generasi-generasi Tionghoa yang berbeda. Ketika berbagai kebijakan yang diperuntukkan bagi komunitas Tionghoa, sejak dijalankan hingga saat peraturan tersebut dihapuskan, golongan ini tetap berada dalam keterbatasan. Namun demikian dari minoritas ini muncul kesadaran baru yang dipelopori oleh orang-orang Tionghoa yang lebih modern sebagai hasil politik diskriminasi rasial yang dilakukan oleh kolonial dan mendasarkan pada kondisi dan jaman yang ada. Pemogokan penduduk Tionghoa di Surabaya pada awal kemerdekaan adalah salah satu bentuk nyata dari dampak pelaksanaan berbagai kebijakan yang pernah dijalankan bagi golongan ini pada masa-masa sebelumnya.⁴

Rika Theo dan Fennie Lie juga menuliskan sebuah buku yang berjudul *Kisah, Kultur dan Tradisi Tionghoa Bangka*.⁵ Karya ini berbicara mengenai peleburan budaya Melayu dan Tionghoa di Bangka, yang menjadikan identitas Tionghoa Bangka menjadi salah satu identitas etnisitas di Bangka, yang bersanding dengan identitas kemelayuan mereka. Tulisan ini mencoba mendeksripsikan proses kultural masyarakat Tionghoa di Bangka, dari yang sebelumnya asing, kemudian menyatu dengan lingkungan sekitarnya.

Salah satu karya yang juga membahas mengenai kehidupan masyarakat Tionghoa di Indonesia adalah karya Yerry Wirawan tentang *Sejarah Masyarakat*

⁴ Ibid., 137–138.

⁵ Rika Theo and Fennie Lie, *Kisah, Kultur, Dan Tradisi Tionghoa Bangka* (Jakarta: Kompas, 2014).

Tionghoa di Makassar.⁶ Dalam tulisannya, Yerry Wirawan berupaya memberikan gambaran menyeluruh tentang perkembangan sejarah masyarakat Tionghoa di Makassar, sejak permulaan pada akhir abad ke-16 hingga permulaan abad ke-17, hingga tahun 1965, yang menandai awal Orde Baru dengan politik asimilasinya yang keras. Menurut Yerry, kedatangan para imigran Tionghoa dalam jumlah besar ke Makassar pada akhir abad ke-19, yang dengan segera bergabung dalam perdagangan, mengubah struktur sosial masyarakat. Mereka mendorong proses “resinisasi” dengan gaya hidup, pendirian tempat ibadah, pembangunan rumah-rumah abu, dan sekolah-sekolah. Namun, masyarakat peranakan Muslim menurut Yerry, tampaknya kurang mampu bertahan dalam situasi baru masyarakat Tionghoa ini, saat pemimpin mereka secara tidak langsung menerapkan kebijakan menghalangi pergantian agama ke Islam. Akibatnya adalah peranakan Muslim ini sedikit demi sedikit melebur dalam masyarakat Makassar.⁷

Selanjutnya, karya Heri Purwanto tentang orang Cina Khek di Singkawang, Sambas, Kalimantan Barat.⁸ Menurut Heri, asimilasi merupakan konsekuensi logis dari pemberian status WNI kepada orang Tiongkok yang lahir dan puluhan tahun lamanya menetap serta mencari nafkah di Indonesia. Heri juga berpendapat, identitas sebagai bangsa Indonesia dan loyalitas terhadap negara Indonesia, erat kaitannya dengan kuat lemahnya orientasi seseorang terhadap kebudayaan Tiongkok. Kemudian, berkurangnya orientasi terhadap kebudayaan leluhur, berhubungan erat dengan mulai berkembangnya rasa identitas diri sebagai orang Indonesia. Orientasi orang Cina Khek dinilai tampak semakin lemah

⁶ Yerry Wirawan, *Sejarah Masyarakat Tionghoa Di Makassar* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2013).

⁷ Ibid., 251–252.

⁸ Hari Poerwanto, *Cina Khek Di Singkawang* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2014).

lantaran berkembangnya rasa identitas diri sebagai orang Indonesia. Hal ini terutama tampak pada masyarakat Cina Singkawang yang sedang duduk di bangku SLTA. Kemudian, frekuensi dan intensitas komunikasi dan interaksi sosial yang tinggi terlihat mampu mengurangi perbedaan pada individu berbeda golongan. Namun, frekuensi dan intensitas komunikasi serta interaksi sosial yang tinggi untuk menciptakan saling memahami yang tinggi dan memperkuat solidaritas nasional, kadang masih terhambat masalah stereotip etnik dan latar belakang sejarah yang berbeda, serta rendahnya wawasan berbangsa dan bernegara di kalangan orang Tiongkok.⁹

Sejumlah penelitian terdahulu tentang masyarakat Tionghoa ini memberikan gambaran kepada penulis mengenai kehadiran, pembauran dan eksistensi, serta relasi masyarakat Tionghoa dengan masyarakat di tempat mereka bermukim. Ong misalnya, melihat bahwa asimilasi adalah upaya untuk menghilangkan identifikasi orang Tionghoa sebagai anggota golongan minoritas. Hal ini juga penting untuk dilihat dalam konteks masyarakat Tionghoa di Palu, apakah proses transformasi mereka menjadi Kaili dapat dikatakan sebagai proses asimilasi untuk menghilangkan identifikasi sebagai golongan minoritas. Selanjutnya karya Andjarwati Noordjanah tentang Komunitas Tionghoa di Surabaya penting untuk melihat, sejauh mana kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik di masa kolonial maupun setelahnya, terhadap identitas dan eksistensi masyarakat Tionghoa di Palu. Kemudian, karya Rika Theo dan Fennie Lie yang melihat bagaimana peleburan budaya Melayu dan Tionghoa di Bangka menjadi identitas Tionghoa Bangka yang bersanding dengan identitas kemelayuan mereka menjadi penting untuk membandingkan proses peleburan ini dengan

⁹ Ibid., x-xi.

transformasi identitas masyarakat Tionghoa di Palu. Lalu karya Yerry Wirawan tentang masyarakat Tionghoa di Makassar penting untuk membandingkan relasi sosial antara masyarakat Tionghoa dan masyarakat lokal, juga bagaimana perubahan ekonomi dan sosial yang hadir dari relasi sosial ini. Terakhir, karya Heri Purwanto tentang orang Cina Khek di Singkawang, Sambas, Kalimantan Barat penting untuk melihat bagaimana proses transformasi identitas masyarakat Tionghoa yang seringkali terhambat oleh stereotip etnik dan latar belakang sejarah yang berbeda, serta rendahnya wawasan berbangsa dan bernegara orang Tionghoa.

B. Kajian Teori

1. Eksistensi

Eksistensi masyarakat Tionghoa di Palu lahir dari sebuah proses historis yang panjang. Abidin Zaenal menyebut eksistensi sebagai suatu proses yang dinamis, menjadi atau mengada. Eksistensi tidak bersifat kaku dan terhenti, melainkan lentur atau kenyal dan mengalami perkembangan atau sebaliknya kemunduran, tergantung pada kemampuan dalam mengaktualisasikan potensi-potensinya. Eksistensi selalu bersifat historis dan menuju masa depan.¹⁰ Menurut Soran Kierkegaard, bereksistensi bukan berarti hidup dalam pola-pola abstrak dan mekanis, tetapi terus menerus mengadakan pilihan-pilihan baru secara personal dan subjektif, dengan kata lain eksistensi manusia merupakan suatu eksistensi yang dipilih dalam kebebasan.¹¹ Dengan demikian, eksistensi

¹⁰ Anton Bakker, *Filsafat Sejarah: Refleksi Sistematis* (Yogyakarta: Thafa Media, 2018), 149.

¹¹ Surya Harianto, "Tiga Tahap Eksistensi Soren Aabey Kierkegaard," *Kompasiana*, last modified November 30, 2013, accessed December 6, 2022, <https://www.kompasiana.com/raiyenryan/5528f755f17e618f248b456b/tiga-tahap-eksistensi-soren-aabey-kierkegaard>.

merupakan sebuah proses aktualisasi yang dinamis, dengan pilihan – pilihan yang personal dan subjektif.

2. Identitas

Terkait pendekatan identitas, masyarakat Tionghoa di Kota Palu lebih cenderung mengarah ke bentuk identitas proyek (project identity), sebagaimana diungkapkan Castells. Dalam project identity, identitas yang dibangun ketika aktor-aktor sosial di mana basis material, memungkinkan untuk mereka membangun identitas baru, yang mendefinisikan posisi mereka dalam masyarakat dan dalam prosesnya terus melakukan transformasi ke dalam keseluruhan struktur sosial yang ada di dalamnya.¹²

Hal ini sejalan dengan upaya masyarakat Tionghoa di Kota Palu membangun identitas baru yang mendefinisikan posisi mereka dalam masyarakat dan transformasi ke dalam struktur sosial. Dengan kata lain, proses membangun identitas baru ini, yang kemudian mewujudkan eksistensi masyarakat Tionghoa di Kota Palu.

3. Relasi Sosial

Secara spesifik, relasi sosial merupakan suatu hubungan antara dua individu yang disebut dengan “dyad”, tiga individu disebut dengan “triad” atau lebih yang disebut dengan “kelompok sosial”.¹³ Ada lima aspek penting dalam sebuah relasi sosial, yakni dukungan, konflik, dominasi, kekuasaan dan

¹² Manuel Castells and Manuel Castells, *The Rise of The Network Society*, 2nd ed., with a new pref., *The Information Age : Economy, Society, and Culture v. 1* (Chichester, West Sussex ; Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2010).

¹³ Arie W. Kruglanski and E. Tory Higgins, eds., *Social Psychology: Handbook of Basic Principles*, 2nd ed. (New York: Guilford Press, 2007).

status.¹⁴ Relasi sosial juga membentuk jaringan sosial dan politik. Jaringan ini diciptakan, dipelihara dan dimanfaatkan jika perlu.¹⁵

C. Kerangka Pemikiran



¹⁴ Irene H. A. De Goede, Susan J. T. Branje, and Wim H. J. Meeus, "Developmental Changes in Adolescents' Perceptions of Relationships with Their Parents," *Journal of Youth and Adolescence* 38, no. 1 (January 2009): 75–88.

¹⁵ Heddy Shri Ahimsa-Putra, "Prologue: Dari Ekonomi Moral, Rasional Ke Politik Usaha," in *Ekonomi Moral, Rasional Dan Politik Dalam Industri Kecil Di Jawa* (Yogyakarta: Kepel Press, 2003), 8–9.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian sejarah yang menggunakan metodologi dan metode sejarah. Metodologi sejarah berbeda dengan metode sejarah. Kuntowijoyo menjelaskan, metodologi atau *Science of methods* ialah ilmu yang membicarakan jalan.¹ Di sini diuraikan berbagai jenis penulisan sejarah, unit kajian, permasalahan, teori, konsep dan sumber sejarah sedangkan metode sejarah ialah petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis tentang bahan, kritik, interpretasi, dan penyajian sejarah.²

Meskipun berbeda, metodologi sejarah dan metode sejarah dapat dipadukan untuk membuat kerangka penelitian. Dari hasil menggabungkan antara metodologi sejarah dan metode sejarah tersebut, peneliti kemudian merumuskan kerangka penelitian.

B. Lokasi Penelitian

Pemilihan lokasi atau site selection berkenaan dengan penentuan unit, bagian, kelompok, dan tempat dimana orang-orang terlibat di dalam kegiatan atau peristiwa yang ingin diteliti. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Palu.

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti tidak memfokuskan pada kelurahan tertentu, sebab pada penelitian sejarah, penggunaan sampel bisa saja

¹ Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), xix.

² Ibid.

diabaikan. Penelitian sejarah diarahkan untuk meneliti sesuatu yang unik dan khas.

C. Kehadiran Peneliti

Pada penelitian ini, peneliti bertindak sebagai pengamat penuh. Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai pengumpul data. Kehadiran peneliti dalam penelitian ini, diketahui oleh subjek dan informan.

D. Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga macam, yakni primer, sekunder dan tersier. Sejarawan menganggap bahwa sumber-sumber asli sebagai sumber pertama (primer), sedangkan apa yang telah ditulis oleh sejarawan sekarang atau sebelumnya berdasarkan sumber-sumber pertama, disebut sumber kedua (sekunder). Pada gilirannya, sumber kedua ini dikutip lagi oleh penulis berikutnya sehingga hasilnya menjadi sumber ketiga dan seterusnya. Umumnya yang dimaksud dengan sumber asli dari sumber pertama itu ialah evidensi (bukti) yang kontemporer (sezaman) dengan suatu peristiwa yang terjadi.³

Data primer yakni data yang berasal langsung dari pelaku atau saksi sejarah, seperti arsip dan foto dari keluarga atau organisasi Paguyuban Tionghoa di Palu. Selain itu, hasil wawancara dengan pelaku sejarah yang mengetahui sejarah masyarakat Tionghoa di Kota Palu, juga dapat dikategorikan sebagai sumber primer.

Selanjutnya, sumber sekunder terdiri dari arsip dan dokumen pendukung, seperti laporan kolonial, laporan pemerintah, juga wawancara dari keluarga pelaku sejarah yang mengetahui sejarah masyarakat Tionghoa di Kota Palu.

³ Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Ombak, 2007), 106–107.

Kemudian, sumber tersier yaitu literatur pendukung yang berkaitan dengan tema penelitian. Literatur pendukung ini antara lain buku-buku yang membahas keadaan Kota Palu di masa kerajaan, kolonial, pendudukan Jepang, hingga masa kemerdekaan.

E. Tehnik Pengumpulan Data

Kesulitan dalam melakukan penelitian ini adalah kurang tersedianya sumber yang berbentuk arsip, baik arsip kolonial maupun arsip pemerintah Republik Indonesia. Berdasarkan cakupan batas waktu penelitian ini, maka batasan waktu penelitian ini bergerak maju atau mundur melewati batas waktu yang ditetapkan. Selain itu pula, penelitian ini tidak dapat mengandalkan sumber berupa arsip secara utuh, diperlukan cara lain guna mendapatkan informasi mengenai topik penelitian ini. Penelitian ini menggunakan berbagai sumber yang bisa didapatkan, seperti arsip keluarga Tionghoa di Palu. Peneliti menemukan beberapa data arsip kolonial berupa Memori van Overgave para Kontrolir Palu tahun 1920-an dan 1930-an, di sebuah laman pencarian arsip kolonial yang aksesnya telah dibuka ke publik. Kemudian, laporan-laporan politik pemerintah yang membicarakan keadaan di Sulawesi Tengah, Donggala dan Palu digunakan untuk melihat keadaan sosial politik tahun 1930-an hingga tahun 1960-an. Tidak lupa pula, koran, majalah, dan foto juga diperhatikan kiranya ada yang membicarakan mengenai topik penelitian ini.

Penelusuran dilanjutkan di perpustakaan - perpustakaan Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Sulawesi Tengah, Museum Provinsi Sulawesi Tengah, dan Perpustakaan Universitas Tadulako, yang disinyalir menyimpan sumber-sumber lokal mengenai masyarakat Kota Palu, serta laporan penelitian yang telah dilakukan oleh akademisi di Sulawesi Tengah. Sumber-sumber ini akan memudahkan peneliti dalam mengkaji eksistensi masyarakat Tionghoa di

Kota Palu. Namun ketidaklengkapan sumber yang ada menjadi masalah tersendiri, sehingga diperlukan solusi metode agar penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Solusinya adalah dengan berusaha menelusuri sejarah melalui foto-foto koleksi pribadi maupun keluarga, guna memberikan cross-check informasi.

Guna memenuhi kebutuhan sumber, maka peneliti menggunakan metode wawancara. Wawancara dilakukan kepada orang-orang Tionghoa di Kota Palu, yang diyakini mengetahui tentang sejarah masyarakat Tionghoa di Kota Palu. Ada tiga kategori informan yang peneliti gunakan sebelum melakukan wawancara, yakni saksi sejarah, keluarga, dan juga mereka yang dianggap mengetahui beberapa hal, yang berkaitan dengan pelaku sejarah. Mengingat sifat dasar dari sebuah wawancara, subyektif, maka peneliti melakukan cross check antara satu informan ke informan lainnya. Selain itu, peneliti tetap menggunakan kaidah penggalian informasi secara lisan yakni mendahulukan informan yang berusia lanjut. Usia tertua informan yang peneliti wawancarai adalah 83 tahun, sedangkan yang termuda berusia 41 tahun.

F. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data, dilakukan dengan cara melakukan pembahasan (diskusi) dengan sejarawan yang memahami konteks sejarah masyarakat Tionghoa, serta sejarawan memahami konteks sejarah Kota Palu dan Sulawesi Tengah.

Pengecekan keabsahan data juga dilakukan dengan melakukan kritik sumber. Kritik sumber dilakukan, baik terhadap bahan materi (ekstern) sumber maupun terhadap substansi (isi) sumber. Kritik sumber umumnya dilakukan dengan terhadap sumber-sumber pertama. Kritik ini menyangkut verifikasi sumber yaitu pengujian mengenai kebenaran atau ketepatan dari sumber itu.

Dalam metode sejarah, dikenal dengan cara melakukan kritik eksternal dan kritik internal.⁴

Kritik eksternal adalah cara melakukan verifikasi atau pengujian terhadap aspek-aspek “luar” dari sumber sejarah. Sebelum semua kesaksian yang berhasil dikumpulkan oleh sejarawan dapat digunakan untuk merekonstruksi masa lalu, maka terlebih dahulu harus dilakukan pemeriksaan yang ketat.⁵

Kritik internal menekankan aspek “dalam” yaitu isi dari sumber. Setelah fakta ditegakkan melalui kritik eksternal, tiba giliran sejarawan untuk mengadakan evaluasi terhadap kesaksian itu. Ia harus memutuskan apakah kesaksian itu dapat diandalkan atau tidak.⁶

G. Tehnik Analisis Data

Setelah ditemukan fakta, maka dilakukan pengolahan data, yaitu tahap interpretasi. Wilman Darsono menyatakan, interpretasi artinya pemberian makna terhadap fakta. Upaya untuk memberikan makna (penafsiran) terhadap fakta yang telah ada, dilakukan dengan menggunakan alat analisis. Analisis yang digunakan adalah analisis personal, analisis kausalitas dan analisis kondisional. Analisis personal berguna untuk melihat latar belakang keluarga, suku, adat istiadat dan kepribadian tokoh. Analisis kausalitas dilakukan untuk melihat sebab dan akibat sebuah peristiwa sedangkan analisis kondisional adalah melihat kondisi ketika peristiwa itu terjadi.⁷

⁴ Ibid., 131–132.

⁵ Ibid., 132.

⁶ Ibid., 143.

⁷ Wilman Darsono Lumangino, “Mengais Rezeki Di Ayunan Ombak” (Skripsi, Universitas Tadulako, 2006), 23.

Tahap akhir dari metode sejarah adalah Historiografi atau penulisan sejarah, yaitu penulis menyajikan data hasil interpretasi dalam bentuk tulisan. Menurut Wilman Darsono, proses penyelesaian sebuah tulisan butuh ketelitian, pemusatan perhatian, dan kesungguhan. Kualitas sebuah tulisan ditentukan oleh kemampuan menyampaikan fakta dan imajinasi kesejarahan, serta penilaian pembacanya. Hasil penelitian dipaparkan dalam bentuk deskriptif analitis.⁸

⁸ Ibid.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Sejarah Kota Palu

Pada tahun 1796, Kerajaan Palu terbentuk dan bertahan hingga tahun 1961. Eksistensi Kerajaan Palu ini dimulai dengan pengangkatan Pue Nggari sebagai Magau pertama Palu pada 1796¹ dan diakhiri dengan penghapusan Swapraja pada tahun 1961, yang menandai berakhirnya Kerajaan Palu.² Perjalanan panjang eksistensi Kerajaan Palu ini, didukung oleh kecakapan para pemimpinnya dalam menjalankan pemerintahan, sebagaimana dikemukakan Thomas Carlyle. Namun menurut Herbert Spencer, pemimpin adalah produk dari masyarakat mereka, dan tindakan mereka tidak mungkin dapat terjadi tanpa kondisi sosial yang terbangun sebelum masa hidupnya.³ Sebelum kerajaan terbentuk pada 1796, situasi Palu sebagaimana digambarkan Valentijn dan Woodard, terdiri dari kampung-kampung yang masing-masing dipimpin oleh seorang penguasa atau kepala suku. Kepala suku ini dikenal dengan sebutan *Tomalanggai*. *Tomalanggai* merupakan tokoh berkharisma, semacam *primus inter pares* yang dipilih dari mereka yang terbaik dalam kelompoknya.⁴ Pada masa

¹ Donald F. Tick, "Kumpulan Silsilah Raja-Raja Di Sulawesi Tengah" (Pusat Dokumentasi Kerajaan-kerajaan di Indonesia, n.d.).

² Mohammad Sairin, "Bangsawan Sigi Dalam Arus Perubahan: Keluarga Lamakarate Dalam Politik Di Sulawesi Tengah, 1907-1982" (Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2016), 24. Raja Palu terakhir adalah Andi Wawo Parampasi, yang berstatus sebagai Kepala Swapraja Palu.

³ Robert L. Carneiro, "Herbert Spencer as an Anthropologist," *The Journal of Libertarian Studies* 5, no. 2 (1981): 171.

⁴ Tugas *Tomalanggai* adalah memimpin kelompoknya dalam membuka lahan pertanian dan pemukiman, menjaga keharmonisan dalam dunia spiritual melalui berbagai upacara, mengatur hubungan dengan kelompok lain, melindungi anggota kelompoknya dari serangan kelompok lain atau menggerakkan anggota kelompoknya untuk menyerang kelompok lain. Sairin, "Bangsawan

itu, masih sering terjadi perang antar kampung atau suku dan juga kebiasaan mengayau. Perang antar kampung ini pada akhirnya menyebabkan beberapa kampung melakukan persekutuan bersama untuk menghadapi musuh. Dari sinilah cikal bakal munculnya kerajaan-kerajaan besar di kawasan Teluk Palu, seperti Banawa, Sigi, Palu dan Tawaeli.⁵

Pada saat sistem pemerintahan di Palu mulai menggunakan pemerintahan kerajaan, raja disebut dengan panggilan *Madika*. S.J Esser menyatakan bahwa di tanah Kaili gelar tersebut dipengaruhi oleh adanya bahasa Sansekerta yakni *Maradika*, yang memiliki makna bebas dari perbudakan atau kerja wajib. Dalam perkembangannya kemudian berubah menjadi *Magau*, sebuah kata yang dipengaruhi oleh Bahasa Bugis yang diartikan sebagai pimpinan tertinggi di kerajaan.⁶ Adapun sistem pemerintahan tradisional Kerajaan Palu mempunyai unsur demokrasi atau sifatnya kolegial yang bersendikan hukum adat yang sudah disusun baik dan lengkap oleh satu dewan dari badan permusyawaratan rakyat yang disebut *Libu Ntodea*. *Libu Ntodea* merupakan perhimpunan wakil-wakil dari daerah atau wilayah taklukan kerajaan. *Libu Ntodea* Kerajaan Palu merupakan wujud badan perwakilan rakyat yang dikenal dengan nama *Kota Patanggota*. *Kota Patanggota* diketuai oleh seorang *Baligau* yang memiliki hak istimewa, yakni ikut menentukan jalannya pemerintahan yang harus dijalankan oleh *Libu Nu Maradika* dan juga bertugas melantik *Magau*. *Libu Nu Maradika* merupakan dewan eksekutif yang membantu seorang *Magau* menyelenggarakan

Sigi Dalam Arus Perubahan: Keluarga Lamakarate Dalam Politik Di Sulawesi Tengah, 1907-1982,” 26.

⁵ Mohammad Sairin, “Dunia Maritim Teluk Palu Masa Prakolonial,” *Jurnal Midden Celebes* 1, no. 1 (2012).

⁶ Utari Andrayani, “Gerakan Aisyiyah Di Kota Palu, 1965-2015” (Skripsi, UIN Datokarama Palu, 2022), 26.

pemerintahan.⁷ *Magau* Palu dibantu oleh *Madika Malolo* dan badan eksekutif yang terdiri dari *Madika Matua*, *Punggawa*, *Galara*, *Tadulako*, *Pabisara*, *Sabandara*, dan *Kapita*.⁸ *Madika Malolo* berperan sebagai Wakil *Magau* yang menjalankan pemerintahan sehari-hari. Adapun *Libu Nu Maradika* dikepalai oleh *Madika Matua* sebagai perdana menteri, yang bertanggung jawab atas jalannya pemerintahan di hadapan sidang *Kota Patanggota*. *Madika Matua* dibantu oleh *Punggawa* untuk menangani urusan dalam negeri. *Galara* bertugas mengurus persoalan penegakan hukum. *Tadulako* mengurus persoalan pertahanan dan keamanan. *Pabisara* sebagai juru bahasa, penyampai informasi, telik sandi dan duta.⁹ *Sabandara* mengurus perhubungan laut dan pelabuhan. *Kapita* bertugas menjadi pemimpin suatu wilayah.¹⁰

Kerajaan Palu sendiri terbentuk dari persekutuan empat kota (*Patanggota*), yakni Pandapa (Besusu), Siranindi, Tatanga, dan Loli. Pada perkembangannya, Palu kemudian dibagi menjadi 16 kota. Empat dari kota itu disebut *Patanggota*, yakni Siranindi, Besusu, Kamonji dan Kota Malayu (Kampung Baru). *Patanggota* ini dikepalai oleh *Magau* Palu. Empat kota lain berada di bawah *Baligau* Tatanga, yaitu Lekatu, Marawola, Buli dan Tatanga. Kemudian, empat kota bersatu dalam wilayah Wau, yakni Padende, Sibedi, Porame, dan Balane. Terakhir, empat kota dalam wilayah Topo Tara, yakni Kawatuna, Tanamodindi, Lasoani, serta Poboya.

⁷ Sairin, "Bangsawan Sigi Dalam Arus Perubahan: Keluarga Lamakarate Dalam Politik Di Sulawesi Tengah, 1907-1982," 37-38.

⁸ Fatma, "Bulonggo, Perubahan Pola Pewarisan Dalam Keluarga Saudagar dan Bangsawan Kaili di Palu 1920-1992" (Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2016), 35.

⁹ Sairin, "Bangsawan Sigi Dalam Arus Perubahan: Keluarga Lamakarate Dalam Politik Di Sulawesi Tengah, 1907-1982," 38-39.

¹⁰ "Bulonggo, Perubahan Pola Pewarisan Dalam Keluarga Saudagar dan Bangsawan Kaili di Palu 1920-1992," 35.

Adapun wilayah seperti Talise, Duyu, Beka, Dombu dan Nggolo berada di luar 16 wilayah kota ini. Mereka masing-masing memiliki *Madika* sendiri.¹¹

Kolonialisme hadir Palu pada pertengahan abad XIX.¹² Sebelumnya, wilayah Teluk Palu hanya dikunjungi beberapa kapal VOC. Perwakilan Kerajaan Palu baru menandatangani perjanjian dengan pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1824.¹³ Selanjutnya pada tahun 1854, Belanda kembali melakukan perjanjian dengan Palu, yang ditandatangani oleh *Magau* Palu, Mohamad La Makaraka pada 7 Juli 1854.¹⁴ Perjanjian selanjutnya ditandatangani oleh *Magau* Yojokodi pada 1 Mei 1888. Yojokodi menggantikan ayahnya, La Makaraka yang wafat pada 1906.¹⁵ Pemerintah Belanda baru secara resmi menempatkan perwakilannya dengan menempatkan seorang *Posthouder* bernama Martijn Muller di wilayah Teluk Palu (*Palosbaai*) sejak 7 Oktober 1891.¹⁶ Kemudian pada 11 April 1907, Parampasi yang menggantikan ayahnya, Yojokodi sebagai *Magau* Palu juga menandatangani perjanjian dengan Belanda. Lalu pada 15 Juli 1921, perjanjian ini diperbaharui oleh *Magau* Palu, Djanggola.¹⁷

¹¹ Albert Christiaan Kruyt, *De West-Toradjas Op Midden Celebes* (Amsterdam: Uitgave van de N.V Noord-Hollandsche Uitgevers-Maatschappij, 1938), 42.

¹² “Bulonggo, Perubahan Pola Pewarisan Dalam Keluarga Saudagar dan Bangsawan Kaili di Palu 1920-1992,” 131.

¹³ Sairin, “Dunia Maritim Teluk Palu Masa Prakolonial.”

¹⁴ *Regeerings Almanak Voor Nederlandsch Indie Tweede Gedeelte Kalender En Personalia* (Weltevreden: Lands-Drukkerij, 1865), 274.

¹⁵ Departement van Binnenlandsch Bestuur Afdeeling Bestuurszaken der Buitengewesten, *Overeenkomsten Met de Zelfbesturen in de Buitengewesten* (Nederlands: Landsdrukkerij, 1929), 632.

¹⁶ Sairin, “Dunia Maritim Teluk Palu Masa Prakolonial.”

¹⁷ Afdeeling Bestuurszaken der Buitengewesten, *Overeenkomsten Met de Zelfbesturen in de Buitengewesten*, 632.

Ketika berada di bawah kuasa Pemerintah Hindia Belanda, berdasarkan *Staatblad* 1893 No. 80, dibentuklah *Afdeeling Palosbaai* yang berkedudukan di Donggala dan dipimpin seorang *Posthouder*.¹⁸ *Afdeeling Palosbaai* menjadi bagian dari *Celebes en Onderhorigheden* dan membawahi wilayah Donggala, Tawaeli, Palos (Palu), Sigi, Dolo Rindau, Dolo Kaleke dan Biromaru. Kemudian, berdasarkan *Staatblad* 1904 No. 478, *Afdeeling* Sulawesi Tengah dibentuk di bawah kekuasaan seorang Asisten Residen atau Kontrolir. Kontrolir dan atau Asisten Residen berkedudukan di Donggala, yang membawahi tiga *Onderafdeeling*, yaitu Teluk Tomini (Tomini Bocht), Tolitoli, dan Teluk Palu (*Palosbaai*) yang terdiri atas daerah Palu, Sigi, Biromaru, Dolo-Rindau, Dolo-Kaleke, Banawa atau Donggala, Tawaeli dan daerah sekitarnya serta daerah langsung di Donggala di bawah seorang *Civiel Gezaghebber* dengan berkedudukan di Donggala.¹⁹ Selanjutnya, berdasarkan *Staatblad van Nederlandsch Indie* Tahun 1907 No. 27, dibentuklah *Afdeeling* Sulawesi Tengah yang membawahi empat *Onderafdeeling*, salah satunya *Onderafdeeling* Palu. *Onderafdeeling* Palu membawahi *Landschap*: Paloe, Biromaru, Sigi, Dolo, Koelawi, Tole, Benasoe, Tobokoe, Kantewoe, dan Banggaiba.²⁰

Palu pernah menjadi pusat pemerintahan untuk 6 (enam) wilayah, sehingga terlihat tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya. Tahun 1796-1961

¹⁸ Pemerintah Hindia Belanda menempatkan Martijn Muller sebagai *Posthouder* Teluk Palu (*Palosbaai*) yang berkedudukan di Donggala. Ia menjabat sejak 7 Oktober 1891. *Regeerings Almanak Voor Nederlandsch - Indie* (Lands-Drukkerij, 1892); “Bulonggo, Perubahan Pola Pewarisan Dalam Keluarga Saudagar dan Bangsawan Kaili di Palu 1920-1992,” 35.

¹⁹ “*Staatblad van Nederlandsch Indie* No. 478.” (Lands-Drukkerij, 1904); “Bulonggo, Perubahan Pola Pewarisan Dalam Keluarga Saudagar dan Bangsawan Kaili di Palu 1920-1992,” 35.

²⁰ “Bulonggo, Perubahan Pola Pewarisan Dalam Keluarga Saudagar dan Bangsawan Kaili di Palu 1920-1992,” 35.

dijadikan sebagai pusat Kerajaan Palu.²¹ Ketika kekuasaan kolonial kokoh di daerah Teluk Palu, status kerajaan dijadikan Landschap (1907-1942). Tahun 1907-1942 dan 1945-1951, Palu dijadikan sebagai salah satu *Onderafdeeling* di bawah Afdeling Donggala.²² Saat Jepang berkuasa atas wilayah Sulawesi Tengah, Palu hanya dijadikan sebagai tempat kedudukan Bunken. Saat Negara Indonesia Timur dibubarkan, Palu menjadi bagian dari Kabupaten Donggala, dengan statusnya sebagai sebuah Kewedanaan (1951-1963). Pada masa itu pula, Palu dijadikan sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Donggala (1952-1999). Bersamaan dengan itu juga, Residen Koordinator Sulawesi Tengah berkedudukan di sana pula hingga tahun 1964.²³ Ketika Propinsi Sulawesi Tengah dimekarkan, maka Palu menerima limpahan wewenang sebagai ibukota propinsi, setelah sebelumnya berada di Poso.

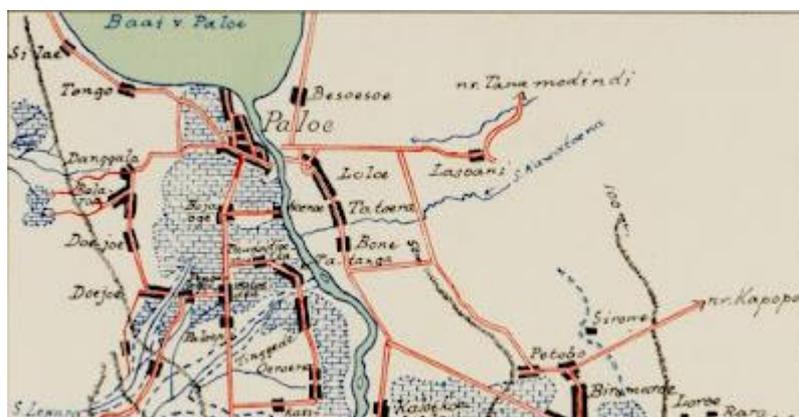
Terbentuknya Kerajaan Palu merupakan unsur penting dalam pembentukan Palu sebagai sebuah kota. Wilayah Palu dihuni oleh masyarakat Suku Kaili dengan beragam dialek, seperti *Ledo*, *Rai*, *Daa*, *Tara*, *Unde*, dan *Ende*. Dialek *Ledo* digunakan oleh masyarakat yang tinggal di wilayah palu bagian Barat, seperti Lere, Baru, Kamonji, Ujuna, Lolu, Besusu, Tatura, Tipo, Silae, Kabonena, Donggala Kodi, Balaroa, Boyaoge, Nunu, Tavanjuka, Pengawu,

²¹ P.A. van der Lith, A.J. Spaan, and F. Fokkens, *Ensiklopedie van Nederlandsch-Indië, Deel III* (Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1919), 274 Batas Kerajaan Palu di sebelah utara berbatasan dengan Kerajaan Banawa, Kerajaan Tawaeli dan Teluk Palu, di sebelah timur berbatasan dengan Kerajaan Biromaru dan Kerajaan Dolo dan di sebelah barat berbatasan dengan Mamuju. ; “Bulonggo, Perubahan Pola Pewarisan Dalam Keluarga Saudagar dan Bangsawan Kaili di Palu 1920-1992,” 34.

²² Masyuddin Masyudha, *Catatan Kritis Palu Meniti Zaman* (Palu: Yayasan Kesenian Sulawesi Tengah, 1997), 115; “Bulonggo, Perubahan Pola Pewarisan Dalam Keluarga Saudagar dan Bangsawan Kaili di Palu 1920-1992,” 34.

²³ “Bulonggo, Perubahan Pola Pewarisan Dalam Keluarga Saudagar dan Bangsawan Kaili di Palu 1920-1992,” 34.

Tinggede, Binangga dan Baliase. Dialek *Rai* digunakan oleh masyarakat di wilayah Talise. Dialek *Daa* digunakan oleh masyarakat di wilayah Kalora, Balane, Porame, Padende, Sibedi, Dombu dan Nggolo. Dialek *Tara* digunakan oleh masyarakat di wilayah Talise, Tanamodindi, Lasoani, Kawatuna dan Poboya. Dialek *Ende* digunakan oleh masyarakat di wilayah Duyu.²⁴ Hal ini kemudian ditopang oleh kedatangan penduduk dari luar Sulawesi Tengah, seperti Bugis, Mandar, Manado, Minahasa, Melayu, Minang, Banjar, Arab dan Tiongkok. Kedatangan masyarakat pendatang ini membuat komposisi penduduk Palu semakin beragam. Keragaman ini menghadirkan pembauran yang lahir dari interaksi antara masyarakat lokal dan pendatang. Kehidupan sosial budaya, bahkan politik di Palu menjadi kompleks, terutama pada dekade pertama hingga ketiga abad XX.²⁵



Gambar 1. Peta Palu tahun 1938

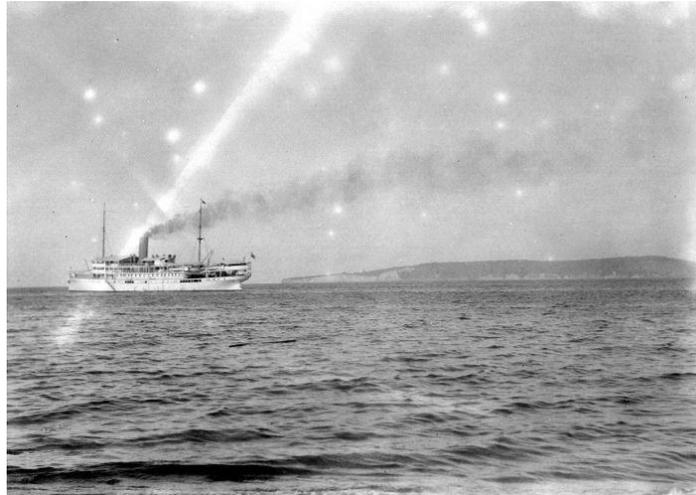
Sumber: KITLV

²⁴ J. A. Vorstman, "Aanvullende Memorie van Overgave van de Onderafdeling Paloe," February 28, 1935.

²⁵ "Bulonggo, Perubahan Pola Pewarisan Dalam Keluarga Saudagar dan Bangsawan Kaili di Palu 1920-1992," 33.

Pada awal abad XX, Palu telah menjadi salah satu kota yang sering kali disinggahi oleh kapal-kapal *Koninklijke Paketvaart Maatschappij* (KPM). Surat kabar *De Preanger Bode* edisi 22 Desember 1910 yang memuat iklan informasi jadwal pelayaran KPM dari pelabuhan Batavia untuk Desember 1910 mencatat, kapal Baud yang melayani pelayaran dengan Palu dan Donggala sebagai salah satu pelabuhan persinggahan. Pada surat kabar yang sama pada edisi 23 Maret 1911, yang memuat jadwal pelayaran KPM dari pelabuhan Batavia untuk Maret 1911, tercatat nama kapal Van Riemsdijk, yang singgah di Palu dan Donggala. Kemudian pada tahun 1913, ada kapal Van Neck, Mossel dan Rumphius, yang selain singgah di Donggala dan Palu, juga singgah di pelabuhan Wani dari pelabuhan Batavia. Lalu pada tahun 1914, ada kapal Rumphius, Van Heemskerk, dan Van Waerwijck yang singgah di pelabuhan Palu, Donggala dan Wani, serta Tolitoli, dari pelabuhan Batavia. Kemudian pada tahun 1915 ada kapal Sloet van de Beele yang singgah di pelabuhan Donggala, Palu, Wani dan Tolitoli, dari pelabuhan Batavia. Selanjutnya pada tahun 1917 ada kapal Van Linschoten yang singgah di pelabuhan-pelabuhan yang disebut di atas, dari pelabuhan Batavia. Pada periode 1920-an, tercatat pada tahun 1929 ada kapal Barentsz yang berlayar dari pelabuhan Semarang dan singgah di pelabuhan Donggala, Wani dan Palu. Rute ini tercatat dalam iklan jadwal pelayaran KPM dari pelabuhan Semarang untuk November 1929, yang diterbitkan surat kabar *De Locomotief* edisi 20 November 1929. Selanjutnya, pada tahun 1930 tercatat ada beberapa kapal yang singgah di Pelabuhan Palu, Donggala dan Wani, seperti kapal Roggeven, Swartenhondt, dan Van Cloon dari pelabuhan Semarang. Lalu pada tahun 1931 ada kapal Barentz dan Melchior Treub, yang berlayar dari pelabuhan Semarang.²⁶

²⁶ Jefrianto, "Riwayat Kapal KPM Di Teluk Palu," last modified 2021, accessed February



Gambar 2. Kapal SS Rumphius.

Sumber: Troppen Museum

Jauh sebelum kehadiran KPM, penduduk di sekitar Teluk Palu telah memiliki jaringan perdagangan lokal dan internasional. Berita tertua yang mencatat kehadiran wilayah di sekitar Teluk Palu sebagai bagian dari jalur pelayaran maritim dunia dapat dijumpai dalam sebuah kitab kuno Tiongkok, Kitab *Shun Fêng Hsiang Fung*, yang dibuat sekitar tahun 1430, pada masa kekuasaan Dinasti Ming. Kitab *Shun Fêng Hsiang Fung* menyebutkan rute perjalanan kapal-kapal Tiongkok ke perairan nusantara terdiri dari dua rute utama, yakni rute Barat dan rute Timur, serta di dalamnya terdapat rute-rute cabang lainnya. Rute Barat terdapat lima rute cabang, rute Kwang Tung menuju Malaka dan rute Wu Yu, dekat Amoy menuju Tuban, Jaratan, Sukadana dan Lawe. Rute Timur memiliki dua rute cabang, yakni dari Chuan-Chou menuju Brunei dan Donggala. Rute Chuan-Chou menuju Donggala, membuat kapal-kapal Tiongkok berangkat dari Chuan-Chou menuju Busuanga (sekarang termasuk wilayah Filipina). Setelah berlabuh sebentar di Busuanga, perjalanan dilanjutkan menuju Sulu. Kemudian dari Sulu dilanjutkan menuju *Ma-Li-Pen* Mountain (Tanjung

Mangkalihat, Kalimantan Timur). Perjalanan dilanjutkan selama 10 *Kêng* atau sekitar 24 jam (1 *Kêng* setara 2,4 jam) lagi ke arah 142,5 derajat Bujur Timur dan kapal akan tiba di wilayah Teluk Palu. Selama perjalanan, para pelayar telah melihat (dari kejauhan) sebuah gugusan pengunungan yang bernama *Pi-Chia-San* atau Pen Rack Mountain (Bukit Sidole) di bagian Timur. Setelah itu kapal akan tiba di *Tung-Chia-La* (Donggala). *Tung-Chia-La* dikatakan sebagai ibukota negeri *Shan-mu*, sebuah nama yang tidak terdeteksi artinya sekarang. Donggala menjadi tujuan terakhir dalam rute ini, setelah itu kapal akan kembali menuju Tanjung Mangkalihat untuk selanjutnya kembali ke Chuan-Chou. Diduga kapal-kapal tersebut membawa keramik atau porselen Tiongkok. Di masa lampau, keramik-keramik Tiongkok memiliki nilai yang cukup tinggi dan dijadikan sebagai mahar dalam pernikahan orang-orang Kaili, terutama untuk kaum bangsawan.²⁷

Catatan tentang wilayah Teluk Palu mulai banyak diperoleh setelah abad XVII, seiring dengan kemajuan perdagangan di sekitar Teluk Palu. Meningkatnya volume perdagangan di Teluk Palu tidak dapat dipisahkan dengan kemajuan Makassar masa itu. Sejak awal abad XVII, Makassar menjadi titik komersial, sebagai basis bagi semua pihak yang sedang mencari jalan untuk menghindari usaha VOC memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku. Semenjak abad XVI, Kerajaan Gowa memiliki hegemoni atas perairan Selat Makassar. Hegemoni Gowa atas wilayah Selat Makassar mulai dibatasi oleh VOC setelah penandatanganan Perjanjian Bongaya pada 18 November 1667. Seiring dengan perdagangan antara Makassar dengan Manila semakin intensif pada abad XVII, memungkinkan volume perdagangan di wilayah Teluk Palu juga semakin meningkat. Hal ini menjadi pintu masuk kawasan Teluk Palu terhubung dengan

²⁷ Sairin, "Dunia Maritim Teluk Palu Masa Prakolonial."

jalur perdagangan maritim dunia. Pelabuhan-pelabuhan Kaili menjadi daerah transit yang cukup penting di wilayah Selat Makassar. Pada saat bersamaan terjadi gelombang migrasi besar-besaran orang Bugis ke wilayah Palu, pasca penandatanganan perjanjian Bongaya tahun 1667. Kemajuan perdagangan di Teluk Palu telah memungkinkan penyerbukan lintas budaya (*cross cultural fertilization*). Penduduk pribumi telah menguasai bahasa Melayu yang saat itu telah menjadi *lingua franca* di Nusantara.²⁸

Sejak tahun 1920, Palu menjadi salah satu pusat penampungan kopra di Lembah Palu.²⁹ Penduduk di sekitar Teluk Palu telah menanam kelapa sejak abad XVII, dan mengandalkan kopra dan minyak kelapa sebagai sumber penghasilan dan membayar upeti. Menurut catatan Domingo Navarette, orang Spanyol yang berkunjung ke Pantai Barat Sulawesi Tengah pada tahun 1657 bahwa penduduk pribumi selalu memproduksi minyak kelapa yang mana mereka menjual dan juga mengirimkannya sebagai hadiah persembahan kepada Raja Makassar (Gowa). Permintaan minyak kelapa mencapai 90.000 *peck*. Penyerahan persembahan upeti kepada penguasa Makassar merupakan salah wujud patronase dari penduduk Teluk Palu kepada penguasa Gowa. Minyak kelapa sebagian besar dimanfaatkan untuk keperluan memasak dan juga untuk penerangan. Minyak kelapa yang dihasilkan dari wilayah Teluk Palu dan daerah pedalaman diekspor hingga ke Makassar, Jawa, dan Selat Melaka, khususnya ketika 1819, Singapura dibangun. Kelapa dan minyak kelapa dari wilayah Kaili juga telah diperdagangkan di Batavia pada abad XVII.³⁰

²⁸ Ibid.

²⁹ “Arsip Pemerintah Propinsi Sulawesi 1950-1960” (BPAD Sulawesi Selatan, 1956), No. Reg. 269. “Laporan Keamanan Tahun 1956.”

³⁰ Sairin, “Dunia Maritim Teluk Palu Masa Prakolonial.”

Selain kopra dan minyak kelapa, salah satu komoditi yang juga menjadi unggulan Palu adalah garam. Pengolahan garam di Palu diperkirakan telah ada sejak akhir abad 19, seiring kedatangan pendatang dari Cikoang, pada tahun 1840. Orang-orang Cikoang yang memperkenalkan pengolahan garam kepada penduduk lokal, yang kemudian satu persatu membuka lahan garam di kawasan Talise. Pembukaan lahan pegaraman ini, erat kaitannya dengan aktivitas pelabuhan rakyat di Pantai Besusu. Pelabuhan ini, menjadi pintu gerbang para pendatang dari Sumatera, Bugis, Makassar, Arab. Wilman D. Lumangino mengatakan, pelabuhan rakyat Besusu mulai beraktivitas di akhir abad ke 18 atau akhir tahun 1700 – an. Namun kata dia, masyarakat di Palu belum lama memproduksi garam dalam jumlah besar dan mereka memproduksinya bukan lewat jalur korporat. Selain membuka tambak garam secara massal di wilayah Limbuo (Talise), masyarakat migran asal Cikoang ini juga tercatat membuka lahan tambak garam di sejumlah wilayah lainnya, seperti Silae (Tonggo), Layana, dan Baiya (Tawaeli).³¹ Pemerintah Hindia Belanda mulai melirik produksi garam di Palu sejak akhir abad XIX. A.C. Kruijt saat mengunjungi kawasan Lembah Palu di sekitar periode 1897 menyebut, saat mereka melanjutkan perjalanan di sepanjang teluk, mereka tiba di sisi timur teluk di Limbuo (Talise), di mana terdapat tambak garam yang luas, yang diciptakan oleh pemerintah lanskap Palu. Tambak garam ini kata dia, dikelola oleh penduduk dan pemerintah membeli dari mereka seharga f1 (satu gulden) per pikul atau sekitar 60,479 kg. Kruijt mencatat, gudang garam ini terletak di Talise Bali. Pemerintah memonopoli perdagangan garam tersebut dengan harga jual f6 per pikul, selama beberapa tahun. Perusahaan ini menurut dia, telah memberikan pemerintah keuntungan besar, terutama dalam

³¹ Jefrianto, “Jejak Sejarah Tambak Garam Di Teluk Palu,” *Buletin Syajaratun HMJ SPI IAIN Palu* 8 (June 2021): 9–10.

pembangunan infrastruktur, antara lain jembatan besi yang dibangun di Palu dan di atas Gumbasa dekat Sakidi, di bagian selatan Lembah Palu.³² Ada dua tempat produksi garam di Palu saat itu, yaitu di Limbuo (Talise) dan Tonggo (Silae). Di antara kedua tempat yang memproduksi garam tersebut, Limbuo merupakan yang paling produktif, sedangkan tambak garam yang ada di Tonggo, sejak tahun 1924 sudah mulai terabaikan oleh para pembuat garam, karena keberadaan tambak garam membuat pohon kelapa milik Magau Palu yang terletak di sekitar lokasi tambak, tidak berbuah secara optimal.³³ Aktivitas produksi garam ini sendiri membuat Pemerintah Hindia Belanda membangun sebuah pelabuhan yang berdekatan dengan lokasi produksi garam di wilayah Talise. Pelabuhan Talise ini pada masa jayanya sekitar tahun 1920-an, merupakan pintu gerbang lalu lintas perdagangan di kawasan Teluk Palu. Mohammad Sairin menjelaskan, dulu Pelabuhan Talise ini rutin disinggahi kapal milik KPM.³⁴



Gambar 3. Gudang Garam di wilayah Talise.
Sumber: KITLV

³² Kruyt, *De West-Toradjas Op Midden Celebes*, 22–23.

³³ M.C. Voorn, “Aanvullings Memorie van de Onderafdeeling Paloe,” Desember 1925, 12.

³⁴ Jefrianto, “Jejak Sejarah Tambak Garam Di Teluk Palu,” 9–10.

Terhubungnya Teluk Palu dengan jalur perdagangan maritim dunia, membuat Palu dan tentunya Donggala selalu dikunjungi kapal-kapal KPM, sehingga para pendatang mulai datang berbondong-bondong untuk datang bermukim dan berusaha di daerah ini. Keragaman penduduk makin terasa. Orang Minahasa datang atas keinginan Pemerintah Hindia Belanda untuk menjadi guru di Palu.³⁵ Orang Tiongkok dan Arab datang untuk untuk berdagang. Begitu juga dengan orang Melayu dan Banjar. Namun sebagian orang Banjar membuka usaha menjahit pakaian di sekitar Pasar Bambaru dan Ujuna.³⁶

Kehadiran masyarakat pendatang di Kerajaan Palu pada awal abad XX, juga mempengaruhi pertumbuhan jumlah penduduk. Namun, dalam pencatatan pertumbuhan penduduk di Kerajaan Palu pada awal abad XX, tidak ditemukan data yang valid, hanya berdasarkan perkiraan. Pada tahun 1906, jumlah penduduk Palu diperkirakan mencapai 15.500 jiwa.³⁷ Pada tahun 1907, status Kerajaan Palu berubah menjadi *Landschap* Palu hingga tahun 1942. *Landschap* Palu bersama *Landschap* Kulawi dan *Landschap* Sigi Dolo masuk ke dalam wilayah

³⁵ Guru-guru asal daerah Sulawesi Tengah merupakan keluaran dari sekolah pendidikan Guru untuk mengajar di sekolah-sekolah yang didirikan pemerintah pada waktu itu belum ada. Untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga guru maka pemerintah berusaha mendatangkan tenaga dari luar daerah terutama dari Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Maluku. Hingga tahun 1920-an mereka yang menjadi guru mengajar pada sekolah-sekolah di Sulawesi Tengah adalah tamatan kelas 5 dari sekolah Gubernemen kelas dua atau *vervogschool*. Mereka yang datang mula-mula sekali adalah dari Sulawesi Utara dan Maluku kemudian menyusul dari Sulawesi Selatan. Nurhayati Nainggolan et al., *Sejarah Pendidikan Daerah Sulawesi Tengah*, ed. Sutrisno Kutoyo and S. Sumardi (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1987), 55.

³⁶ “Bulonggo, Perubahan Pola Pewarisan Dalam Keluarga Saudagar dan Bangsawan Kaili di Palu 1920-1992,” 43 Adapun jumlah orang Banjar yang bermukim di wilayah *Landschap* Palu mencapai 159 jiwa. Oleh pemerintah kolonial, mereka bahkan dilokalisir ke dalam sebuah kawasan khusus bernama Bandjar, yang terletak bersebelahan dengan wilayah Ujuna (wilayah Kompleks Pasar Bambaru saat ini). ; Vorstman, “Aanvullende Memorie van Overgave van de Onderafdeling Paloe,” 39.

³⁷ “Bestuursorganisatie In Midden Celebes II,” *Bataviaasch Nieuwsblad* (Batavia, September 24, 1906), 5, <https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011034220>.

Onderafdeeling Palu yang berada di bawah *Afdeeling* Donggala. Pada tahun 1915, jumlah penduduk di *Landschap* Palu diperkirakan mencapai 16.100 jiwa.³⁸ Informasi yang lebih valid tentang pencatatan pertumbuhan penduduk di Palu diketahui sejak 1920-an. Pada tahun 1925, jumlah penduduk *Landschap* Palu mencapai 26.828 jiwa, yang terdiri dari 13.177 laki-laki dan 13.651 perempuan.³⁹ Kemudian, berdasarkan sensus penduduk tahun 1930, jumlah penduduk di *Landschap* Palu meningkat mencapai 33.259 jiwa.⁴⁰ Lalu pada tahun 1935, jumlah penduduk di *Lanskap* Palu mencapai 43.527 jiwa.⁴¹ Pada tahun 1949, jumlah penduduk *Landschap* Palu menurun menjadi 32.000 jiwa.⁴² Pada saat penghapusan swapraja pada tahun 1961, jumlah penduduk Swapraja Palu meningkat menjadi 52.145 jiwa, yang terdiri 26.272 laki-laki dan 25.873 perempuan.⁴³ Dari total penduduk di *Onderafdeeling* Palu, 35.424 merupakan pemeluk Islam, 9.437 pemeluk Protestan, 16 orang pemeluk Katolik dan 23.982 lainnya disebut belum menganut agama. Dengan persentase 51 persen, pemeluk Islam menjadi pemeluk agama mayoritas di wilayah Palu saat itu.⁴⁴

³⁸ van der Lith, Spaan, and Fokkens, *Ensiklopaedie van Nederlandsch-Indië, Deel III*, 274.

³⁹ Voorn, "Aanvullings Memorie van de Onderafdeeling Paloe,."

⁴⁰ Landsdrukkerij, *Volkstelling 1930 Deel V, Inheemsche Bevolking Van Borneo, Celebes, De Kleine Soenda Eilanden En De Mollukken* (Batavia: Departement van Economische Zaken, 1930), 134.

⁴¹ Vorstman, "Aanvullende Memorie van Overgave van de Onderafdeling Paloe."

⁴² "Dasar Pemandangan Jang Mengenai Kota Palu Dan Sekitarnja" (BPAD Sulawesi Selatan, n.d.), Arsip NIT (1946-1950) No. Reg. 77.

⁴³ Masri Singarimbun, ed., *Sensus Penduduk 1961 Penduduk Desa Sulawesi Dan Maluku* (Yogyakarta: Pusat Penelitian dan Studi Kependudukan UGM & BPS, 1980), 195–196.

⁴⁴ *Volkstelling 1930 Deel V, Inheemsche Bevolking Van Borneo, Celebes, De Kleine Soenda Eilanden En De Mollukken*.

Tahun	Jumlah Penduduk
1906	15.500
1915	16.100
1925	26.828
1930	33.259
1935	43.527
1949	32.000
1961	52.145

Tabel 1. Jumlah Penduduk Palu 1906-1961

Terkait data masyarakat pendatang di wilayah Palu pada awal abad XX, sensus penduduk tahun 1930 memberikan gambaran yang detail. Pada tahun 1930, masyarakat Bugis di *Onderafdeeling* Palu mencapai 1.009 jiwa, yang terdiri dari 568 laki-laki dan 441 perempuan.⁴⁵ Kemudian jumlah masyarakat Minahasa mencapai 257 jiwa, terdiri dari 153 laki-laki dan 104 perempuan.⁴⁶ Lalu jumlah masyarakat Jawa mencapai 459 jiwa, terdiri dari 257 laki-laki dan 202 perempuan.⁴⁷ Selanjutnya, jumlah masyarakat Banjar di Palu, mengacu pada memori Kontrolir Palu, J. Vorstman pada tahun 1935, yang berjumlah 159 jiwa. Mereka dilokalisir ke dalam satu wilayah khusus dengan nama Banjar di *District Oost Paloe* (Palu Timur) di bawah *Landschap* Palu.⁴⁸ Adapun data masyarakat pendatang pribumi lainnya di Palu, seperti Makassar, Mandar maupun Melayu tidak tercantum dalam data sensus tersebut. Hal ini, mungkin saja disebabkan oleh

⁴⁵ Ibid., 28.

⁴⁶ Ibid., 31.

⁴⁷ Ibid., 42.

⁴⁸ Vorstman, "Aanvullende Memorie van Overgave van de Onderafdeling Paloe."

peleburan identitas yang dilakukan oleh kelompok pendatang pribumi tersebut, sehingga terdata sebagai masyarakat lokal. Peleburan ini hadir melalui proses pernikahan antara laki-laki pendatang dengan perempuan lokal atau sebaliknya.

Pada tahun 1930, jumlah masyarakat Tionghoa di *Onderafdeeling* Palu mencapai 433 jiwa, terdiri dari 261 laki-laki dan 172 perempuan. Jumlah ini hanya mencapai 0.62 persen dari total penduduk *Onderafdeeling* Palu saat itu, yang mencapai 69.610 jiwa. Dari jumlah ini, 68.897 jiwa merupakan penduduk pribumi, 67 jiwa penduduk Eropa, 433 jiwa penduduk Tionghoa dan 213 jiwa penduduk Timur Asing.⁴⁹ Jika dibagi ke dalam masing-masing lanskap, maka dari total 69.610 jiwa penduduk di wilayah *Onderafdeeling* Palu, 11.114 jiwa bermukim di wilayah Lanskap Kulawi, dengan rincian 11.074 jiwa penduduk pribumi, 1 jiwa penduduk Eropa dan 39 jiwa penduduk Tionghoa. Kemudian, untuk wilayah Lanskap Palu, dihuni oleh total 33.259 jiwa, dengan rincian 32.706 jiwa penduduk pribumi, 33 jiwa penduduk Eropa, 331 jiwa penduduk Tionghoa, serta 189 jiwa penduduk Timur Asing. Lalu untuk wilayah Lanskap Sigi Dolo, dihuni oleh total 25.237 jiwa, dengan rincian 25.117 jiwa penduduk pribumi, 33 jiwa penduduk Eropa, 66 jiwa penduduk Tionghoa, serta 24 jiwa penduduk Timur Asing.⁵⁰

Jika dibandingkan dengan kelompok orang asing lainnya, seperti orang Eropa dan orang Timur Asing (Arab dll) di *Onderafdeeling* Palu, jumlah masyarakat Tionghoa relatif dominan, yakni mencapai 60.7 persen dari total kelompok orang asing di *Onderafdeeling* Palu yang mencapai 713 jiwa. Kemudian, jika dibandingkan dengan wilayah lainnya di *Afdeeling* Donggala,

⁴⁹ *Volkstelling 1930 Deel V, Inheemsche Bevolking Van Borneo, Celebes, De Kleine Soenda Eilanden En De Mollukken*, 122.

⁵⁰ *Ibid.*, 134.

seperti Donggala, Tolitoli dan Buol, jumlah masyarakat Tionghoa di *Onderafdeeling* Palu yang mencapai 433 jiwa, berada di atas Buol yang mencapai 429 jiwa dan di bawah masing-masing dari Donggala yang mencapai 698 jiwa dan Tolitoli 612 jiwa. Dari total masyarakat Tionghoa di *Afdeeling* Donggala yang mencapai 2172 jiwa, hanya sekitar 19.93 persen masyarakat Tionghoa yang bermukim di *Onderafdeeling* Palu.⁵¹ Secara umum di Indonesia, jumlah masyarakat Tionghoa pada tahun 1930 hanya mencapai 2.3 persen dari total penduduk.⁵²

Wilayah Ujuna sendiri yang disebut sebagai wilayah konsentrasi pemukiman masyarakat Tionghoa di Palu. Jumlah penduduknya mencapai 828 jiwa. Mayoritas penduduk adalah Suku Kaili berdialek Ledo.⁵³ 331 orang Tionghoa di *Landschap* Palu, semuanya bermukim di Ujuna. Maka dari total 828 jiwa penduduk Ujuna pada 1930, persentase orang Tionghoa yang tinggal di Ujuna mencapai 39.97 persen. Pemerintah Hindia Belanda sendiri melokalisir pemukiman masyarakat pendatang, berdasarkan kelompok etniknya masing-masing. Wilayah Ujuna misalnya, diperuntukkan sebagai kawasan pemukiman bagi masyarakat Tionghoa, wilayah Bandjar diperuntukkan bagi orang Banjar, wilayah Baroe dan Kamondji yang diperuntukkan bagi orang Arab, wilayah Loloe (Lolu) bagi orang Minahasa dan Eropa, serta wilayah Lere dan Besoesoe (Besusu) dan kawasan pesisir, bagi masyarakat keturunan Bugis, Makassar dan Mandar. Masing-masing kelompok etnik memiliki pemimpin yang disebut sebagai

⁵¹ Ibid., 122.

⁵² Leo Suryadinata, "Negara dan Minoritas Tionghoa di Indonesia," *Wacana* 1, no. 2 (Oktober 1999): 223.

⁵³ Vorstman, "Aanvullende Memorie van Overgave van de Onderafdeling Paloe," 39.

kapitan/kapten.⁵⁴ Wilayah *Landschap* Palu sendiri terbagi atas dua distrik yakni *District Oost Paloe* (Palu Timur) dan *District West Paloe* (Palu Barat). Distrik Palu Timur terdiri atas Lere, Baroe, Kamodji, Bandjar, Oedjoena, Loloe, Besoese, Talise, Tatoera, Tanamodindi I, Lasoani, Kawatoena, Poboja, Watoesampoe, Boeloeri, Tipo, Silae, Kabonena, Kalora, Tanamodindi II. Distrik Palu Barat terdiri atas Donggala-Ketjil, Balaroa I, Doejoe, Bojaoge, Noenoe, Tawandjoeka, Pengawoe, Tinggede, Binangga, Baliase, Balane, Porame, Padende, Sibedi, Beka, Bomba, Lebance, Balaroa II, Pobolobia, Rondingo, Pompanesibadja, Tomodo, Damgaraa, Gimpoebia, Palenteema, Bambakamini, Wawoegaga, Ongoelara, Bambakaino, Malino, Loemboelama, Soi, Domboe, Ongoelero, Wiapore, Mantantimali, Taipangabe, Wajoe, Doda, Daenggoeni, Tondo, Kawole, Kasiromoe.⁵⁵

B. Asal Usul Masyarakat Tionghoa di Palu

Bagian ini akan menjelaskan mengenai asal usul masyarakat Tionghoa di Palu. Hal ini menjadi penting, untuk memetakan daerah asal, jalur migrasi, lokasi transit, serta alasan mereka bermigrasi. Selain itu, bagian ini menjadi penting untuk melihat aspek pengelompokan masyarakat Tionghoa. Koentjaraningrat mengatakan, Tionghoa dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu Tionghoa Totok dan Tionghoa Keturunan. Tionghoa Totok adalah orang Tionghoa yang lahir di Tionghoa dan Indonesia, juga merupakan hasil dari perkawinan sesama

⁵⁴ Kapitein atau Kapitan, berasal dari bahasa Spanyol untuk kapten. Kapitan adalah sebuah gelar yang diberikan kepada kepala kelompok ras. Seorang kapitan diberikan kekuasaan oleh pemerintah kolonial untuk mengatur urusan kelompok ras tersebut, yang berkenaan dengan agama dan adat istiadat. Kapitan juga diharapkan untuk menyelesaikan pertikaian di antara kelompok rasnya, sehubungan dengan hukum adat. Suryadinata, “Negara dan Minoritas Tionghoa di Indonesia,” 227.

⁵⁵ Vorstman, “Aanvullende Memorie van Overgave van de Onderafdeling Paloe.”

Tionghoa. Tionghoa keturunan adalah orang Tionghoa yang lahir di Indonesia dan merupakan hasil perkawinan campur antara orang Tionghoa dengan orang Indonesia.⁵⁶ Mengenai asal usul orang Tionghoa di Indonesia, Denys Lombard mengatakan bahwa sulit menelusuri sejarah kelompok-kelompok Tiongkok yang pertama. Menurutnya, kaum pendatang mengawini perempuan pribumi, dan untuk sebagian mengadopsi adat istiadat negeri setempat. Pada abad ke-15, kebanyakan orang Tiongkok yang menetap di pesisir menganut agama Islam. Setelah penobatan Dinasti Qing (1644) dan pengungsian sejumlah pengikut Dinasti Ming ke arah Laut Cina Selatan, tampaknya masyarakat Tiongkok perantauan mengalami fase pertama penTiongkohan kembali. Memasuki paruh pertama abad XVIII dan awal abad XIX, pencinaaan kembali membuat proses asimilasi masyarakat Tiongkok dengan masyarakat setempat yang berjalan begitu alami selama berabad-abad tersendat. Pada abad ini, identitas kecinaaan di Jawa mulai muncul. Situasi ekonomi dan politik di daratan Tiongkok, meningkatnya arus pelayaran sebagai akibat dari dibukanya terusan Suez di pertengahan abad XIX, dan mulai berkuasanya Belanda atas tanah Hindia membuat masyarakat Tiongkok mengalami fase pencinaaan kembali.⁵⁷ Orang Belanda menganggap orang Tiongkok sebagai sebuah bangsa tersendiri dan hal itu membuat mereka terkucil. Meskipun demikian, setelah terputusnya hubungan pada tahun 1740, masyarakat Tiongkok terporak-poranda serta bingung dan munculah kembali kecenderungan untuk menganut agama Islam. Kaum peranakan membangun masjid mereka sendiri dan terdapat beberapa contoh makam muslim yang nisannya bertulisan

⁵⁶ Koentjaraningrat, *Manusia Dan Kebudayaan Di Indonesia*, 19th ed. (Jakarta: Djambatan, 2002).

⁵⁷ Denys Lombard, *Nusa Jawa: Silang Budaya; Kajian Sejarah Terpadu. Bag. 2: Jaringan Asia* (Jakarta: Gramedia, 1996), 244.

Tiongkok.⁵⁸

Generasi pertama para pendatang Tiongkok ini, yang disebut *sinkeh*, masih memegang erat tradisi dan kebudayaannya. Mereka yang paling kaya membangun tempat tinggal bergaya Tiongkok, mendatangkan guru Tiongkok untuk mendidik anak-anaknya dan berusaha dalam batas tertentu mengirimkan jenazah ke negerinya. Namun semangat itu cepat menghilang, terutama bila keluarganya miskin. Hal itu terjadi karena membangun tempat tinggal bergaya Tiongkok, mendatangkan guru Tiongkok untuk mendidik anak, serta upaya mengirimkan jenazah kembali ke Tiongkok, membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Peranakan yang lahir di Jawa hanya berbicara bahasa ibunya dan hanya sesekali berusaha mempertahankan kesetiaan budaya, misalnya dalam kesempatan peringatan besar, tanpa memahami arti pentingnya.⁵⁹

Keadaan itu kemudian mengalami perubahan drastis sejak paruh kedua abad XIX. Kecenderungan asimilasi yang sejak dini merupakan gejala umum selama satu abad, merupakan akibat dari tiga perkembangan penting. Pertanian yang mandek di Tiongkok pada akhir masa kekuasaan dinasti Qing, tidak lagi memberi hasil yang cukup untuk makan penduduk. Hal ini disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk yang sangat tinggi. Sementara di Hindia Belanda, pembukaan wilayah budidaya baru dan pembukaan tambang-tambang baru, memerlukan tenaga kerja yang berlipat ganda. Itulah gejala emigrasi kuli yang sangat terkenal, terkadang spontan, terkadang dikendalikan oleh bangsa Barat yang menggiring para pekerja ke perkebunan mereka.⁶⁰

⁵⁸ Ibid., 244–245.

⁵⁹ Ibid., 245.

⁶⁰ Ibid.

Posisi masyarakat Tionghoa meningkat dari buruh kasar dan pedagang kecil menjadi pekerja terdidik ketika pemerintah kolonial Belanda memanfaatkan mereka sebagai pemungut pajak. Di masa-masa berikutnya, ketika mereka kehilangan status sebagai pemungut pajak, posisi mereka dalam kegiatan bisnis telah mengakar. Pedagang Eropa sangat iri terhadap status masyarakat Tionghoa sebagai kelas pedagang, namun mereka tidak dapat melakukan hubungan bisnis tanpa bekerja sama dengan masyarakat Tiongkok, khususnya dalam melaksanakan transaksi dengan penduduk asli. Gagasan untuk menyingkirkan mereka dari aktivitas bisnis di tanah jajahan merupakan sesuatu yang kuno, terutama dalam sejarah Jawa.⁶¹

Komunitas Tionghoa perantauan di Indonesia pada akhir abad ke-19 masih belum bersatu. Provinsialisme, perbedaan bahasa dan budaya di kalangan mereka masih sangat besar. Hal itu diperburuk dengan tersebarnya mereka di berbagai wilayah Indonesia. Kecenderungan itu tampaknya memiliki persamaan dengan situasi di negeri Tiongkok sendiri. Sun Yat-sen, bapak pendiri Republik Tiongkok, menggambarkan negeri dan bangsa Tiongkok yang didasarkan pada sistem keterikatan keluarga, desa dan lokasi pemukiman mereka pada saat itu tak bedanya dengan ‘segenggam pasir’ yang kalau dilepas akan tercerai berai.⁶²

Setelah akhir abad ke-19, ketika makin banyak imigran Tionghoa yang datang ke Indonesia, terdapat perbedaan antara Tionghoa peranakan dengan Tionghoa totok. Sebelum akhir abad ke-19, masyarakat Tiongkok yang datang ke Indonesia didominasi oleh kaum pria, karena mereka meninggalkan keluarga atau istri mereka di Tiongkok. Mereka mengawini wanita setempat dan menyebabkan

⁶¹ Abdullah Dahana, “Kegiatan Awal Masyarakat Tionghoa Di Indonesia,” *Wacana: Jurnal Ilmu Pengetahuan Budaya* 2, no. 1 (2000): 56.

⁶² *Ibid.*, 57.

adanya percampuran antara kebudayaan Tiongkok dan kebudayaan lokal. Mereka berbicara bahasa Melayu dan telah lupa akan bahasa mereka sendiri. Meskipun mereka menganut dan berhubungan dengan budaya dan masyarakat lokal, kendala budaya ekonomi, lingkungan hidup dan religi, menyebabkan mereka tetap terpisah dari komunitas lokal.⁶³

Hal ini tidak berlangsung lama. Kemudian terjadi gelombang emigrasi besar-besaran wanita Tiongkok ke Indonesia. Lombard menyebut, wanita Tiongkok yang melakukan emigrasi, karena didorong oleh kesulitan materi di negeri asalnya dan dimungkinkan oleh adanya peningkatan mutu pelayanan angkutan laut. Kedatangan para wanita dalam jumlah besar itu, sangat mempengaruhi perkembangan kaum perantauan dengan mencinakan kembali rumah tangga dan dengan memperlamban osmosis yang hingga saat itu telah dipermudah oleh perkawinan campuran. Kelompok wanita itu sesungguhnya amat mendukung kiat laki-laki Tiongkok untuk mempertahankan budaya Tiongkok.⁶⁴

Orang Tionghoa di Palu, telah ada sejak pertengahan abad XIX. Mereka masuk melalui Wani, tetapi yang paling umum berasal dari Donggala.⁶⁵ Sebagian besar dari mereka juga berasal dari Surabaya, Banjar, Makassar, dan Manado.⁶⁶ Pada akhir abad tersebut, orang Tionghoa di Palu mulai mendapat tempat sebagai

⁶³ Ibid.

⁶⁴ Lombard, *Nusa Jawa*, 246.

⁶⁵ "Bulonggo, Perubahan Pola Pewarisan Dalam Keluarga Saudagar dan Bangsawan Kaili di Palu 1920-1992," 132.

⁶⁶ Daerah asal para imigran Tionghoa ini, kemudian melekat menjadi penyebutan atau pengelompokan masyarakat Tionghoa di Kota Palu, seperti Cina Surabaya, Cina Donggala, Cina Banjar, Cina Makassar dan Cina Manado. Tanod, *Daerah Asal Imigran Tionghoa*.

pedagang.⁶⁷ Pada awal abad XX, Palu sebagai sebuah kerajaan, dihuni oleh berbagai suku bangsa. Ada orang Bugis, Mandar, Manado, Minahasa, Melayu, Minang, Banjar, Arab dan Tionghoa.

Alasan kedatangan mereka pun beragam. Ada yang datang akibat dampak situasi politik di Tiongkok, seperti yang dialami oleh Liem Hok Tjin, yang mendirikan sekolah Tionghoa bernama *Chung Hwa Xue Xiao* di Palu pada tahun 1921.⁶⁸ Dirinya adalah imigran Tiongkok Katolik asal pulau Pingtan. Pulau ini masuk ke dalam wilayah Provinsi Fujian, China. Pulau Pingtan sendiri merupakan bagian dari Vikariat Apostolik Fujian, yang kemudian menjadi Keuskupan Agung Fuzhou.⁶⁹

Liem Hok Tjin lahir di Pulau Pingtan pada tahun 1888. Ia menempuh pendidikan pada sekolah gereja Katolik di Fujian. Setelah menamatkan pendidikannya, ia memilih pulang kampung dan menjadi guru. Dekrit dikeluarkan Dinasti Qing pada 1 Juli 1900, yang menyatakan bahwa era hubungan baik dengan para misionaris Eropa dan umat Kristen telah berakhir. Para misionaris harus dipulangkan saat itu juga. Umat Katolik dipaksa untuk memilih satu di antara dua pilihan, yaitu ingkar atau dibunuh. Hal ini membuat sebagian besar umat Katolik yang berada di wilayah kota-kota pelabuhan di Tenggara Tiongkok, memutuskan untuk melarikan diri ke luar negeri. Liem Hok Tjin adalah salah seorang di antaranya yang memilih pergi dari tanah kelahirannya. Pelarian Liem Hok Tjin terjadi pada tahun 1908. Mereka menuju ke Kepulauan Nusantara

⁶⁷ “Bulonggo, Perubahan Pola Pewarisan Dalam Keluarga Saudagar dan Bangsawan Kaili di Palu 1920-1992,” 132.

⁶⁸ Liem Boen Hou, Sekolah Tionghoa di Palu, interview by Jefrianto, Desember 2022.

⁶⁹ “Archdiocese of Fuzhou 福州, China,” *GCatholic*, accessed January 25, 2023, <http://www.gcatholic.org/dioceses/diocese/fooc0.htm>.

dengan menumpang kapal layar. Mereka berlabuh di Borneo (Kalimantan), tepatnya di Balikpapan. Pada 1909, ia tiba di Palu melalui Pelabuhan Donggala. Saat itu, Liem Hok Tjin berusia 21 tahun.⁷⁰

Alasan lain selain situasi politik adalah untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Hal ini, sepertinya dipengaruhi oleh kondisi pertanian yang mandek di Tiongkok pada akhir masa kekuasaan Dinasti Qing, pada paruh kedua akhir abad XIX, yang tidak lagi memberi hasil yang cukup untuk makan penduduk yang terus meningkat jumlahnya. Sementara di Hindia Belanda, pembukaan wilayah budidaya baru dan pembukaan tambang-tambang baru, memerlukan tenaga kerja yang berlipat ganda.⁷¹ Selain itu, pada akhir abad XIX, Tiongkok mengalami ledakan penduduk. Proses ini dimulai sejak pertengahan abad XIX dan membawa pengaruh pada peningkatan angka kemiskinan, kerusakan dan keresahan sosial. Hal itu kemudian menyebabkan terjadinya proses pelemahan sistem Kekaisaran Tiongkok. Keadaan tersebut diperburuk lagi oleh terjadinya bencana alam seperti banjir, kekeringan, wabah dan sebagainya yang selalu menghantui rakyat Tiongkok sepanjang sejarah negeri itu.⁷²

Migrasi besar-besaran dari Tiongkok setelah tahun 1850 lebih dipacu oleh kemunduran fondasi ekonomi Tiongkok sendiri. Sejak awal abad ke-19, Kekaisaran Qing berada dalam proses kehancuran yang disebabkan oleh campur tangan imperialisme Barat. Kondisi dalam negeri Dinasti Qing yang tidak menguntungkan itu menyebabkan banyak orang Tionghoa meninggalkan kampung halaman mereka. Tidak sedikit di antara mereka yang mencoba

⁷⁰ Hou, Sekolah Cina di Palu.

⁷¹ Lombard, *Nusa Jawa*, 245.

⁷² Dahana, "Kegiatan Awal Masyarakat Tionghoa Di Indonesia," 55.

mengadu untung ke luar negeri, yakni ke berbagai negara yang mengalami kekurangan penduduk di Asia Tenggara, serta memiliki kondisi dan prospek ekonomi, serta kekayaan alam yang lebih baik.⁷³ Berdasarkan kriteria tersebut, maka Hindia Belanda atau Indonesia kini, menjadi tujuan orang-orang Tionghoa pada masa itu. Orang-orang Tionghoa yang datang ke Indonesia sebagian besar berasal dari provinsi-provinsi selatan, seperti Guangdong, Fujian dan Guangxi. Oleh karena itu, kelompok terbesar masyarakat Tiongkok perantauan di Asia Tenggara adalah suku-suku Hokkian, Teochiu, Kanton, Hakka dan Hainan. Mereka ini memiliki kecenderungan untuk mempertahankan kepercayaan (religi) dan kebudayaan, serta melaksanakannya. Konfusianisme, Budhisme dan Taoisme tetap menjadi acuan hidup mereka, meskipun ada di kalangan mereka yang memeluk agama Islam.⁷⁴

Jejak kedatangan masyarakat Tionghoa di Palu belum diketahui secara pasti. Hingga saat ini belum ada literatur yang membahas khusus tentang sejarah Tionghoa di Palu. Berdasarkan hasil penelusuran penulis, kedatangan Liem Hok Tjin pada tahun 1909, untuk sementara masih menjadi catatan tertua kedatangan orang Tionghoa di Palu. Sebagian besar orang-orang Tionghoa yang datang ke Palu, tidak langsung berasal dari Tiongkok, melainkan singgah di sejumlah wilayah lain, seperti Banjarmasin, Surabaya, Makassar dan Manado. Hanya sebagian kecil pendatang Tionghoa yang menempuh rute langsung dari Tiongkok daratan ke wilayah Palu. Salah seorang di antaranya adalah Tjioe Thian Siong, yang datang ke Palu pada akhir 1920-an dari kampung halamannya di Fujian, Tiongkok Selatan. Dirinya dijemput oleh pamannya, pemilik usaha Ho Ling

⁷³ Ibid., 56.

⁷⁴ Ibid.

Guan, yang telah lebih dulu menetap di Palu.⁷⁵ Pamannya datang ke Palu pada tahun 1909, menumpang kapal yang sama dengan Liem Hok Tjin.⁷⁶



Gambar 4. Tjioe Thian Siong
Sumber: Dok. Pribadi Ricky Chowindra

Umumnya, para pendatang Tionghoa masuk ke Palu melalui akses Pelabuhan Donggala. Donggala sendiri sejak abad ke-13 telah menjadi bagian dari jalur pelayaran di Selat Makassar, yang menjadi jalur pelayaran dan perdagangan Tiongkok pada masa dinasti Ming. Hal ini terlihat dari munculnya berita mengenai kehadiran jung-jung Tiongkok di perairan Selat Makassar, termasuk di wilayah Donggala. Kemudian pada pertengahan abad ke-17, Donggala menjadi salah satu pelabuhan penting bagi jalur pengangkutan barang dari Manado ke Batavia. Oleh karena itu *VOC* hendak mengurusnya secara langsung, agar segala macam komoditas penting seperti kayu cendana, damar dan beberapa komoditas lainnya tidak dipasarkan ke Makassar melainkan dijemput langsung di Donggala.⁷⁷

⁷⁵ Ricky Chowindra, *Orang Tionghoa di Kota Palu*, interview by Jefrianto, January 30, 2023.

⁷⁶ Hou, *Sekolah Tionghoa di Palu*.

⁷⁷ Lukman Nadjamuddin et al., *Satu Kota Empat Zaman: Donggala Pada Masa Tradisional Hingga Terbentuknya Kabupaten* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2016), 15–17.

Pada tahun 1885, jumlah kapal yang mengunjungi pelabuhan Banawa (Donggala) mencapai tujuh buah, dengan tonase 1232 ton, yakni 4 kapal berukuran di bawah 150 m³ dan dua kapal berukuran 150 – 300 m³, serta satu kapal berukuran 300 – 400 m³. Kapal-kapal ini mengangkut komoditi ekspor unggulan Donggala saat itu, yakni Kopra. Secara administratif, pelabuhan dipimpin dan dikelola oleh seorang syahbandar yang diangkat oleh raja. Syahbandar bertanggung jawab langsung kepada raja dan menyerahkan hasil yang diperoleh dari pelabuhan, seperti cukai ekspor – impor dan keuntungan perdagangan kepada raja.⁷⁸

Sejak 1888, perusahaan pelayaran Belanda, *Koninklijke Paketvaart Maatschaappij* (KPM) mencantumkan Pelabuhan Donggala sebagai salah satu dari 14 jalur pelayarannya. Donggala menjadi salah satu jalur yang menghubungkan pelabuhan Surabaya dengan pelabuhan Makassar dan Manado. KPM menjadikan Donggala sebagai tempat persinggahan untuk mengangkut produk domestik, terutama kopra.⁷⁹

Keberadaan Pelabuhan Donggala sebagai salah satu jalur pelayaran di Selat Makassar menjadi pintu masuk bagi pendatang, salah satunya masyarakat Tionghoa. Pada tahun 1905, dilaporkan bahwa setiap bulan Pelabuhan Donggala dikunjungi oleh empat kapal uap *Royal Packet Company* dan beberapa dari Singapura, sedangkan jumlah pedagang Tiongkok dan Arab meningkat setiap tahun.⁸⁰ Jamrin Abubakar menyebut, kedatangan orang Tionghoa di Donggala dilakukan secara bergelombang, umumnya sejak awal abad ke-19. Mereka datang

⁷⁸ Ibid., 27–28.

⁷⁹ Ibid., 65.

⁸⁰ “Het Landschap Donggala of Banawa,” *Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde* 58, Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde (1905): 518.

dengan tujuan berdagang kemudian menetap. Jamrin menyatakan bahwa mereka datang langsung dari daratan Tiongkok dan sebagian pindahan dari Kota Makassar, Surabaya, serta dari Pulau Kalimantan. Mereka memiliki latar belakang asal berbeda-beda, di antaranya Hokkien, Tiochiu, Kanton, Hakka dan lainnya.⁸¹ Lanjut Jamrin, dalam perkembangannya, orang Tionghoa di Donggala membaaur dengan berbagai suku melalui perdagangan. Mereka memiliki relasi sosial, budaya dan ekonomi hingga turun temurun, sehingga lekat dengan sebutan Cina Donggala, sebagai bentuk penerimaan masyarakat. Masyarakat Tionghoa di Donggala sejak periode kolonial memiliki posisi strategis di bidang perekonomian, ditandai dengan jabatan penting seperti Kapten Cina. Ada juga yang diberi wewenang usaha konsesi perkebunan kelapa dan perdagangan hasil bumi.⁸²

Dengan demikian, ada tiga klasifikasi cara masuk dan bereksistensi masyarakat Tionghoa di Donggala menurut Idrus Rore, yakni mereka yang datang langsung dari Tiongkok (Cina Totok), etnis Tionghoa yang berasal dari sekitar Kota Donggala (Kabupaten Donggala) dan Teluk Palu pada umumnya, serta etnis Tionghoa yang lahir dan dewasa di Kota Donggala.⁸³

Jumlah Cina Totok di Donggala saat ini sudah terbatas. Salah seorang di antaranya adalah Asmin (90) yang bermigrasi ke Kota Donggala pada usia muda. Dirinya berasal dari Guangzhou dan sekarang berdomisili di Surabaya. Sementara itu, etnis Tionghoa yang berasal dari daerah sekitar Kota Donggala dan Teluk Palu, kebanyakan berasal dari wilayah Pantai Barat Kabupaten Donggala, seperti

⁸¹ Jamrin Abubakar, *Donggala Kota Pusaka* (Yogyakarta: Ladang Publishing, 2021), 86.

⁸² *Ibid.*, 86–87.

⁸³ Idrus A. Rore, *Ko Dan Ci Menggelar Barzanji Di Kota Donggala* (Yogyakarta: Elpueblo Tritama Mandiri, 2022), 66.

Marana, Alindau, Tanjung Padang dan Tompe. Golongan ini memang awalnya juga berasal dari Tiongkok, akan tetapi tidak langsung ke Kota Donggala, melainkan bermukim di daerah Pantai Barat. Pantai Barat dijadikan sebagai daerah transit saja. Ketika anak-anak mereka sudah beranjak remaja dan ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah, maka golongan ini masuk ke Kota Donggala, karena di kota tersebut telah berdiri sudah ada sekolah Tiongkok, setingkat SMA.⁸⁴



Gambar 5. Chung Hwa School di Donggala pada tahun 1950-an
Sumber: Koleksi Jamrin Abubakar

Sekolah Tionghoa di Donggala diberi nama Chung Hwa School.⁸⁵ Sekolah ini didirikan pada tahun 1924 oleh penduduk Tionghoa di Donggala, Sekolah ini didirikan di wilayah Boya, saat ini menjadi Kelurahan Boya, Kota Donggala. Sekolah ini memiliki dua orang guru dan pengajaran dilakukan dalam bahasa Mandarin dan Inggris. Pendanaan sekolah ini didukung oleh para pedagang kaya

⁸⁴ Ibid., 66–67.

⁸⁵ Abubakar, *Donggala Kota Pusaka*, 87.

di Donggala.⁸⁶ Pada awalnya, sekolah ini dibuka dengan pendidikan tingkat dasar enam tahun. Setelah kemerdekaan, dibuka lanjutan SLTP pada bangunan dua tingkat di bagian belakang.⁸⁷

Kehadiran sekolah ini, nampaknya juga dipengaruhi oleh jumlah orang Tionghoa di Donggala. Sensus tahun 1930 menyebutkan jumlah orang Tionghoa di Kota Donggala mencapai 338 orang, terdiri dari 207 laki-laki dan 131 perempuan.⁸⁸ Jumlah ini sendiri mencakup 62 persen dari jumlah warga Tionghoa di lanskap Banawa yang mencapai 547 orang,⁸⁹ mencakup 48 persen dari total jumlah warga Tionghoa di *Onderafdeeling* Donggala yang mencapai 698 orang⁹⁰ dan mencakup 15 persen dari total jumlah warga Tionghoa di *Afdeeling* Donggala yang mencapai 2.172 orang.⁹¹

Setelah menamatkan pendidikan di Sekolah Tionghoa, mayoritas di antara pelajar Tionghoa dan orang tuanya tidak kembali ke pantai barat, melainkan memilih menetap menjadi penduduk Kota Donggala, dengan menggeluti aktivitas perdagangan. Dinamika Kota Donggala sebagai kota dagang dan jasa, tampaknya

⁸⁶ F.B. Dutrieux, "Gewijzigde En Aanvullende Memorie van Overgave over de Onderafdeeling Donggala," September 1931, 16.

⁸⁷ Abubakar, *Donggala Kota Pusaka*, 88.

⁸⁸ *Volkstelling 1930 Deel V, Inheemsche Bevolking Van Borneo, Celebes, De Kleine Soenda Eilanden En De Mollukken*.

⁸⁹ *Ibid.*, 134; Wilayah Lanskap Banawa terdiri dari tiga distrik, yakni Noord Banawa, Midden Banawa dan Zuid Banawa F.Ch.H. Hirschmann, "Vervolg-Memorie (Op M. Junius) Inzake de Afdeeling Donggala," 1934, 24.

⁹⁰ *Volkstelling 1930 Deel V, Inheemsche Bevolking Van Borneo, Celebes, De Kleine Soenda Eilanden En De Mollukken*, 134; Wilayah *Onderafdeeling* Donggala terdiri dari dua lanskap, yakni Lanskap Donggala dan Lanskap Tawaeli. Hirschmann, "Vervolg-Memorie (Op M. Junius) Inzake de Afdeeling Donggala," 24.

⁹¹ Wilayah *Afdeeling* Donggala terdiri dari empat *Onderafdeeling* Paloe, *Onderafdeeling* Donggala, *Onderafdeeling* Tolitoli dan *Onderafdeeling* Boeol *Volkstelling 1930 Deel V, Inheemsche Bevolking Van Borneo, Celebes, De Kleine Soenda Eilanden En De Mollukken*, 134.

memberikan spirit psikologis bagi masyarakat Tionghoa untuk menetap, demi menetap masa depan bagi anak keturunannya.⁹²

Kemudian, masyarakat Tionghoa yang lahir dan dibesarkan di Kota Donggala, adalah anak-anak dari orang Tionghoa totok dan orang Tionghoa yang berasal dari sekitar Kota Donggala, yang sudah menetap dan beranak pinak di Kota Donggala. Masyarakat Tionghoa Donggala menggunakan bahasa lokal, yakni bahasa Bugis, juga bahasa lainnya seperti Jawa dan Kaili. Kemampuan berbahasa tersebut merupakan pintu masuk bagi orang Tionghoa untuk berkomunikasi dengan masyarakat lainnya dalam pergaulan sehari-hari.⁹³

Keberadaan orang Tionghoa di Donggala terlegitimasi lewat kehadiran pemimpin masyarakat Tionghoa setempat yang diberi gelar Letnan Cina. Dalam penelusuran arsip yang dilakukan penulis, terungkap bahwa keberadaan Letnan Cina di Donggala, dimulai sejak pengangkatan Soh Tong sebagai Letnan Cina di Donggala pada 15 Oktober 1925.⁹⁴ Pada 28 Januari 1926, Soh Tong digantikan oleh Nio Koen Tjeng.⁹⁵ Dirinya mengemban jabatan tersebut hingga 1928. Pada 26 Juni 1928, Nio Koen Tjeng digantikan oleh Nio Seng Tjeng yang memimpin hingga 1930.⁹⁶ Selanjutnya pada 30 Januari 1930, Nio Seng Tjeng digantikan oleh

⁹² Rore, *Ko Dan Ci Menggelar Barzanji Di Kota Donggala*, 67.

⁹³ *Ibid.*, 67–71.

⁹⁴ *Regeerings Almanak Voor Nederlandsch Indie Tweede Gedeelte Kalender En Personalialia* (Weltevreden: Lands-Drukkerij, 1926), 273.

⁹⁵ *Regeerings Almanak Voor Nederlandsch Indie Tweede Gedeelte Kalender En Personalialia* (Weltevreden: Lands-Drukkerij, 1928), 361.

⁹⁶ *Regeerings Almanak Voor Nederlandsch Indie Tweede Gedeelte Kalender En Personalialia* (Weltevreden: Lands-Drukkerij, 1929), 362; *Regeerings Almanak Voor Nederlandsch Indie Tweede Gedeelte Kalender En Personalialia* (Weltevreden: Lands-Drukkerij, 1930), 387.

Tjoa Tjong Hean.⁹⁷ Tjoa Tjong Hean merupakan Letnan Cina yang paling lama memimpin di Donggala, yakni selama 12 tahun hingga 1942.⁹⁸

Kehadiran Donggala sebagai pintu masuk bagi kedatangan masyarakat Tionghoa di Palu, membuat klasifikasi cara masuk dan bereksistensi masyarakat Tionghoa di Palu, relatif sedikit berbeda dengan cara masuk dan bereksistensi masyarakat Tionghoa di Donggala menurut Idrus Rore. Jika Idrus Rore membagi cara masuk dan bereksistensi masyarakat Tionghoa di Donggala ke dalam tiga kategori klasifikasi, yakni etnis Tionghoa yang berasal langsung dari Tiongkok, yang biasa disebut sebagai Cina Totok, etnis Tionghoa yang berasal dari sekitar Kota Donggala (Kabupaten Donggala) dan lembah Palu pada umumnya, serta etnis Tionghoa yang lahir, dibesarkan dan tumbuh berkembang di Kota Donggala⁹⁹, maka di Palu, kategori klasifikasi pertama cara masuk dan bereksistensi masyarakat Tionghoa di Donggala seperti yang disebutkan Idrus Rore, yakni etnis Tionghoa yang berasal langsung dari Tiongkok, yang biasa disebut sebagai Cina Totok, tidak sepenuhnya berlaku. Cina Totok yang ada di Palu, sebagian besar singgah dahulu di daerah lain di luar Palu, sebelum kemudian memutuskan untuk datang ke Palu. Liem Hok Tjin adalah salah satunya.

Selain Liem Hok Tjin, juga ada Oe Khian yang diperkirakan datang di Palu pada periode 1920-an.¹⁰⁰ Oe Khian yang dikenal dengan sebutan Toke Kiala, datang dari Tiongkok daratan.¹⁰¹ Diperkirakan, Oe Kian berasal dari wilayah

⁹⁷ *Regeerings Almanak Voor Nederlandsch Indie Tweede Gedeelte Kalender En Personalia* (Weltevreden: Lands-Drukkerij, 1931), 400.

⁹⁸ *Regeerings Almanak Voor Nederlandsch Indie Tweede Gedeelte Kalender En Personalia* (Weltevreden: Lands-Drukkerij, 1942), 365.

⁹⁹ Rore, *Ko Dan Ci Menggelar Barzanji Di Kota Donggala*, 66.

¹⁰⁰ Paulus Putung, "Sejarah Keluarga Putung," interview by Jefrianto, February 7, 2022.

¹⁰¹ *Ibid.*

Fujian di selatan Tiongkok. Perkiraan ini berdasar pada temuan bahwa marga Oe merupakan bentuk penulisan lain dari marga Yu. Adapun bentuk penulisan lain marga Yu, yakni Ee (Hokkian dan Teochiu), Eu (Hokkian), Ie (Hokkian dan Teochiu), Oe (Hokkian dan Teochiu), Yee (Kanton), serta Yi (Hakka).¹⁰²



Gambar 6. Oe Khian (Toke Kiala)

Sumber: Dok. Keluarga Putung

Oe Khian masuk ke Palu setelah sebelumnya bermukim di Manado. Oe Khian lalu menikah dengan Albertina Putung yang berasal dari Tangkune, Minahasa. Saat menetap di Palu, Toke Kiala membuka bengkel dan diklaim saat itu merupakan bengkel mobil pertama yang dimiliki oleh orang Tionghoa di Palu. Lokasi bengkel itu, saat ini berada di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu. Selain bengkel, Toke Kiala juga menekuni usaha ekspedisi darat jurusan Palu - Tinombo - Parigi pada kurun 1930-an hingga 1940-an.¹⁰³

¹⁰² “Marga Oe » Budaya, Sejarah, Tradisi & Adat Istiadat Tionghoa,” *Tionghoa*, accessed January 27, 2023, <https://www.tionghoa.com/tag/marga-oe/>.

¹⁰³ Putung, “Sejarah Keluarga Putung.”

Selain kedatangan Cina Totok, wilayah Palu juga menjadi tujuan kedatangan orang Cina peranakan. Jalur kedatangan orang Cina peranakan ini beragam, mulai dari Manado, Makassar, Banjarmasin, hingga Surabaya. Salah satunya adalah Lie Eng Tjhiang, yang berasal dari Banjarmasin. Lie Eng Tjhiang lahir pada 10 Desember 1892 di Banjarmasin. Ayahnya bernama bernama Lie Kiam Tjae dan ibunya bernama Liem Koei Nio.¹⁰⁴ Marga Lie merupakan bentuk ejaan lain untuk penyebutan marga Li. Marga Li sendiri diucapkan ‘Lei’ dalam bahasa Kanton, dan sering dieja ‘Lee’ di Hong Kong, Taiwan, dan oleh banyak masyarakat Tionghoa perantauan. Di Macau, marga Li dieja sebagai ‘Lei’ karena pengaruh Portugis. Di Indonesia, marga Li dieja ‘Lie’ karena pengaruh Belanda. Penyebutan Lie untuk marga Li juga berasal dari bahasa Hokkian.¹⁰⁵



Gambar 7. Engelbert Lie Eng Tjhiang

Sumber: Dok. Keluarga Putong

Jejak sejarah migrasi komunitas Tionghoa di Banjarmasin ditandai dengan keberadaan komunitas Cina Parit yang bermukim di kawasan sungai Parit,

¹⁰⁴ “Dokumen Sacramen Kawin Engelbert Lie Eng Tjhiang,” July 19, 1927.

¹⁰⁵ Alkev Edrio says, “Sekilas Mengenai Marga Li 李 (Lee, Lei),” *TIONGHOA.INFO*, last modified July 31, 2019, accessed January 27, 2023, <https://www.tionghoa.info/sekilas-mengenai-marga-li-李/>.

Pelaihari, Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Sebutan Cina Parit juga ditujukan kepada pekerja imigran penambang timah yang datang dari pulau Bangka dan Belitung. Maka istilah Cina Parit dipakai secara resmi sebagai identitas komunitas Tionghoa di Kalimantan Selatan. Namun sejak semula kedatangan mereka, orang Tionghoa disebut dengan istilah ‘Urang Cina’ dalam bahasa Banjar. Dalam catatan sejarah disebutkan bahwa komunitas Cina Parit yang ditempatkan di Distrik Maluka didatangkan oleh Alexander Hare, Komisioner Residen Inggris untuk Kalimantan pada 1812.¹⁰⁶



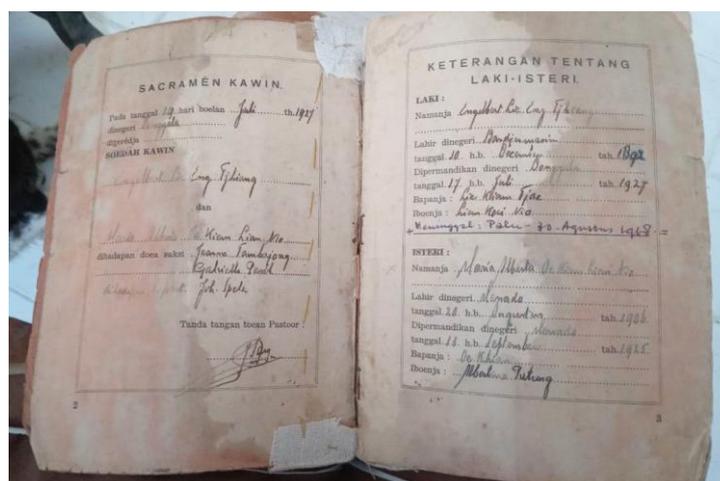
Gambar 8. Maria Alberta Putung (Oe Kim Lian Nio)
Sumber: Dok Keluarga Putong

Lie Eng Tjhiang masuk ke Palu dari Banjarmasin melalui Donggala. Dirinya menikah dengan Maria Alberta Putung (Oe Kim Lian Nio), anak dari Oe Khian (Toke Kiala). Pernikahan ini dilaksanakan di Donggala pada 19 Juli 1927. Sebelum menikah, Lie Eng Tjhiang dibaptis dan memeluk agama Katolik pada 17 Juli 1927. Setelah dibaptis, ia pun menambahkan nama Engelbert di depan namanya.¹⁰⁷

¹⁰⁶ akurasi 2019, “Jejak Migrasi Etnis Tionghoa di Kalimantan -,” last modified May 8, 2019, accessed January 27, 2023, <https://www.akurasi.id/ragam/catatan/jejak-migrasi-etnis-tionghoa-di-kalimantan/>.

¹⁰⁷ “Dokumen Sacramen Kawin Engelbert Lie Eng Tjhiang.”

Lie Eng Tjhiang yang menekuni usaha sebagai tukang reparasi jam, diperkirakan datang ke Palu pada periode 1930-an. Dirinya membuka usaha tersebut di kawasan Pasar Tua. Dari pernikahannya dengan Maria Alberta Putung, Lie Eng Tjhiang dikaruniai 12 orang anak. 12 anak dari Engelbert Lie Eng Tjhiang dan Maria Albertha Putung, yakni Max Putung (Lie Soen Goan) lahir 1928, Anthonina (Lie Soen Eng), lahir 1929), Maria Fransisca (Lie Giok Kiem) lahir 1930, Yosefien (Lie Fien Nio) lahir 1931, Albert (Lie Soen Seng) lahir 1934, Maria (Lie Eng Hoa) lahir 1936, Victorina (Lie Djok Nio) lahir 1938, Maria Magdalena (Lie Sui Hoa) lahir 1940, Paulus (Lie Soen Bie) lahir 1942, Agnes (Lie Mei Hoa) lahir 1943, Petrus (Lie Soen Cae) lahir 1947 dan Paulus (Lie Soen Hong) lahir 1951.¹⁰⁸



Gambar 9. Dokumen Sakramen Kawin Lie Eng Tjhiang tahun 1927
Sumber: Dok. Keluarga Putung

C. Menjadi Kaili: Perubahan Identitas Masyarakat Tionghoa di Palu

Kebijakan pemerintah Hindia Belanda untuk melokalisir kawasan pemukiman berdasarkan kelompok etnis, termasuk etnis Tionghoa ini, lahir dari proses perubahan lanskap sosial di nusantara pada awal abad 17. Sebelum orang

¹⁰⁸ Putung, "Sejarah Keluarga Putung."

Eropa, terkhusus orang Belanda, punya ide dan nyali untuk berlayar ke Nusantara, kepulauan ini telah riuh oleh interaksi berbagai etnis dan bangsa melalui perdagangan. Orang-orang Tiongkok, Arab, atau India telah menjalin hubungan dagang yang erat dengan masyarakat setempat. Sebagian dari orang-orang asing ini lantas bermukim di kota-kota pelabuhan besar di sepanjang rute pelayaran Nusantara.¹⁰⁹

Berdirinya kampung-kampung komunitas di kota pelabuhan adalah hal yang sangat biasa di era kurun niaga (abad ke-15 hingga 16). Semua terjadi secara alamiah tanpa ada aturan khusus yang dibuat oleh penguasa setempat. Ada juga orang-orang dari etnis atau bangsa tertentu yang tinggal di luar kampung mereka. Lanskap sosial yang cair ini pelan-pelan berubah ketika VOC mulai membangun Kota Batavia pada 1620-an. Aturan jadi makin rigid ketika tembok keliling kota selesai dibangun pada 1650. Orang Eropa diwajibkan tinggal di dalam tembok kota, sementara pribumi diharuskan tinggal di wilayah luar yang disebut Ommelanden.¹¹⁰

Aturan ini tidak berimbas langsung kepada komunitas Tionghoa yang diperbolehkan tinggal di dalam ataupun luar tembok dengan izin tertentu. Meski begitu sebagian besar orang Tionghoa yang mengusahakan pertanian dan perkebunan memilih tinggal di Ommelanden. Hingga kemudian terjadilah pembantaian etnis Tionghoa di Batavia pada Oktober 1740 yang berpangkal dari persaingan ekonomi antara Kompeni dan komunitas Tionghoa. Akibat dari huru-hara itu, maka pada tanggal 11 November 1740 Gubernur Jenderal A. Valckenier

¹⁰⁹ Fadrik Aziz Firdausi, "Wijkenstelsel & Passenstelsel: Mula Stigma Eksklusif Orang Tionghoa," *tirto.id*, accessed January 28, 2023, <https://tirto.id/wijkenstelsel-passenstelsel-mula-stigma-eksklusif-orang-tionghoa-euU6>.

¹¹⁰ *Ibid.*

mengeluarkan perintah agar semua warga Tionghoa harus tinggal di luar tembok kota, yaitu di kawasan Glodok sekarang.¹¹¹

Demi menghindari terulangnya pemberontakan macam itu, Kompeni memilih untuk memperketat kebijakan sistem kampungnya. Orang-orang Tionghoa diisolasi dalam kampung tertentu yang disebut *Chineesche kamp* di daerah Glodok. Lokasi itu dipilih dengan alasan “onder het berijk van ons geschut”—berada dalam jarak tembak meriam kita (VOC). Aturan lokalisasi yang kemudian dikenal sebagai *Wijkenstelsel* ini, melarang keras warga Tionghoa bermukim di luar kampung Tionghoa. Mobilisasi mereka juga dibatasi dengan pemberlakuan sistem pas jalan alias *Passenstelsel*. Sejak itu orang Tionghoa mesti mendapat semacam surat izin bepergian hanya untuk bisa keluar dari kampungnya. Aturan-aturan ini terus diperbarui untuk menjaga kontrol Kompeni dan sekaligus memutus kemungkinan orang Tionghoa mengadakan aliansi dengan kelompok masyarakat lain di Jawa.¹¹²

Meski demikian VOC maupun pemerintah Hindia Belanda yang menggantikannya kemudian, tidak terlalu konsisten menerapkan aturan-aturan itu. Kampung-kampung Tionghoa baru mulai bermunculan di Ommelanden pada paruh pertama abad ke-19. Munculnya kampung Tionghoa baru itu dipicu aturan baru yang terbit pada 1828. Aturan baru tersebut menetapkan bahwa jika ada 25 rumah tangga/keluarga Tionghoa dalam satu kampung, maka mereka akan ditempatkan tersendiri di bawah kepala kampung Cina dan membentuk *Chineeschewijk*. Meski demikian ada juga kota-kota yang menerapkannya dengan saklek, seperti Rembang, Tuban, dan Lasem. Ketika aturan diberlakukan di kota-

¹¹¹ Ibid.

¹¹² Ibid.

kota itu, orang-orang Tionghoa yang tinggal terpencar di desa-desa diharuskan pindah ke pusat kota. Tentu saja dengan alasan agar lebih mudah diawasi.¹¹³

Alasan dibuatnya aturan *Wijkenstelsel* dan *Passenstelsel* pun terus mengalami pembaruan. Selain alasan politik, dua aturan ini juga dibuat untuk mempertahankan monopoli ekonomi. Contohnya seperti terjadi pada 1764 saat orang Tionghoa dilarang bermukim di Priangan. Di daerah itu perkebunan kopi baru saja tumbuh dan VOC tak ingin direcoki orang Tionghoa. Peraturan ini sempat dihapus ketika Jawa dikuasai Inggris, tapi diberlakukan lagi pada 1820 saat Belanda kembali berkuasa.¹¹⁴

Selain dibatasi tempat tinggal dan pergerakannya, orang Tionghoa juga dibatasi pekerjaannya. Ini karena pada 1879 pemerintah Hindia Belanda menerbitkan satu aturan lagi yang melarang orang Tionghoa jadi petani. Maka itu tak heran jika kemudian komunitas Tionghoa yang terkonsentrasi di kota makin berfokus pada usaha dagang. Keterpusatan permukiman membuat solidaritas di antara orang-orang Tionghoa kian erat. Para usahawan Tionghoa juga kian mengenal kekuatan modal masing-masing anggota komunitasnya. Solidaritas macam ini makin dipererat pula dengan hubungan perkawinan.¹¹⁵

Upaya Pemerintah Hindia Belanda melokalisir kawasan pemukiman berdasarkan kelompok etnis, juga menegaskan klasifikasi kelas sosial masyarakat yang mereka bangun. Klasifikasi kelas sosial masyarakat ini hadir dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Hindia Belanda, mulai dari *Algemene Bepalingen van wetgeving voor Indonesie, Reglement op Het Beleid der*

¹¹³ Ibid.

¹¹⁴ Ibid.

¹¹⁵ Ibid.

Regering van Nederlands Indie, hingga *Wet op de Staatsinrichting van Nederlands-Indië*. Klasifikasi ini mengalami beberapa perubahan, seiring dengan perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Hindia Belanda.

Pertama, berdasarkan klasifikasi dari *Algemene Bepalingen van wetgeving voor Indonesie* (Peraturan Umum Mengenai Perundang-undangan untuk Indonesia) yang mulai digunakan sejak 30 April 1897, membagi klasifikasi kelas sosial masyarakat berdasarkan empat golongan, yakni golongan Eropa, golongan yang disamakan dengan golongan Eropa, golongan bumiputra dan golongan yang disamakan dengan golongan bumi putra.¹¹⁶

Kedua, berdasarkan *Reglement op Het Beleid der Regering van Nederlands Indie* (Peraturan tentang Kebijakan Pemerintah Hindia Belanda), , pembagian klasifikasi kelas sosial masyarakat di Hindia Belanda sama dengan klasifikasi kelas sosial yang ada di *Algemene Bepalingen van wetgeving voor Indonesie*. Namun pada peraturan yang mulai digunakan sejak 1854 ini, disebutkan dengan tegas bahwa bumiputra yang beragama kristen tetap sebagai golongan bumiputra. Kemudian, orang Amerika, Afrika, Australia dan Persia yang beragama kristen masuk golongan yang disamakan dengan golongan Eropa. Namun, peraturan ini tidak mengatur secara tegas mengenai status kelas sosial bagi orang asing lain (Tionghoa, Pakistan, India, dll) yang beragama Kristen, sehingga menimbulkan penafsiran bahwa golongan ini disamakan dengan golongan Eropa karena faktor agama atau golongan ini disamakan dengan golongan bumiputra. Penafsiran ganda ini melahirkan pasal 109 *Reglement op Het*

¹¹⁶ Riana Susmayanti, "Sejarah Pembagian Kelompok Penduduk Di Indonesia" (Malang, 2014), 2-3, <http://rianasusmayanti.lecture.ub.ac.id/files/2014/07/PHI-11-SEJARAH-PEMBAGIAN-GOLONGAN-PENDUDUK.pdf>.

Beleid der Regering van Nederlands Indie yang baru, berdasarkan *Staatsblad* (Lembaran Negara) 1919:622.¹¹⁷

Ketiga, berdasarkan klasifikasi kelas sosial dalam *Wet op de Staatsinrichting van Nederlands-Indië*, yang dikenal juga sebagai *Indische Staatsregeling*, terutama pada pasal 163, membagi masyarakat di Hindia Belanda menjadi tiga golongan, yakni golongan Eropa, golongan Timur Asing dan golongan bumiputra. Peraturan yang berlaku sejak 1 Januari 1925 ini menyebut, ada lima kriteria yang menjadikan seseorang masuk dalam golongan Eropa, yakni kebangsaan, berasal dari Eropa, hukum keluarga, azas keturunan dan perjanjian. Mereka yang digolongkan sebagai golongan Eropa adalah semua warga negara Belanda, mereka yang bukan bangsa Belanda tetapi berasal dari Eropa, Jepang (berdasarkan perjanjian Jepang dengan pemerintah Hindia Belanda), negara lain yang hukum keluarganya sama dengan hukum keluarga Belanda, serta keturunan dari empat golongan di atas, terdiri dari anak sah, anak yang diakui, anak yang disahkan, dan anak angkat.¹¹⁸

Adapun golongan Timur Asing sesuai peraturan tersebut, yakni semua orang yang tidak termasuk golongan Eropa dan bumiputra. Masyarakat Tionghoa di Hindia Belanda digolongkan ke dalam golongan ini, bersama golongan Timur Asing lainnya, seperti Arab, India, dll.¹¹⁹

Kemudian, golongan bumiputra sesuai pasal 162 *Indische Staatsregeling*, yakni orang Indonesia asli yang tidak pindah ke golongan penduduk lain, serta orang yang semula masuk golongan lain, namun meleburkan diri ke dalam

¹¹⁷ Ibid., 4–6.

¹¹⁸ Ibid., 7–8.

¹¹⁹ Ibid., 9.

golongan bumiputra. Golongan lain yang meleburkan diri adalah orang-orang bukan Indonesia asli, tetapi menjalani kehidupan meniru kehidupan orang pribumi dengan meninggalkan hukum asalnya. Wanita golongan lain yang menikah dengan orang Indonesia asli juga termasuk dalam golongan Indonesia asli.¹²⁰

Meskipun pemerintah Hindia Belanda telah menetapkan klasifikasi kelas sosial masyarakat berdasarkan golongannya, namun akses peralihan golongan penduduk tetap dibuka. Proses peralihan golongan ini terbagi menjadi tiga hal, yakni persamaan (*Gelijkstelling*), peleburan (*Opplosing*), serta peralihan golongan dari salah satu golongan penduduk ke golongan yang lain. Pada proses persamaan (*Gelijkstelling*), penduduk golongan bumiputra maupun Timur Asing dapat melakukan perpindahan golongan penduduk ke golongan Eropa. Caranya adalah dengan mengajukan permohonan persamaan hak kepada Gubernur Jenderal, kemudian hasilnya diumumkan dalam berita negara (*Staatsblaad*). Penduduk yang melakukan proses pindah golongan ini disebut Orang Eropa *Staatsblaad*.¹²¹

Perpindahan golongan melalui proses *Gelijkstelling* ini memiliki sejumlah syarat. Dalam *Reglement op Het Beleid der Regering van Nederlands Indie* tahun 1893 disebutkan, syarat penduduk golongan bumiputra atau Timur Asing yang ingin mengajukan *Gelijkstelling*, yakni beragama Kristen, fasih bercakap dan menulis dalam bahasa Belanda, berpendidikan dan beradat istiadat Belanda, serta mempunyai kecakapan bergaul dengan masyarakat Eropa. Selanjutnya, dalam *Reglement op Het Beleid der Regering van Nederlands Indie* tahun 1894 – 1913, ditambahkan syarat lainnya, yakni mempunyai kecakapan bergaul dengan

¹²⁰ Ibid.

¹²¹ Riana Susmayanti, “Peralihan Golongan Penduduk” (Malang, 2014), 3–4, <http://rianasusmayanti.lecture.ub.ac.id/files/2014/07/PHI-13-PERALIHAN-GOLONGAN-PENDUDUK.pdf>.

masyarakat Eropa. Adapun akibat hukum dari proses *Gelijkestelling* ini, yakni pemohon beserta anak-anaknya yang lahir kemudian, termasuk ke dalam golongan Eropa. Adapun istri dan anak-anak yang lahir terdahulu, golongannya tidak berubah. Kemudian, kepada pemohon dan anak-anaknya berlaku hukum privat (perdata) barat dan hukum publik barat.¹²²

Pada proses perpindahan golongan melalui mekanisme peleburan (*Opplosing*), terjadi peralihan golongan penduduk dari golongan Eropa atau Timur Asing ke golongan bumiputera. Mekanisme ini tidak memerlukan permohonan dan dianggap telah terjadi, apabila penduduk yang bersangkutan telah memenuhi syarat peleburan. Adapun syarat peleburan yakni, beragama Islam (tidak mutlak), hidup dalam masyarakat bumiputra, meniru kebiasaan bumiputra, serta merasa dirinya sebagai orang bumiputra (secara lisan). Akibat hukum dari proses tersebut adalah penduduk yang bersangkutan tunduk kepada hukum adat bumiputra.¹²³

Kemudian, pada proses peralihan golongan dari salah satu golongan penduduk ke golongan yang lain, yakni peralihan dari golongan bumiputra atau Timur Asing ke golongan Eropa, peralihan dari golongan Eropa atau Timur Asing ke golongan bumiputra, serta peralihan dari golongan bumiputra atau Timur Asing ke golongan Eropa, biasanya terjadi karena adanya peristiwa hukum. Peristiwa hukum yang dimaksud, antara lain naturalisasi, perkawinan campuran, pengakuan anak, pengesahan anak dan pengangkatan anak.¹²⁴

¹²² Ibid., 5–6.

¹²³ Ibid., 7–8.

¹²⁴ Ibid., 9–12.

Upaya Pemerintah Hindia Belanda untuk melokalisir kawasan pemukiman berdasarkan kelompok etnis ini, juga hadirnya klasifikasi kelas sosial yang membagi penduduk di Hindia Belanda menjadi tiga golongan, yakni golongan Eropa, golongan Timur Asing dan golongan bumiputra, nyatanya tidak mampu membendung pembauran yang terjadi antar kelompok etnis di Palu. Niatan untuk menempatkan masyarakat pendatang di kawasan pusat kota, agar tidak berbaur dengan penduduk lokal yang bermukim di pinggiran kota, nyatanya tidak berhasil. Masyarakat lokal Palu yang mayoritas adalah Suku Kaili berdialek Ledo, membaur dengan masyarakat pendatang, termasuk masyarakat Tionghoa. Pembauran ini dapat dilihat dari kemampuan masyarakat Tionghoa di Kota Palu, untuk menggunakan bahasa daerah setempat, yakni bahasa Kaili dengan cukup fasih, sebagai bahasa sehari-hari.

Kemampuan berbaur masyarakat Tionghoa ini, diyakini sebagai salah satu upaya untuk membentuk identitas baru, yang mendefinisikan posisi mereka dalam masyarakat dan transformasi ke dalam struktur sosial setempat, sehingga mereka memiliki akses terhadap keamanan dan pangsa pasar yang lebih luas untuk memasarkan barang dagangannya. Kemudian, kawasan tempat tinggal mereka yang tidak jauh dari pasar, selain memudahkan mereka untuk berdagang, juga memiliki fungsi lain yakni sebagai sarana pembauran mereka dengan masyarakat lokal dan masyarakat pendatang lainnya.

Namun, kemampuan membaur masyarakat Tionghoa ini, tidak berarti hubungan dengan masyarakat setempat selalu harmonis. Kemampuan orang Tionghoa dalam berdagang ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi kemampuan ini dibutuhkan, di satu sisi, ketika Belanda mulai berkuasa, orang-orang Tionghoa diberi kedudukan administratif istimewa, seperti syahbandar, mandor tol, dan bea cukai. Di sini mulai tampak adanya diskriminasi yang dilakukan secara sistemik

oleh Pemerintah Hindia Belanda terhadap orang-orang Tionghoa dan masyarakat setempat. Ini memang disengaja untuk memecah-belah, karena dengan cara itu, ke depan Pemerintah Hindia Belanda akan tetap melenggang menjadi pemenang dan berkuasa.¹²⁵

Masyarakat Tionghoa yang bermukim di Palu telah beranak pinak selama beberapa generasi, bahkan telah berhasil membangun kehidupan sosial ekonomi yang kuat. Menariknya lagi, secara kultural, sebagian besar dari para pendatang tersebut telah menjadi bagian dari masyarakat Kaili, yang merupakan masyarakat mayoritas di Palu. Menjadi Kaili adalah salah satu cara mereka untuk hidup damai dan layak di negeri asing seperti Palu.¹²⁶

Menjadi Kaili sendiri, menjadi salah satu cara masyarakat pendatang, salah satunya masyarakat Tionghoa, untuk dapat hidup damai dan layak di wilayah Palu. Hal ini merupakan bukti upaya mereka membangun identitas baru. Identitas ini mendefinisikan posisi mereka dalam masyarakat dan transformasi ke dalam struktur sosial setempat. Upaya membangun identitas baru ini sendiri, salah satunya dilakukan melalui metode perkawinan, di mana para perantau dari Tiongkok yang datang ke Palu, menikahi penduduk setempat, untuk meleburkan diri ke dalam struktur sosial setempat, sehingga dapat memiliki akses untuk hidup damai dan layak, dengan cara berdagang.¹²⁷ Hal ini sejalan dengan pendapat Abdullah Dahana, bahwa sebelum akhir abad ke-19, masyarakat Tiongkok yang

¹²⁵ Rustopo, "Kontribusi Orang-Orang Tionghoa Di Surakarta Dalam Kebudayaan Jawa 1895 -1998," *Dewa Ruci* 8, no. 2 (July 2013): 218.

¹²⁶ "Bulonggo, Perubahan Pola Pewarisan Dalam Keluarga Saudagar dan Bangsawan Kaili di Palu 1920-1992," 40.

¹²⁷ Putong, Upaya Membangun Identitas Baru. Ceng merupakan warga peranakan Tionghoa yang menikah dengan warga lokal pada tahun 1980 dan kini bertransformasi menjadi warga lokal dengan berjualan makanan. .

datang ke Indonesia didominasi oleh kaum pria, karena mereka meninggalkan keluarga atau istri mereka di Tiongkok. Mereka mengawini wanita setempat dan menyebabkan adanya percampuran antara kebudayaan Tiongkok dan kebudayaan lokal.¹²⁸ Dahana mengatakan bahwa meskipun orang Tionghoa mengikuti dan merangkul budaya dan masyarakat setempat, batasan budaya, ekonomi, lingkungan dan agama membuat mereka terpisah dari masyarakat setempat. Penduduk asli Indonesia sebagian besar beragama Islam. Tidak mudah bagi umat Islam untuk hidup rukun dengan orang Tionghoa. Faktor lainnya adalah hambatan budaya. Budaya lokal Indonesia menerima pengaruh India dan Islam, sedangkan orang Tionghoa memiliki latar belakang budaya yang sangat berbeda. Masyarakat Tionghoa dikenal dengan chauvinisme budayanya yang menonjol dan selalu memandang rendah budaya lain di luar budaya Tionghoa.¹²⁹

Memang, terlepas dari perbedaan budaya dan agama, para pendatang Tionghoa mampu berintegrasi dengan baik dengan masyarakat lokal di Palu, khususnya di kawasan Ujuna. Menurut penulis, hal ini dikarenakan budaya masyarakat Kaili yang terbuka untuk menerima kehadiran pendatang. Dwi Septiwiharti mengatakan, masyarakat Kaili memiliki karakter dasar sebagai masyarakat terbuka., yakni masyarakat yang bisa menerima dan terbuka atas etnik serta budaya lain, bisa berdampingan, dan senantiasa menghindari konflik antar sesama. Salah satu nilai keterbukaan dalam masyarakat Kaili ditunjukkan dalam sikap penerimaan terhadap etnik lain dalam jalinan komunikasi yang baik, sehingga memungkinkan terjadinya kerja sama dalam masyarakat. Iksam, sebagaimana dikutip Dwi Septiwiharti mengatakan, etnik kaili berkembang

¹²⁸ Dahana, "Kegiatan Awal Masyarakat Tionghoa Di Indonesia," 57.

¹²⁹ Ibid., 57–58.

menjadi masyarakat terbuka dan membentuk kebudayaan egaliter. Keterbukaan dan solidaritas dalam masyarakat Kaili inilah yang kemudian dipahami sebagai nilai-nilai yang mendasari lahirnya budaya Sintuvu.¹³⁰

Budaya Sintuvu merupakan kearifan lokal masyarakat Kaili karena mengandung nilai-nilai kebaikan yang dapat digali dari peristiwa-peristiwa konkret. Bahkan, Sintuvu disinyalir menjadi salah satu nilai yang mendasari persatuan masyarakat di tanah Kaili, sehingga bisa menjadi peredam konflik dalam masyarakat. Sintuvu merujuk pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama. Oleh sebab itu, terminologi kebersamaan dalam masyarakat Kaili disebut Sintuvu. Sintuvu sendiri merupakan nilai yang mendasari budaya gotong royong dalam masyarakat Kaili.¹³¹

Penerimaan masyarakat Kaili secara terbuka terhadap etnis dan kebudayaan lain, dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat pendatang yang bermukim di Palu, tidak terkecuali masyarakat Tionghoa. Mereka memutuskan untuk menanggalkan identitas Tionghoa-nya dan beralih identitas sebagai orang Kaili. Hal ini diyakini menjadi cara terbaik bagi mereka untuk mendapatkan legitimasi keamanan, juga memperluas ekspansi ekonominya.¹³²

Orang Tionghoa yang bermukim di Palu, sebagian besar menekuni pekerjaan sebagai pedagang. Mereka menjual berbagai macam komoditas, seperti sarung, minyak tanah, garam¹³³ hingga kopra.¹³⁴ Para pengusaha Tionghoa pada

¹³⁰ Dwi Septiwiharti, *Budaya Sintuvu: Refleksi Filosofis Kearifan Lokal Masyarakat Kaili* (Yogyakarta: DIVA Press, 2021), 31–32.

¹³¹ *Ibid.*, 35–36.

¹³² Chowindra, “Orang Cina Di Kota Palu.”

¹³³ Voorn, “Aanvullings Memorie van de Onderafdeeling Paloe,” 13.

¹³⁴ “Bulonggo, Perubahan Pola Pewarisan Dalam Keluarga Saudagar dan Bangsawan Kaili di Palu 1920-1992,” 133.

masa kolonial, antara lain Ban Soen, yang memiliki pabrik es, juga penggilingan padi dan jagung. Masyarakat Palu disebut memanfaatkan penggilingan ini dengan baik, dengan 10 persen dari hasil penggilingan sebagai upah pengupasan atau penggilingan.¹³⁵ Selain itu, ada paman dari Tjioe Thian Siong yang mendirikan usaha dengan nama Ho Ling Guan yang berdagang kopra, rokok dan barang campuran, kemudian ada Tang Koe Lang yang menjadi pedagang rokok, kopra dan minyak tanah, juga ada Chiang A Chui yang berdagang barang komoditi campuran. Ada juga di antara mereka yang berdagang dari pasar ke pasar, seperti Liem Hok Tjin yang berdagang dari pasar ke pasar di wilayah Palu dan sekitarnya menggunakan gerobak.¹³⁶ Dirinya menjual berbagai macam komoditas. Selanjutnya, ada Oe Khian yang membuka usaha bengkel mobil, Kao Tsu Chuen yang mendirikan usaha minuman limun (lemonade), serta Lie Eng Tjhiang yang membuka usaha reparasi jam.¹³⁷ Masyarakat Tionghoa di Palu juga memproduksi gerobak yang dihargai 160 gulden.¹³⁸

Para pedagang Tionghoa ini sebagian besar memilih berjualan di Pasar Bambaru, yang terletak tidak jauh dari kawasan pemukiman mereka. Mereka menyewa toko dari para bangsawan dan pedagang lokal di kompleks pasar tersebut.¹³⁹ Para pedagang Tionghoa ini mendapat julukan Toke (Tauke) Cina oleh masyarakat setempat.¹⁴⁰ Selain berdagang, sebagian orang Tionghoa di Palu

¹³⁵ Vorstman, "Aanvullende Memorie van Overgave van de Onderafdeling Paloe," 27.

¹³⁶ Hou, "Sekolah Cina Di Palu."

¹³⁷ Putung, "Sejarah Keluarga Putung."

¹³⁸ Vorstman, "Aanvullende Memorie van Overgave van de Onderafdeling Paloe," 31.

¹³⁹ "Bulonggo, Perubahan Pola Pewarisan Dalam Keluarga Saudagar dan Bangsawan Kaili di Palu 1920-1992," 136.

¹⁴⁰ *Ibid.*, 70.

juga memiliki ketertarikan pada bidang lainnya, misalnya pertambangan. Beberapa orang Tionghoa dan Jepang misalnya, menunjukkan minat pada mika di dekat Towoeloe dan di atas Poboja (Poboya), juga menggali tanah belerang di mata air panas Bora.¹⁴¹



Gambar 10. Situasi pasar di Palu tahun 1924.
Sumber: H.F. Tillema

Pergerakan masyarakat Tionghoa di Kota Palu dalam sektor perdagangan, membuat khawatir sejumlah organisasi politik di Kota Palu pada masa itu, salah satunya adalah Sarekat Islam (SI). Hal ini, salah satunya didasari oleh sikap anggota SI kepada orang-orang yang dianggap kafir (non muslim), di mana anggota SI bertindak melawan orang-orang yang mereka anggap kafir, yaitu melawan orang Tionghoa.¹⁴² SI kemudian mencoba merangkul para pedagang yang berasal dari bangsawan lokal, Arab, hingga Melayu, untuk bergabung bersama mereka, dalam upaya menjaga persaingan dengan para pedagang Tionghoa.¹⁴³ Namun, pergerakan SI ini sendiri, tidak berdampak pada lahirnya

¹⁴¹ Vorstman, "Aanvullende Memorie van Overgave van de Onderafdeling Paloe," 27.

¹⁴² "Het Toli-Toli-Rapport," *De Locomotief*, January 11, 1921.

¹⁴³ "Bulonggo, Perubahan Pola Pewarisan Dalam Keluarga Saudagar dan Bangsawan Kaili di Palu 1920-1992," 132.

sentimen anti Tionghoa di Palu, karena kemampuan mereka untuk membaaur dengan masyarakat lokal dan masyarakat pendatang lainnya di Palu.

Peristiwa G30S pada tahun 1965, menjadi titik balik dari perubahan identitas masyarakat Tionghoa di Palu. Gelombang protes dan demonstrasi yang menuntut pembubaran dan “pembersihan” Partai Komunis Indonesia (PKI) beserta elemen-elemennya juga terjadi di Kota Palu. Protes dan demonstrasi ini berlangsung dari Oktober 1965 sampai Februari 1966.¹⁴⁴ Komite Daerah Besar (CDB) PKI Sulawesi Tengah merespon peristiwa G30S dengan mengeluarkan pernyataan pada 15 Oktober 1965, yang isinya menyatakan peristiwa G30S sebagai persoalan internal Angkatan Darat. Sejak 15 Oktober 1965, pimpinan CDB PKI beserta ormas-ormasnya memilih mengamankan diri masing-masing,¹⁴⁵ Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Komandan Komando Resor Militer (KOREM) 132 Tadulako yang juga Koordinator Pengawas Penguasa Pelaksana Dwikora Daerah (Peperalda) Sulawesi Tengah, Letkol Inf. M. Yasin, merespon peristiwa G30S, dengan menerbitkan Keputusan Peperalda Sulawesi Tengah No. 031/Peperalda/65 tanggal 21 Oktober 1965, tentang penghentian sementara kegiatan PKI dan ormas-ormasnya di Sulawesi Tengah. Keputusan ini kemudian ditindaklanjuti oleh DPRD-GR Provinsi Sulawesi Tengah, dengan menggelar Sidang Kilat Istimewa pada tanggal 18 November 1965, yang menghasilkan Resolusi No. 15/KPTS/DPRD-GR/65. Melalui Resolusi ini, DPRD-GR Provinsi Sulawesi Tengah meminta kepada Gubernur Sulawesi Tengah untuk meneruskan pembersihan semua lembaga pemerintahan di Sulawesi Tengah dari unsur-unsur

¹⁴⁴ Moh. Syafari Firdaus et al., “Ringkasan Eksekutif Penelitian Dan Verifikasi Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Peristiwa 1965/1966 Di Kota Palu” (SKP-HAM Sulteng, 2015), 11.

¹⁴⁵ “Himpunan Keputusan DPRD-GR Provinsi Sulawesi Tengah I : 1964 -1971” (DPRD - GR Provinsi Sulawesi Tengah, September 30, 1971), 329.

G30S, dengan jalan memberhentikan untuk sementara semua pejabat/petugas lembaga aparatur pemerintahan di seluruh Sulawesi Tengah yang berasal dari PKI dan ormas-ormasnya, sesuai instruksi lisan Panca Tunggal Daerah Tingkat (Dati) I Sulawesi Tengah kepada segenap instansi pada tanggal 6 November 1965.¹⁴⁶

Stigma komunis kemudian dilekatkan pada masyarakat Tionghoa di seluruh Indonesia, tidak terkecuali di Palu. Sebagian besar dari mereka ditangkap, namun kemudian dibebaskan karena tidak cukup bukti.¹⁴⁷ Tercatat, ada 9 warga keturunan Tionghoa yang ditangkap oleh tentara, yakni Budi Utomo, Ho Gabung, Oci Te Tsui, Sihu, Tehu Tedy Tanod, Tjia Mei Ing (Susiana Umbas), Daniel Ngaing, Decky Tangkuman, dan A.T. Sumampouw.¹⁴⁸ Mereka berdomisili di wilayah Kelurahan Ujuna. Ada empat gelombang penangkapan dan penahanan yang terjadi di Kota Palu dan sekitarnya. Penangkapan dan penahanan gelombang pertama terjadi di akhir 1965. Sasaran penangkapan dan penahanan gelombang pertama ini adalah para pimpinan PKI dan pimpinan organisasi-organisasi pendukungnya. Gelombang kedua terjadi tahun 1966 dan 1967. Penangkapan dan penahanan gelombang kedua ini pun masih menyasar anggota PKI dan anggota organisasi pendukungnya.¹⁴⁹ Gelombang penangkapan dan penahanan ketiga terjadi tiga tahun kemudian, yaitu pada tahun 1969 sampai tahun 1970. Kali ini, yang menjadi sasaran adalah anggota militer dari kesatuan Brawijaya yang

¹⁴⁶ Ibid., 329–331.

¹⁴⁷ Tedi Halim, “Identitas Masyarakat Tionghoa Lewat Pendidikan,” interview by Jefrianto, June 16, 2021.

¹⁴⁸ Sembilan warga keturunan Tionghoa yang ditangkap di Palu pasca G30S ini, sebagian besar berprofesi sebagai pedagang. Sebagian lainnya berprofesi sebagai tukang obras, bahkan bekas guru di Chung Hwa Xue Xiao. Sebagian masuk dalam golongan A, B2 dan sebagian besar golongan C. Jefrianto, “Data Korban 65 Di Palu” (Koleksi Pribadi, 2015).

¹⁴⁹ Firdaus et al., “Ringkasan Eksekutif Penelitian Dan Verifikasi Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Peristiwa 1965/1966 Di Kota Palu,” 11–12.

tergabung dalam Batalyon 711 Raksatama, Palu.¹⁵⁰ Gelombang penangkapan dan penahanan keempat terjadi tahun 1975, yang didasari oleh adanya isu “Gerakan PKI Gaya Baru” yang berkembang di Sulawesi Tengah. Penangkapan dan penahanan ini menyasar putra-putra daerah yang sebagian besar adalah aktivis PNI (Partai Nasional Indonesia). Mereka dipenjarakan selama dua sampai empat tahun di Palu dan Manado, Sulawesi Utara.¹⁵¹

Adanya gelombang protes dan penangkapan terhadap mereka yang dituduh terkait dengan PKI tidak lantas menjadikan Kota Palu porak-poranda dan “banjir darah” sebagaimana yang terjadi di Sumatera, Jawa, Bali, atau di wilayah-wilayah Sulawesi lainnya. Situasi dan kondisi Kota Palu relatif cukup terkendali. Ketegangan dan ketakutan yang melanda masyarakat praktis hanya terjadi di bulan-bulan awal peristiwa, yaitu di akhir tahun 1965 sampai awal tahun 1966. Selanjutnya, keadaan relatif stabil dan terkendali walaupun tidak bisa dikatakan sepenuhnya tenang.¹⁵²

Keadaan yang terkendali ini secara tidak langsung menekan adanya pertumpahan darah. Di samping kasus penghilangan paksa terhadap empat orang, jatuhnya korban jiwa akibat peristiwa itu relatif sedikit jika dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia. Dalam catatan SKP-HAM Sulteng, sementara ini hanya ada satu kasus kematian terkait Peristiwa 1965/1966 di Kota Palu, yaitu kasus kematian akibat penyiksaan di tahanan yang terjadi pada Letnan Satu Karsono, anggota kesatuan Brawijaya yang dituduh sebagai simpatisan PKI.¹⁵³

¹⁵⁰ Ibid., 12.

¹⁵¹ Ibid., 12–13.

¹⁵² Ibid., 13.

¹⁵³ Ibid.

Ada beberapa faktor yang kiranya telah memberi pengaruh sehingga dampak dari peristiwa G30S di Sulawesi Tengah menjadi berbeda, baik dengan provinsi-provinsi di Sulawesi maupun dengan berbagai wilayah lainnya di Indonesia. Pertama, ketika Peristiwa G30S terjadi pada tahun 1965, Sulawesi Tengah baru satu tahun menjadi provinsi, tepatnya pada 13 April 1964. Korem II Sulawesi Tengah yang terbentuk pada 12 Agustus 1961, berubah nama menjadi Korem 132 Tadulako pada 15 Juni 1964. Dengan struktur pemerintahan yang masih baru, boleh jadi, pemerintahan daerah masih belum begitu berjalan stabil dan tidak terfokus pada urusan politik.¹⁵⁴

Hal ini tercermin dari sikap yang ditunjukkan Gubernur Anwar Gelar Datuk Madjo Basa nan Kuning dan Komandan Korem 132 Tadulako Palu, Letkol Inf. M. Yasin. Beberapa saat setelah terjadi G30S di Jakarta, mereka masih membangun komunikasi dengan pengurus Komite Daerah Besar (CDB) PKI Sulteng. Adanya hubungan yang baik di antara pimpinan dan tokoh daerah Sulawesi Tengah dengan pimpinan PKI Sulawesi Tengah ini kiranya turut berperan mengondusifkan situasi dan kondisi politik. Boleh jadi, karena adanya hubungan yang baik itu pula—ditambah dengan karakter masyarakat Suku Kaili yang menghormati para pemimpin dan tokoh-tokohnya—aktivis partai, para simpatisan, dan massa dari organisasi pendukung PKI tidak melakukan pemberontakan atau perlawanan ketika mereka dikejar dan ditangkap.¹⁵⁵

Kedua, di awal 1966, mereka yang ditangkap dan ditahan di gelombang pertama hampir semuanya dipekerjapaksakan. Bentuk penghukuman kerja paksa ini sedikit-banyak bisa menekan beban sosial dan politis. Keberadaan para

¹⁵⁴ Ibid., 13–14.

¹⁵⁵ Ibid., 14.

tahanan dipandang lebih berguna dan menguntungkan karena tenaga mereka bisa dimanfaatkan untuk membangun dan menata berbagai infrastruktur dan sarana publik. Terlebih, pada saat itu Kota Palu baru saja menjadi ibu kota provinsi dan masih harus bebenah.¹⁵⁶

Ketiga, Suku Kaili yang menjadi mayoritas masyarakat Kota Palu tetap menjunjung tinggi filosofi *Belontana Data Nosampesuvu* (atau *Posampesuvu*, rasa kekeluargaan). Adanya hubungan kekerabatan dan rasa kekeluargaan yang kuat membuat masyarakat Kota Palu, khususnya Suku Kaili, saling melindungi satu sama lain. Dari sejumlah cerita yang berhasil dihimpun, ada begitu banyak korban yang kala itu dilindungi keluarga atau kerabat mereka. Perlindungan itu baik dalam bentuk “tidak melaporkan” keluarga atau kerabat mereka yang dianggap memiliki kaitan dengan PKI ketika terjadi gelombang penangkapan dan penahanan; atau, walaupun ada di antara keluarga atau kerabat mereka yang ditangkap dan ditahan, mereka akan “menitipkannya” kepada aparat atau kepada orang-orang yang memiliki kekuasaan, yang juga masih memiliki hubungan keluarga dan kekerabatan.¹⁵⁷

Keempat, kuatnya hubungan patron-klien dalam struktur sosial-masyarakat di Suku Kaili yang menjadi warga mayoritas Kota Palu, sepertinya tidak memberi peluang kepada PKI untuk bisa mengembangkan gerakan *landreform*-nya dengan segera. Jika menyimak situasi di Jawa, massifnya gerakan *landreform* PKI lah yang menjadi salah satu penyebab terjadinya benturan hebat dan pertikaian horizontal di tingkat warga, yang pada akhirnya berujung dengan “banjir darah”. Di Kota Palu, sebelum meletus Peristiwa G30S, nyaris tidak ada pergesekan yang

¹⁵⁶ Ibid.

¹⁵⁷ Ibid., 15.

berarti di tengah masyarakat. Pergesekan yang sering muncul adalah antara PKI dengan partai politik lain, yang itu pun lebih mengemuka pada kampanye, “politik retorika” semata, untuk berebut simpati masyarakat dengan tujuan pembesaran partai.¹⁵⁸

Selain penangkapan terhadap mereka yang dituduh terlibat PKI atau organisasi underbouwnya, juga terjadi penyerobotan aset oleh pihak pemerintah, disokong oleh militer. Hal ini terjadi pada bangunan *Chung Hwa Xue Xiao* yang tutup pasca peristiwa G30S. Gedung sekolah ini diambilalih oleh pihak militer lalu kemudian diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Pada rentang tahun 1974-1980, gedung sekolah ini dijadikan ruang perkuliahan bagi IKIP Ujung Pandang cabang Palu, setelah diserahkan penggunaannya oleh Gubernur Sulawesi Tengah saat itu, Abdul Aziz Lamadjido. Pada tahun 1980, aktivitas perkuliahan dipindahkan ke kampus Bumi Bahari. Bangunan tersebut pun ditempati oleh para dosen dan pegawai sebagai tempat tinggal. Sebagian ruangan juga digunakan oleh pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala sebagai tempat tinggal.¹⁵⁹ Kini, gedung bekas sekolah Tionghoa tersebut telah sebagian telah menjadi kontrakan dan sebagian lagi dihuni oleh mantan pegawai IKIP Ujung Pandang Cabang Palu yang beralih menjadi Universitas Tadulako.¹⁶⁰

Setelah 1965, terbit berbagai aturan yang memberangus ke-Tionghoan, termasuk Instruksi Presiden tahun 1967. Tionghoa harus berasimilasi, tidak boleh punya sekolah, organisasi atau media, partai apalagi. Tidak boleh merayakan hari

¹⁵⁸ Ibid., 15–16.

¹⁵⁹ Jefrianto, “Gedung Bekas Sekolah Cina: Bukti Eksistensi Masyarakat Keturunan Tionghoa Di Kota Palu,” *Mercusuar* (Palu, February 8, 2015), 8.

¹⁶⁰ Ibid.

raya budaya di hadapan publik, untuk mendorong Tionghoa lebih cepat membaaur pada identitas kebangsaan Indonesia.¹⁶¹

Pemberangusan ini juga berdampak pada agama Konghucu dan para penganutnya. Hal ini sangat ironis, sebab awalnya Presiden Soeharto sangat mendukung kelompok agama untuk mengurangi pengaruh komunisme. Setelah 65, awalnya agama Konghucu tidak mengalami tekanan apa-apa.¹⁶² Namun pada tahun 1978, Presiden Soeharto mengumumkan melalui sidang kabinet bahwa Konghucu bukan agama dan dianggap aliran kepercayaan di bawah Buddha. Pada tahun 1982 muncul SKB tiga menteri yang mendorong agar kelenteng berubah menjadi vihara atau tempat ibadah Tri Dharma di bawah Buddha.¹⁶³ Hal ini yang membuat Klenteng *Kwan Im Miau* yang terletak di pemukiman masyarakat Tionghoa di Kelurahan Ujuna, kemudian berubah fungsi menjadi vihara. Klenteng yang berawal dari Cetiya¹⁶⁴ ini, dibangun oleh Ny. Phan A Lin (Jo Pit Nio)

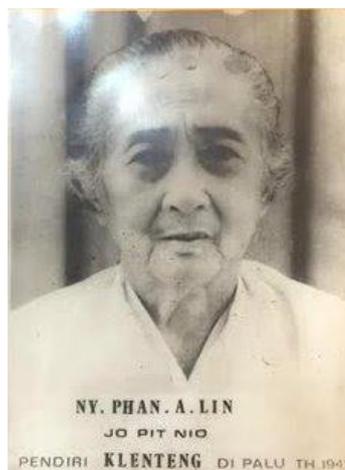
¹⁶¹ “Tionghoa Indonesia dalam pusaran peristiwa 65: Pengalaman, kenangan dan optimisme generasi muda,” *BBC News Indonesia*, last modified October 1, 2021, accessed January 30, 2023, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58732398>.

¹⁶² Ibid.

¹⁶³ Ibid.

¹⁶⁴ Cetiya adalah bentuk ruang peribadatan terkecil dalam agama Buddha, sesudah Arama dan Vihara. Cetiya muncul sebagai pengganti simbol penghormatan baru setelah jaman Buddha Gautama mangkat pada tahun 543 Sebelum Masehi di Kusinara, India. Dalam perkembangannya cetiya yang terdiri dari empat jenis, yaitu Dhātucetiya, Paribhogacetiya, Dhammacetiya, Uddesikacetiya. Dhātucetiya dikenal juga dengan nama Buddhasārīkacetiya, sārīkacetiya, atau relik Sang Buddha dalam bahasa sehari-hari. Dalam perkembangannya beberapa situs berupa cetiya tersebut mulai punah dan lokasinya mulai sulit ditempuh, sehingga muncul jenis cetiya lainnya yaitu Dhammacetiya, berupa bangunan yang menyemayamkan sabda Buddha dalam bentuk bangunan simbolik. Jenis yang terakhir adalah Uddesikacetiya. Selain empat jenis cetiya tersebut, saat ini istilah cetiya kita temukan dalam bentuk lain, yaitu berupa ruangan kecil yang dijadikan tempat peribadatan pribadi maupun kelompok tertentu, atau suatu komunitas tertentu. Aktivitas dalam cetiya ini pun mengalami perubahan, bukan sebagai simbol penghormatan saja, namun sebagai wadah aktivitas seputar ritual dan interaksi keagamaan. Carina Tjandradipura and Ferlina Sugata, “Representasi Dan Orientasi Simbol Penghormatan Dalam Dinamika Ruang Ibadah Agama Buddha (Studi Kasus: Ruang Ibadah Cetiya Di Bandung),” *Jurnal IDEALOG: Jurnal Desain Interior & Desain Produk* 1, no. 1 (April 2016).

sebagai tempat ibadah pribadi. Baru pada tahun 1942, dirinya menyerahkan penggunaan Cetiya tersebut untuk digunakan secara umum.¹⁶⁵ Cetiya ini merupakan wujud penghormatan Ny. Phan A Lin kepada Dewi Kwan Im.¹⁶⁶ Hal ini juga yang membuat kemudian nama kelenteng melekat pada Cetiya ini, dari kata Kwan Im Teng, yang artinya persembahan untuk Dewi Kwan Im.¹⁶⁷



Gambar 11. Ny. Phan A Lin
Sumber: Dok. Pribadi

Kehadiran kelenteng ini sendiri, juga menjadi penanda fase transformasi masyarakat Tionghoa di Palu, yang sebelumnya melakukan ibadah secara individu atau per keluarga. Ricky mengisahkan, sebelum kehadiran kelenteng ini, masyarakat Tionghoa di Palu terbiasa melakukan ritual keagamaan secara individu. Bahkan, ritual untuk mencegah kesialan dilakukan di gudang masing-masing masyarakat Tionghoa yang menjadi pedagang, agar terhindar dari kesialan, seperti kebakaran. Namun seiring dengan kesibukan, ritual inipun

¹⁶⁵ Chowindra, “Orang Cina Di Kota Palu.”

¹⁶⁶ Ibid.

¹⁶⁷ HS, “Mengenal Lebih Dekat Kelenteng Di Parepare | Dinas Perpustakaan Kota Parepare,” last modified July 4, 2022, accessed January 30, 2023, <https://perpustakaan.pareparekota.go.id/index.php/mengenal-lebih-dekat-kelenteng-di-parepare/>.

akhirnya dilembagakan dan dilaksanakan secara kolektif di kelenteng, dipimpin oleh Tang Koe Lang sebagai pemuka keagamaan, yang juga menjadi pematung dari sejumlah patung persembahan yang ada di kelenteng tersebut.¹⁶⁸



Gambar 12. Aktivitas sembahyang di Klenteng *Kwan Im Miao*
Sumber: Dokumentasi Pribadi

Pada zaman orde baru, ada fase kelenteng Konghucu akan ditutup kecuali masuk dalam agama yang diakui negara. Alhasil tempat peribadatan tersebut melebur ke dalam Buddha Theravada. Dengan begitu ada ruangan khusus Patung Buddha Siddharta Gautama (simbolis Buddha Theravada yang dari India) di kelenteng. Fase ini jadi momen akulturasi dan membawa pengaruh pada tradisi sembahyang di kelenteng.¹⁶⁹ Hal yang sama juga terjadi di kelenteng ini. Pada tahun 1981, izin rumah ibadah dikeluarkan Bupati Donggala dengan nama Vihara

¹⁶⁸ Chowindra, "Orang Cina Di Kota Palu."

¹⁶⁹ Rizki Syafaat Urip, "Sejarah Kelenteng Kwan Im Miao Di Kota Palu. Mulai Dimanfaatkan Khalayak Umum Sejak 1942 - TUTURA.ID | Bertutur Jernih, Menawarkan Perspektif," accessed January 30, 2023, <https://tutura.id/homepage/readmore/sejarah-klenteng-kwan-im-miao-di-kota-palu-1673937511>.

Karuna Dipa karena dinaungi oleh Yayasan Karuna Dipa yang terbentuk setahun lebih awal.¹⁷⁰

Diskriminasi terhadap masyarakat Tionghoa tidak hanya berhenti sampai di situ saja. Pada tahun 1967, Presiden Soeharto mengesahkan Keputusan Presiden RI Nomor 240 tahun 1967 Tentang Kebidjaksanaan Pokok Jang Menjangkut Warga Keturunan Asing. Dalam aturan itu, warga negara keturunan asing diimbau agar mengganti nama mereka. Peranakan Tionghoa kemudian harus mengganti nama Tionghoa-nya atas dasar pembuktian nasionalisme.¹⁷¹

Mengganti nama Tionghoa menjadi Indonesia sebenarnya bukanlah sesuatu yang sengaja dilakukan Peranakan Tionghoa untuk mendapatkan pekerjaan atau membaaur agar terkesan sebagai “pribumi asli” Indonesia. Bukan pula demi menjadi pasukan mata-mata negara asal, Tiongkok. Beberapa penyebab orang Tionghoa meninggalkan nama aslinya, antara lain karena khawatir dengan isu SARA dan kebiasaan masa Orde Baru. Bahkan hingga sekarang pun tetap sedikit sekali nama-nama asli Tionghoa yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP).¹⁷²

“Kebiasaan” Orde Baru ini merujuk pada tahun 1965. Mereka yang tak berganti nama cenderung dikaitkan dengan PKI atau komunis karena dianggap berafiliasi dengan Partai Komunis Cina (PKC) di Tiongkok. Bahkan hubungan diplomasi Indonesia dengan Tiongkok diputus setelah peristiwa Gerakan 30 September yang terkait dengan eksistensi PKI di Indonesia.¹⁷³

¹⁷⁰ Ibid.

¹⁷¹ Eddward S. Kennedy, “Hilangnya Identitas Orang Tionghoa Akibat Asimilasi Paksa,” *tirto.id*, last modified November 24, 2019, accessed January 31, 2023, <https://tirto.id/hilangnya-identitas-orang-tionghoa-akibat-asimilasi-paksa-e192>.

¹⁷² Ibid.

¹⁷³ Ibid.

Kebijakan untuk mengganti nama Tionghoa menjadi nama Indonesia ini, juga dilakukan oleh masyarakat Tionghoa di Palu. Salah satunya adalah Lie Soen Seng, anak dari Lie Eng Tjhiang. Dirinya adalah orang pertama di keluarganya yang beralih nama ke nama Indonesia, untuk keperluan melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Lie Soen Seng berganti nama menjadi Albert Lie Putong.

Lie Soen Seng menggunakan marga Putong di belakang namanya, karena ayahnya, Lie Eng Tjhiang, meninggal pada 30 Agustus 1968, setahun setelah Keputusan Presiden RI Nomor 240 tahun 1967 Tentang Kependidikan Pokok Jang Menjangkut Warga Keturunan Asing terbit, tanpa sempat mengganti nama Tionghoanya. Akibatnya, Lie Soen Seng harus menggunakan marga ibunya yakni Putung, sebagai marga di belakang nama barunya. Namun, akibat kesalahan penyetoran di Pencatatan Sipil, marga Putung berubah menjadi Putong dan akhirnya digunakan sebagian besar keluarga hingga saat ini. Hanya anak pertama Lie Eng Tjhiang, yakni Lie Sun Goan (Max Putong) dan keturunannya yang masih menggunakan marga Putung.¹⁷⁴



Gambar 13. Pelantikan dr. Albert Lie Putong (Lie Soen Seng) sebagai Kepala Labkes RSUD Undata tahun 1986
Sumber: Dok. Keluarga Putong

¹⁷⁴ Putong, "Sejarah Keluarga Putong."

Diskriminasi terhadap masyarakat Tionghoa juga terjadi di Sulawesi Tengah. DPRD-GR Provinsi Sulawesi Tengah melalui Sidang DPRD-GR Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 13 Juni 1967, mengeluarkan Resolusi No. 20 Tahun 1967 mengenai Masalah Warga Negara Asing Cina. Ada empat hal yang menjadi poin dalam Resolusi ini, yakni mendesak Gubernur Sulawesi Tengah untuk segera melakukan registrasi ulang terhadap semua warga negara asing, terutama Tiongkok yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah, mendesak Koordinator Pengawas Peplrada Sulawesi Tengah untuk mengintensifkan pendaftaran kekayaan segenap warga negara asing terutama Tiongkok yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan Instruksi Koordinator Peplrada No. 010/1966, mendesak Koordinator Pengawas Peplrada Sulawesi Tengah untuk mengeluarkan larangan mempergunakan bahasa dan tulisan Tiongkok dalam pergaulan umum sehari-hari, serta mendesak Koordinator Pengawas Peplrada Sulawesi Tengah untuk melarang keluar masuknya warga negara Tiongkok di Provinsi Sulawesi Tengah, terkecuali mereka yang akan dikembalikan ke Tiongkok.¹⁷⁵

Trauma yang dihasilkan oleh produksi ingatan, stigma komunis, juga perlakuan diskriminatif dari pemerintah kepada masyarakat Tionghoa, membuat mereka menjadi lebih menutup diri dan mengungkung diri mereka dan kelompoknya dalam trauma tersebut.

Ito Lawputra menjelaskan, akibat trauma tersebut, dirinya menerima larangan dari orang tua dan keluarganya untuk tampil di depan umum, terlibat dalam kegiatan politik dan hal-hal lain yang memungkinkan trauma tersebut hadir

¹⁷⁵ “Himpunan Keputusan DPRD-GR Provinsi Sulawesi Tengah I: 1964 -1971,” 199–201.

kembali.¹⁷⁶ Menurut penulis, larangan inilah yang menghadirkan kesan eksklusif pada masyarakat Tionghoa saat ini, jauh berbeda dengan kesan inklusif yang dihadirkan masyarakat Tionghoa pada fase awal kedatangannya di Palu.

Terkait hal tersebut, Bambang Purwanto menjelaskan, ketika Indonesia merdeka, orang Tionghoa menjalani proses historis yang berbeda dibandingkan dengan komunitas lain yang pernah dikategorikan sebagai Timur Asing. Orang Tionghoa tidak pernah benar-benar bisa diterima sebagai Indonesia dan terus menjadi orang asing, biarpun telah menjadi warga negara Indonesia. Keberadaan orang Tionghoa secara turun temurun dalam satu kesatuan teritorial yang sama dengan bumiputra, tidak membuat mereka diakui sebagai bumiputra. Secara historiografis, hal ini dapat dijelaskan karena semua narasi besar sejarah Indonesia tentang komunitas Tionghoa terjebak dalam perspektif kolonial, berdasarkan pengalaman perkotaan, dan bersifat Jawasentris.¹⁷⁷

Menurut Bambang, semua orang Tionghoa digeneralisasi sebagai komunitas tunggal dan kaya yang menguasai jejaring ekonomi sejak amsa kolonial dan terus bertahan ketika Indonesia merdeka. Sementara kenyataan lain dari sejarah komunitas buruh danpetani miskin Tionghoa yang ada di pusat-pusat industri pertambangan dan perkebunan, seperti di kalimantan, Sumatera Timur, Bangka dan Belitung. Adanya keberagaman di dalam golongan Tionghoa itu, tidak pernah mendapat tempat dalam historiografi untuk membentuk narasi besar bangsa Indonesia. Selain ‘kecemburuan’ sebagaimana telah disebutkan di atas, curiga dan tidak percaya merupakan dua kata lain yang tidak pernah lepas dalam

¹⁷⁶ Ito Lawputra, “Trauma Generasi Ketiga,” interview by Jefrianto, Desember 2022.

¹⁷⁷ Bambang Purwanto, *Praktik Kewarganegaraan Di Indonesia* (Yogyakarta: Ombak, 2019), 57–58.

naratif bangsa, ketika menggambarkan status orang Tionghoa dalam konteks keindonesiaan.¹⁷⁸

D. Chung Hwa Xue Xiao: Eksistensi Masyarakat Tionghoa di Palu

Cara lain masyarakat Tionghoa di Kota Palu untuk membangun identitas baru dalam struktur sosial masyarakat lokal adalah lewat jalur pendidikan, yakni dengan mendirikan sekolah *Chung Hwa Xue Xiao*. Sekolah ini tidak hanya menerima siswa keturunan Tionghoa, tetapi juga siswa dari masyarakat lokal dan masyarakat pendatang lainnya, yang bermukim di sekitar kawasan tempat tinggal mereka.¹⁷⁹ Kebijakan membuka akses pendidikan seluas-luasnya ini, membuat masyarakat Tionghoa mampu mendefinisikan posisi mereka. Hal ini membuat mereka diterima dengan baik oleh masyarakat lokal serta masyarakat pendatang lainnya di Kota Palu.

Sebelum masyarakat Tionghoa mendirikan sekolah *Chung Hwa Xue Xiao* di Palu pada tahun 1921¹⁸⁰, telah berdiri sejumlah sekolah. Pada tahun 1911, telah berdiri sebuah sekolah lanskap di Palu. Pendidikan di sekolah lanskap direkomendasikan dalam pengawasan khusus petugas pemerintahan dan mereka diinstruksikan untuk mengontrol guru dan pola pendidikan.¹⁸¹ Kemudian pada tahun 1925, di Palu telah berdiri sekolah negeri (*Gouvernements School*) Kelas Dua,¹⁸² dengan rerata siswa mencapai 200 orang, sedangkan stafnya terdiri dari 5

¹⁷⁸ Ibid., 58.

¹⁷⁹ Halim, "Identitas Masyarakat Tionghoa Lewat Pendidikan."

¹⁸⁰ Hou, "Sekolah Cina Di Palu."

¹⁸¹ "Het Encyclopaedisch Bureau Aflevering II. Mededeelingen van Het Bureau Voor de Bestuurzaken Der Buitenbezittingen," n.d., 127.

¹⁸² Sekolah ini juga dikenal dengan sebutan Sekolah Ongko Loro (Tweede Klasse School), yang banyak didirikan di distrik-distrik. Lama belajar di sekolah ini tiga tahun, dengan

guru.¹⁸³ Selanjutnya, di *Onderafdeeling* Palu sendiri, ada 3 jenis sekolah rakyat (*Volksschool*)¹⁸⁴, yakni sekolah lanskap yang dikelola oleh pemerintah di Lasoani, Biromaroe, Dolo, Sidondo, Kaleke dan Ngatapapoe, sekolah rakyat yang dikelola oleh Bala Keselamatan di Padende, Bomba, Bora, Rarampadende, Lemo, Lindoe, Winatoe, Gimpoe dan Kantewoe, serta Sekolah Bala Keselamatan di Wajoe, Porame, Karere, dan Towoloe.¹⁸⁵



Gambar 14. Bangunan *Gouvernements School* (sekolah negeri) di Palu.

Sumber: KITLV

Terbatasnya akses sekolah yang disediakan oleh Pemerintah Hindia Belanda di Palu, membuat kelompok masyarakat maupun organisasi sosial keagamaan dan politik, berbondong-bondong mendirikan sekolah di Palu.

menggunakan bahasa melayu sebagai bahasa pengantar. Sekolah ini disediakan untuk anak-anak pribumi golongan menengah, dengan kurikulum yang sangat sederhana, yakni membaca, menulis dan berhitung. Setelah tahun 1901, sekolah ini mengalami perkembangan, yakni dari lama studi yang sebelumnya 3 tahun menjadi 5 tahun, serta penambahan pelajaran pendidikan jasmani. Gusti Muh. Prayudi and Dewi Salindri, "Pendidikan Pada Masa Pemerintahan Kolonial Belanda Di Surabaya Tahun 1901-1942," *Publika Budaya* 1, no. 3 (March 2015): 26.

¹⁸³ Voorn, "Aanvullings Memorie van de Onderafdeeling Paloe," 14.

¹⁸⁴ Sekolah Rakyat atau *Volksschool* merupakan sekolah yang didirikan di desa, dengan lama studi 3 tahun dengan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Pengetahuan yang diajarkan adalah membaca, menulis, bahasa Melayu, menggambar dan berhitung. Prayudi and Salindri, "Pendidikan Pada Masa Pemerintahan Kolonial Belanda Di Surabaya Tahun 1901-1942," 26.

¹⁸⁵ Voorn, "Aanvullings Memorie van de Onderafdeeling Paloe," 14.

Masyarakat Arab misalnya, lewat Sayyid Idrus bin Salim Aljufri atau yang dikenal dengan sebutan Guru Tua, mendirikan lembaga pendidikan bernama Madrasah al-Islamiyyah al-Khairat di Kota Palu, pada 30 Juni 1930. Madrasah al-Islamiyyah al-Khairat kemudian menjadi cikal bakal berdirinya lembaga pendidikan Islam Alkhairaat pada tahun 1933.¹⁸⁶ Selain masyarakat Arab, masyarakat Tionghoa di Palu juga tidak ketinggalan ambil bagian dalam mendirikan sekolah, sebagai akses pendidikan bagi masyarakat Tionghoa di Palu. Pada tahun tersebut, mereka mendirikan *Chung Hwa Xue Xiao*, di atas sebuah lahan seluas sekira 4000 m² di Ujuna. Tempat ini dikenal juga sebagai kawasan pemukiman masyarakat Tionghoa di Palu.¹⁸⁷ *Chung Hwa Xue Xiao* didirikan dengan niatan untuk mengupayakan pendidikan dasar yang layak bagi anak-anak dari komunitas Tionghoa di Palu. Saat itu, belum ada sekolah khusus bagi anak-anak Tionghoa di Palu, sementara sekolah-sekolah yang didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda, tidak menerima anak-anak Tionghoa sebagai siswa.¹⁸⁸ Dengan alasan yang bermacam-macam, Pemerintah Hindia Belanda mempersulit anak-anak Tionghoa dan anak-anak pribumi untuk masuk sekolah yang mereka dirikan. Pemerintah Belanda memberikan syarat seperti: 1) anak-anak sudah harus menguasai bahasa Belanda di rumah; 2) biaya sekolah yang mahal sekali; 3) harus ada rekomendasi dari pejabat Belanda, seperti Residen atau

¹⁸⁶ Gani Jumat, "Nasionalisme Ulama: Pemikiran Politik Kebangsaan Sayyid Idrus Bin Salim Aljufri 1891-1969" (Disertasi, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2012), 74–75; "Bulonggo, Perubahan Pola Pewarisan Dalam Keluarga Saudagar dan Bangsawan Kaili di Palu 1920-1992," 88.

¹⁸⁷ Halim, "Identitas Masyarakat Tionghoa Lewat Pendidikan."

¹⁸⁸ Hou, "Sekolah Cina Di Palu."

asisten Residen. Jika tidak memenuhi persyaratan tersebut diatas, maka mereka tidak bisa diterima.¹⁸⁹

Chung Hwa Xue Xiao didirikan oleh Liem Hok Tjin, seorang imigran asal Pulau Pingtan yang datang ke Palu melalui Donggala pada 1909.¹⁹⁰ Liem Hok Tjin mendirikan sekolah itu dengan dana pribadi miliknya, dari hasil berdagang lintas pulau yang dikumpulkannya bertahun-tahun.¹⁹¹ Sekolah ini didirikannya bersama perkumpulan masyarakat Tionghoa di Palu saat itu, yakni Hoa Chiau Kong Hui.¹⁹²

Pada tahun 1935, Kontrolir Palu, J.A. Vorstman melaporkan keberadaan *Chung Hwa Xue Xiao*. Vorstman menyebut, pada periode itu ada tiga jenis sekolah yang tidak disubsidi oleh Pemerintah Hindia Belanda. Sekolah tersebut masing-masing adalah sekolah partikelir Belanda (*Part. Holland Inlandsche School*), sekolah Tionghoa (*Chinese School*), serta sekolah agama Islam.¹⁹³ Pada periode itu, sejumlah sekolah juga telah didirikan di wilayah *Onderafdeeling* Palu, yakni Sekolah Rakyat (*Volksschool*) di Paloe, Lasoani, Tatanga, Donggala-ketjil,

¹⁸⁹ Noor Isnaeni, "Perkembangan Pendidikan Anak-Anak Tionghoa Pada Abad 19 Hingga Akhir Orde Baru Di Indonesia," *Jurnal Khasanah Ilmu* 3, no. 2 (2012).

¹⁹⁰ Liem Hok Tjin, imigran Cina Katolik asal pulau Pingtan, yang kini masuk dalam wilayah Provinsi Fujian, China. Pulau Pingtan sendiri masuk ke dalam wilayah Vikariat Apostolik Fujian, yang kemudian menjadi Keuskupan Agung Fuzhou. Dekrit dikeluarkan Dinasti Qing pada 1 Juli 1900, yang menyatakan bahwa era hubungan baik dengan para misionaris Eropa dan umat kristen telah berakhir dan bahwa para misionaris harus dipulangkan saat itu juga dan umat Katolik dipaksa untuk ingkar, atau akan dibunuh, membuat sebagian besar umat Katolik yang berada di wilayah kota-kota pelabuhan di tenggara Cina, memutuskan untuk melarikan diri ke luar negeri, termasuk Liem Hok Tjin. Liem Hok Tjin melarikan diri menuju nusantara dan mendarat di Borneo (Kalimantan), tepatnya di Balikpapan, lalu pada 1909, tiba di Palu melalui Donggala. Hou, "Sekolah Cina Di Palu."

¹⁹¹ Halim, "Identitas Masyarakat Tionghoa Lewat Pendidikan."

¹⁹² Chowindra, "Orang Cina Di Kota Palu."

¹⁹³ Vorstman, "Aanvullende Memorie van Overgave van de Onderafdeling Paloe," 30.

Kaloekoeboela, Dolo, Sidondo, Biromaroe, Sakidi, Kaleke, Bobo dan Boeloebete dan sekolah rakyat bersubsidi yang didirikan oleh Bala Keselamatan di Wajoe, Padende, Bomba, Rarampadende, Sibalaja, Kalawara, Bora, Kapirooi, Manoesi, Kulawi, Lindoe, Banasoe, Peana, Kantewoe, Towoeloe dan Winatoe. Kemudian Sekolah Menengah Negeri (*Gouvernements Vervolg School*)¹⁹⁴ di Palu dan Biromaru. Selain itu, terdapat pula sekolah yang dikelola Bala Keselamatan. Sekolah tersebut terletak di wilayah pedalaman Palu.¹⁹⁵

Setelah mendirikan *Chung Hwa Xue Xiao* di Palu, masyarakat Tionghoa Donggala mendirikan *Chung Hua School* di Donggala.¹⁹⁶ Sekolah ini merupakan salah satu dari sekian sekolah swasta yang didirikan di Donggala, seperti sekolah yang didirikan oleh Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), sekolah Muhammadiyah, sekolah swasta di luar konteks PSII, tetapi di bawah arahan mantan guru PSII, serta sekolah swasta yang dikelola oleh orang Minahasa, yang disebut sebagai H.I.S swasta.¹⁹⁷

Niatan Liem Hok Tjin dan masyarakat Tionghoa di Palu yang tergabung dalam *Hoa Chiau Kong Hui* untuk mendirikan sekolah, terbilang cukup sederhana. Mereka mengupayakan pendidikan dasar yang layak bagi anak-anak

¹⁹⁴ Vervolg School merupakan sekolah lanjutan dari sekolah desa (Volksschool), yang dibuka pada tahun 1916. Lama belajar di sekolah ini dua tahun, dan disediakan untuk murid-murid yang berprestasi baik, dari sekolah desa. Sekolah lanjutan ini setara dengan kelas 4 dan kelas 5 di Sekolah Rendah Kelas Dua, sehingga sekolah ini didirikan di tengah-tengah lingkungan sekolah desa. Sekolah ini disebut sangat jarang peminatnya, di mana sebagian dari sekolah ini, khusus disediakan bagi perempuan yang mendapat tambahan pelajaran membuat kerajinan rumah tangga. Prayudi and Salindri, "Pendidikan Pada Masa Pemerintahan Kolonial Belanda Di Surabaya Tahun 1901-1942," 70.

¹⁹⁵ Vorstman, "Aanvullende Memorie van Overgave van de Onderafdeling Paloe," 30.

¹⁹⁶ B.J. van den Berg, "Nota Inzake de Bestuursopvolging in Het Landschap Banawa," 1936.

¹⁹⁷ Ibid.

dari komunitas Tionghoa di Palu. Upaya untuk memberikan pendidikan dasar yang layak ini, ditunjukkan dengan merekrut guru-guru yang berasal dari Minahasa, Makassar dan Surabaya.¹⁹⁸ Guru-guru asal Minahasa tersebut, selain mengajar di *Chung Hwa Xue Xiao*, guru-guru asal Minahasa ini juga mengajar di sekolah pemerintah.¹⁹⁹

Proses pembelajaran di sekolah ini pada awalnya menggunakan Bahasa Mandarin, diselingi Bahasa Melayu pada beberapa pelajaran. Hal ini dilakukan untuk memudahkan siswa-siswa pribumi menerima pelajaran, juga mengenalkan Bahasa Melayu kepada anak-anak Tionghoa.²⁰⁰ Selain itu, hal ini dilakukan untuk membedakan *Chung Hwa Xue Xiao* dengan sekolah Tionghoa yang dibentuk oleh Pemerintah Hindia Belanda, yakni HCS (*Holland Chinese School*), sekolah dengan model Barat dan dengan bahasa pengantar Belanda. Tujuan utama pendirian sekolah ini untuk melahirkan generasi muda Tionghoa yang berbudaya Barat, yang minimal dianggap dapat mengurangi rasa nasionalisme ketionghoannya.²⁰¹ Di sisi lain, diharapkan agar mereka secara kultural tetap dapat menjaga jarak dengan masyarakat pribumi.

Pada periode 1930-an, sekolah ini menjadi salah satu dari sejumlah sekolah yang berafiliasi dengan Partai Nasionalis Tiongkok atau *Kuo Min Tang*. Hal ini dibuktikan dengan sebuah foto yang menampilkan puluhan orang berfoto di depan sebuah bangunan sekolah. Puluhan orang ini terdiri dari orang dewasa,

¹⁹⁸ Halim, "Identitas Masyarakat Tionghoa Lewat Pendidikan."

¹⁹⁹ Nainggolan et al., *Sejarah Pendidikan Daerah Sulawesi Tengah*.

²⁰⁰ Chowindra, "Orang Cina Di Kota Palu."

²⁰¹ Usman Pelly, "Murid Pri Dan Nonpri Pada Sekolah Pembauran: Kebijakan Asimilasi Orde Baru Di Bidang Pendidikan Dan Dampaknya Terhadap Masyarakat Multikultural," *Antropologi Indonesia* 71 (2003): 35.

remaja dan anak-anak laki-laki dan perempuan. Pada bagian kiri atas foto nampak papan nama yang terpampang di dinding atas teras bangunan, dengan tulisan beraksara Mandarin dan dibawahnya tulisan latin ‘Sekolah Tionghwa’. Kemudian di bagian kanan atas foto nampak papan nama yang juga terpampang di dinding atas teras bangunan, dengan tulisan beraksara Mandarin, dengan tulisan latin di bawahnya, yakni ‘*Chung Kuo Kuo Min Tang*’, ‘*Paloe Fun Pu*’ dan ‘*Paloe Celebes*’.



Gambar 15. *Chung Hwa Xue Xiao* tahun 1932.
Sumber: Djon Tanod

Setelah melakukan penelusuran, penulis berhasil mendapatkan keterangan pasti bahwa foto tersebut diabadikan pada 2 Februari 1932. Foto ini merupakan foto bersama sebagai kenang-kenangan dengan Mr. Lie Tjong Nam.²⁰² Penulis belum mendapatkan data lebih lanjut mengenai siapa sosok Mr. Lie Tjong Nam ini, namun, kuat dugaan bahwa Mr. Lie Tjong Nam ini merupakan pengurus dari *Kuo Min Tang* yang datang ke Palu untuk meninjau sekolah tersebut. Dugaan ini diperkuat oleh keterangan Liem Boen Hou, anak

²⁰² Chowindra, “Orang Cina Di Kota Palu.”

dari Liem Hok Tjin, yang mengaku pernah melihat ayahnya menyimpan stempel dengan simbol *Kuo Min Tang*, yakni lambang matahari. Hal ini semakin menguatkan pendapat bahwa pada periode awal pendiriannya, *Chung Hwa Xue Xiao* berafiliasi dengan *Kuo Min Tang*, karena pendirinya merupakan salah seorang perwakilan *Kuo Min Tang* di Palu.²⁰³ Namun demikian, Ricky Chowindra, afiliasi *Chung Hwa Xue Xiao* dengan *Kuo Min Tang*, disebabkan oleh kebutuhan sekolah tersebut sebagai tempat bernaung. Saat itu, kondisi politik di Tiongkok sedang tidak stabil, akibat perebutan kekuasaan antara *Kuo Min Tang* dengan Partai Komunis Tiongkok (Kun Chang Tang). Hal ini menyebabkan masyarakat Tionghoa di perantauan cenderung berafiliasi dengan pemerintah yang berkuasa, yakni *Kuo Min Tang*. Setelah kekalahan *Kuo Min Tang* dari Kun Chang Tang pada tahun 1949, barulah afiliasi mereka berubah ke Republik Rakyat Tiongkok yang didirikan oleh Mao Tse Tung (Mao Ze Dong).²⁰⁴ Perubahan afiliasi ini mereka lakukan untuk mengamankan posisi mereka untuk bernaung²⁰⁵

Selama berkuasa, Pemerintah *Kuo Min Tang* mendirikan sebuah Biro Urusan Tionghoa Perantauan dan mengeluarkan kebijakan masalah pendidikan untuk mereka. Sekolah-sekolah berbahasa pengantar Bahasa Mandarin diletakkan di bawah pengawasan para konsul pemerintah *Kuo Min Tang* atas nama pemerintah Tiongkok. Hal ini untuk memastikan bahwa kegiatan pendidikan itu dilakukan untuk kepentingan pemerintah Tiongkok. Pemerintah Tiongkok melarang sekolah-sekolah berbahasa pengantar Bahasa Mandarin di

²⁰³ Hou, "Sekolah Cina Di Palu."

²⁰⁴ Chowindra, "Orang Cina Di Kota Palu."

²⁰⁵ Ibid.

perantauan menerima hadiah dari pemerintah setempat, biaya keuangan harus datang dari masyarakat Tionghoa sendiri. Akan tetapi, banyak sekolah yang melanggar ketentuan ini pada tahun 40-an.

Pada umumnya, anak-anak Tionghoa Totok mendapatkan pendidikan di sekolah-sekolah berbahasa pengantar Bahasa Mandarin, sedangkan anak-anak Tionghoa Peranakan mendapatkan pendidikan di sekolah-sekolah berbahasa Belanda.²⁰⁶ Setelah kemerdekaan, Bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar dalam proses pembelajaran.²⁰⁷ Siti Zainatul Umara menyebut bahwa kebijakan standarisasi sekolah yang diterapkan untuk seluruh sekolah asing, membuat lebih dari 1.100 sekolah Tionghoa mengganti bahasa pengantar pengajarannya, dari semula Bahasa Mandarin menjadi Bahasa Indonesia.²⁰⁸

Chung Hwa Xue Xiao terus berkembang seiring perkembangan Komunitas Tionghoa di Kota Palu. Sekolah ini kemudian memiliki 12 ruang kelas, dari yang awalnya hanya beberapa kelas,. Setiap kelas terbagi dalam dua kelas dan satu kelas masing-masing diisi oleh sekira 40 siswa.²⁰⁹ Pada perkembangannya, sekolah ini juga membuka jenjang menengah (SMP).²¹⁰

Chung Hwa Xue Xiao mengeluarkan kebijakan menerima siswa di luar masyarakat Tionghoa. Kebijakan ini, diyakini lahir dari kondisi kawasan

²⁰⁶ Isnaeni, “Perkembangan Pendidikan Anak-Anak Tionghoa Pada Abad 19 Hingga Akhir Orde Baru Di Indonesia,” 178–179.

²⁰⁷ Halim, “Identitas Masyarakat Tionghoa Lewat Pendidikan.”

²⁰⁸ Siti Zainatul Umara, “Sejarah Sekolah Tionghoa, Korban Kebijakan Rezim Yang Diskriminatif,” accessed December 20, 2022, <https://tirto.id/sejarah-sekolah-tionghoa-korban-kebijakan-rezim-yang-diskriminatif-ghCo>.

²⁰⁹ Halim, “Identitas Masyarakat Tionghoa Lewat Pendidikan.”

²¹⁰ Chowindra, “Orang Cina Di Kota Palu.”

pemukiman masyarakat di Ujuna yang majemuk. Ujuna dikenal juga sebagai tempat tinggal para pendatang dan pedagang, seperti Banjar, Arab, Melayu, dan juga Orang Belanda. Komposisi masyarakat yang beragam ini, menjadikan wilayah Ujuna sebagai kawasan yang majemuk, yang mendorong *Chung Hwa Xue Xiao* membuka diri untuk menerima siswa dari kalangan penduduk. Kebijakan ini kemudian membuat lulusan sekolah itu memiliki wawasan kebangsaan yang multikultur, serta menghargai perbedaan.



Gambar 16. *Chung Hwa Xue Xiao* tahun 1950-an.

Sumber: Tedi Halim

Tampak sekali bila eksistensi masyarakat Tionghoa, melalui *Chung Hwa Xue Xiao*, telah memberi pendidikan multikultural kepada semua siswanya. Fenomena ini, sejalan dengan penjelasan Bambang Purwanto, bahwa salah satu alasan masyarakat Tionghoa membuka diri terkait dunia pendidikan, baik itu menyekolahkan anaknya di sekolah non Tionghoa atau membuka akses Sekolah Tionghoa untuk kalangan pribumi, adalah kesadaran pada diri orang tua para siswa tersebut untuk sejak awal memberi dasar kepada anak-anak mereka tentang

arti keberagaman, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun berbangsa.²¹¹ Masyarakat pribumi dan pendatang atau masyarakat pendatang, telah menjalani kehidupan sehari-hari secara damai tanpa prasangka, sejak lebih dari satu abad sebelumnya. Cara berpikir positif itu bersambut dengan sikap masyarakat pendatang, yang juga menyadari tentang arti penting dari hidup damai dalam keberagaman.²¹²

Selama berdiri, *Chung Hwa Xue Xiao* dikelola oleh empat orang, masing-masing Liem Hok Tjin, kemudian Chiang A Chui, dan Oei Soe Tang. Liem Hok Tjin diketahui memimpin sekolah ini hingga masa kemerdekaan, sebelum digantikan oleh Chiang A Chui hingga periode awal 1960-an dan kemudian digantikan oleh Oei Su Tang hingga sekolah tutup pada tahun 1965.²¹³ Adapun saat Chiang A Chui dan Oei Soe Tang menjadi pimpinan sekolah, Tjioe Thian Siong menjadi wakilnya.²¹⁴

Pada tanggal 11 Januari 1942, Tentara Jepang melakukan pendaratan pertama di wilayah Indonesia. dan Manado jatuh ke tangan Jepang. Dengan jatuhnya Manado ke tangan Jepang, maka untuk Sulawesi Tengah ada dua tempat yang menjadi pusat penarikan mundur tentara KNIL yang tersebar di seluruh Sulawesi Tengah. Untuk Sulawesi Tengah bagian Barat, pusat pertahanan tentara Belanda adalah Kota Palu di bawah pimpinan Letnan Satu Harbert (bekas Kontrolur dan HPB Tolitoli) dan Letnan Satu Thuis (seorang dokter tentara)

²¹¹ Bambang Purwanto, "Pertahankan Ruang Inklusif Bangsa," *kompas.id*, last modified June 15, 2021, accessed December 6, 2022, <https://www.kompas.id/baca/opini/2021/06/16/pertahankan-ruang-inklusif-bangsa>.

²¹² Ibid.

²¹³ Hou, "Sekolah Cina Di Palu"; Chowindra, "Orang Cina Di Kota Palu."

²¹⁴ Chowindra, "Orang Cina Di Kota Palu."

dengan pasukan berkekuatan satu kompi. Untuk Sulawesi Tengah bagian Timur dipusatkan di Poso dan kemudian setelah Jepang datang, pasukan Belanda lalu bertahan di Kolonedale (Poso) dipimpin oleh Letnan Satu De Jong, *Gezaghebber* Kolonedale dan Letnan Dua Van Dalen.²¹⁵

Pada bulan April 1942, sepasukan Angkatan Laut Jepang tiba di Donggala dengan kapal penjelajah dan beberapa kapal pemburu torpedo. Sebelum pendaratan itu, pelabuhan Donggala dihujani bom sehingga bangunan sepanjang pantainya runtuh rata dengan tanah. Pendaratan pertama Jepang di Donggala ini terus mencari pejabat-pejabat pemerintah Belanda, tetapi nyatanya Asisten Residen Donggala, De La Vuento dan *Gezaghebber* Palu Feliks, bersama keluarganya telah menghilang tak diketahui ke mana sehingga hanya raja-raja setempat saja yang dijumpai oleh pasukan-pasukan Jepang tersebut.²¹⁶

Tidak lama sesudah pendaratan pasukan Kaigun, maka datanglah Kaisatsuco (kepala polisi) Jepang bernama Itaya ke Donggala dari Makassar (Ujung Pandang), yang bertindak mewakili pemerintah Jepang menyerahkan urusan pemerintahan pada raja-raja setempat. Situasi pemerintahan demikian berlangsung sampai bulan Juni 1942. Setelah itu barulah petugas-petugas pemerintahan sipil Jepang datang dari Manado.²¹⁷

Gedung *Chung Hwa Xue Xiao* terbakar akibat dibom oleh Jepang. Namun, aktivitas belajar mengajar tetap berlangsung, karena kebakaran tidak melanda seluruh gedung sekolah. Salah satu alasan mengapa *Chung Hwa Xue Xiao* tetap

²¹⁵ Bambang Suwondo, *Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Sulawesi Tengah* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1982), 26.

²¹⁶ Ibid.

²¹⁷ Ibid.

dapat beroperasi, karena pada masa pendudukan Jepang, semua sekolah model HCS yang memakai bahasa pengantar Belanda ditutup. Sekolah yang dibenarkan hanyalah yang menggunakan bahasa pengantar Melayu dan Tionghoa. Hal ini membuat masyarakat Tionghoa sebagian besar memilih sekolah-sekolah yang memakai bahasa pengantar Tionghoa daripada Melayu.²¹⁸

Sekolah ini pernah ditutup akibat pemberontakan Permesta, karena gedungnya digunakan sebagai barak tentara Bataliyon 758 pimpinan Frans Karangan, sekaligus ruang tahanan Permesta.²¹⁹ Pasca Permesta, sekolah dibuka kembali pada tahun 1964, dengan siswa yang tersisa. Nasib *Chung Hwa Xue Xiao* di Kota Palu, sedikit lebih baik dari sekolah sejenis di wilayah lain di Indonesia di era 1950-an.²²⁰ Pada akhir 1950-an, pemerintah mulai bertindak dengan wacana penghapusan sekolah-sekolah partikelir asing. Berdasarkan Peraturan Penguasa Perang Pusat/Kepala Staf Angkatan Darat No. Prt/Peperpu/09/1958, semua sekolah asing di Indonesia hanya boleh beroperasi di 158 lokasi/kota, dengan ketentuan bahwa di setiap lokasi hanya tersisa 1-2 sekolah asing di seluruh Indonesia. Kondisi ini menimbulkan masalah bagi masyarakat Tionghoa di Indonesia, yaitu kebutuhan mereka akan sekolah tidak terpenuhi. Kemudian Pemerintah Indonesia mendirikan Sekolah Nasional Asing (SNAA) untuk sekitar 1.100 sekolah di beberapa kota di Indonesia.²²¹

²¹⁸ Pelly, "Murid Pri Dan Nonpri Pada Sekolah Pembauran: Kebijakan Asimilasi Orde Baru Di Bidang Pendidikan Dan Dampaknya Terhadap Masyarakat Multikultural," 35.

²¹⁹ Halim, "Identitas Masyarakat Tionghoa Lewat Pendidikan."

²²⁰ Ibid.

²²¹ Yety Rochwulaningsih, "Development of Non-Indigenous Schools" (Paper presented at the International Seminar of Developing the International School, Japan Nagoya University, November 8, 2006), 2.

Pada tahun 1960, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 48 Tahun 1960 Tentang Pengawasan Pendidikan dan Pengajaran Asing, untuk mengontrol keberadaan sekolah asing, termasuk sekolah Tionghoa. Perpu ini mengatur kedudukan yuridis formal dan administrasi sekolah asing, seperti yang terlihat pada pasal 1 yang menyebutkan, sekolah asing ialah sekolah swasta yang menggunakan bahasa asing sebagai bahasa pengantar dan/atau menggunakan rencana pelajaran asing. Sekolah asing juga dimaknai sebagai sekolah swasta yang seperdua dari jumlah pengajarnya atau lebih terdiri atas orang asing. Upaya mengontrol keberadaan sekolah asing ini terlihat pada pasal 3 yang menjelaskan, sekolah asing hanya dapat didirikan dan/atau diselenggarakan oleh suatu badan hukum yang berkedudukan di Indonesia, setelah memperoleh izin untuk itu dari Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (PPK). Kemudian pada pasal 5, yang menyebut, sekolah asing tidak diperkenankan menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran lebih tinggi dari pendidikan dan pengajaran tingkat menengah.

Chung Hwa Xue Xiao boleh dikatakan beruntung, tidak terkena imbas dari peraturan ini. Tutupnya sekolah sebagai imbas dari pemberontakan Permesta, serta kebijakan menerima siswa dari kalangan pribumi, dan kecenderungan masyarakat Tionghoa di Kota Palu yang mampu beradaptasi dan membaaur dengan masyarakat setempat dan masyarakat pendatang lainnya, bisa disebut sebagai sebab sekolah ini tidak terkena imbas pengurangan sekolah asing tersebut.

Sekolah ini baru benar-benar ditutup pada tahun 1965, pasca peristiwa Gerakan 30 September (G30S) di Jakarta. Stigma komunis dilekatkan kepada masyarakat Tionghoa di Indonesia, tidak terkecuali di Palu. Setelah tutup, gedung sekolah *Chung Hwa Xue Xiao* digunakan sebagai salah satu tempat penahanan

orang-orang yang dituduh PKI atau terlibat dengan organisasi yang dianggap sebagai *underbouw* PKI.²²² Pasca G30S, karena Tiongkok dituduh terlibat dalam peristiwa itu, terjadi gelombang gerakan anti Tiongkok di mana-mana, dengan penghancuran segala aset etnis Tionghoa, termasuk sekolahnya. Peristiwa tersebut bahkan menyebabkan putusannya hubungan diplomatik antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Tiongkok di Palungkok pada tanggal 1 Oktober 1967. Situasi ini memicu penutupan sekolah asing di Indonesia, yang dilakukan berdasarkan Instruksi Presidium Kabinet Ampera Indonesia No. 37 /U/IN/1967. Berdasarkan peraturan ini, anak-anak warga negara asing yang menjadi warga negara Indonesia, disarankan untuk bersekolah di sekolah negeri baik negeri maupun swasta. Kemudian, setiap sekolah nasional yang memiliki siswa warga negara asing harus memiliki jumlah siswa Indonesia yang lebih banyak.²²³ Peraturan ini kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Presiden (Keppres) No. B-12/Pres/1/1968 tentang penerapan Pasal 7, 8, dan 9 Instruksi Presidium tersebut, yang dikeluarkan untuk Kementerian PPK dan Kementerian Dalam Negeri (Mendagri). Inti dari Keppres tersebut adalah pemberian tugas kepada kedua menteri, untuk mendirikan sekolah nasional bagi warga negara asing Tionghoa, sebagai akibat dari kebijakan pemerintah tentang penutupan sekolah asing di Indonesia. Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh sekolah nasional tersebut, antara lain, sekolah disiapkan oleh pihak swasta berstatus dalam hukum Indonesia di bawah izin pemerintah, kepala sekolah dan guru diangkat dan diberhentikan oleh badan hukum dengan persetujuan pemerintah dan kualifikasi tertentu, bidang teknis pendidikan di sekolah-sekolah tersebut ditentukan oleh pemerintah, serta

²²² Tim Peneliti, "Ringkasan Eksekutif Penelitian Dan Verifikasi Korban Pelanggaran HAM Peristiwa 1965/1966 Di Kota Palu" (SKP-HAM Sulteng, 2015), 20.

²²³ Rochwulaningsih, "Development of Non-Indigenous Schools," 2.

40% kursi disediakan untuk anak Tionghoa asing dan di setiap kelas jumlah siswa Indonesia harus lebih banyak dari siswa asing.²²⁴

Instruksi Presiden pada masa pemerintahan orde baru menjadi dasar pendirian dan penerapan pendidikan pada sekolah swasta nasional di Indonesia. Dalam prakteknya, sekolah-sekolah yang sebelumnya berstatus sekolah asing di Indonesia, sejak keluarnya Keppres, secara yuridis formal memproses peralihan status sekolah menjadi sekolah swasta nasional dengan persyaratan yang ditetapkan, yaitu bersih dari unsur G30S dan aktivitas subversif lainnya, memiliki sifat edukatif sosial, serta berniat baik mendukung pemerintah, memberikan pendidikan dan pengajaran bagi warga negara asing Tionghoa bersama-sama dengan Indonesia demi kepentingan nasional.²²⁵

Meski aktivitas sekolah ditutup, gedung *Chung Hwa Xue Xiao* juga pernah menjadi lokasi ujian nasional pada tahun 1966. Akibat penutupan sekolah, dua anak Liem Hok Tjin, yakni Liem Boen Kuang dan Liem Boen Hou bersama masyarakat Tionghoa dan masyarakat Sulawesi Utara di Palu menginisiasi pendirian Sekolah Katolik pada tahun 1962. Sekolah ini mempekerjakan guru-guru dari Minahasa sebagai tenaga pengajar. Jumlah gurunya saat itu empat orang dan semuanya perempuan.²²⁶

Dengan berdirinya Sekolah Katolik, sebagian murid sekolah Tionghoa kemudian pindah ke Sekolah Katolik, sementara sebagian lainnya memutuskan pindah ke Sekolah Muhammadiyah yang berada tidak jauh dari sekolah Tionghoa.

²²⁴ Ibid., 2–3.

²²⁵ Ibid., 3.

²²⁶ Hou, “Sekolah Cina Di Palu”; Chowindra, “Orang Cina Di Kota Palu.”

Bahkan saat itu, sekira 70 persen murid sekolah Tionghoa memutuskan pindah ke Sekolah Muhammadiyah.²²⁷

E. Relasi Sosial Dengan Masyarakat Muslim di Palu

Sejak awal kedatangannya ke wilayah Palu, masyarakat Tionghoa telah menjalin relasi dengan masyarakat lokal dan masyarakat pendatang lainnya yang bermukim di Palu. Relasi ini hadir melalui interaksi mereka sebagai pedagang yang menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat. Model relasi sosial masyarakat Tionghoa dengan masyarakat lokal dan masyarakat pendatang lainnya di Palu, dapat dikatakan sebagai proses asimilasi untuk menghilangkan identifikasi sebagai golongan minoritas. Asimilasi atau peleburan menjadi orang Indonesia “asli” adalah solusi bagi orang Tionghoa peranakan untuk keluar dari label minoritas yang melekat pada mereka. Asimilasi ini dapat dilakukan dengan perubahan nama, suasana pendidikan, sekolah campuran dan hal lainnya. Namun menurut Ong Hok Ham, seorang anggota minoritas dapat memperbaiki kedudukan sosialnya sebagai perseorangan, tetapi ia tidak mungkin mempertahankan atau memperbaiki kedudukan minoritas sebagai golongan.²²⁸

Hal ini sejalan dengan pendapat Heri Purwanto, bahwa asimilasi merupakan konsekuensi logis dari pemberian status WNI kepada orang Tionghoa yang lahir dan puluhan tahun lamanya menetap serta mencari nafkah di Indonesia.²²⁹ Namun, pendapat Heri mengenai menguatnya identitas sebagai bangsa Indonesia dan loyalitas terhadap negara Indonesia, sebagai konsekuensi

²²⁷ Halim, “Identitas Masyarakat Tionghoa Lewat Pendidikan”; Hou, “Sekolah Cina Di Palu.”

²²⁸ Ong Hok Ham, *Riwayat Tionghoa Peranakan Di Jawa* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2009).

²²⁹ Hari Poerwanto, *Cina Khek Di Singkawang* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2014).

dari berkurangnya orientasi terhadap kebudayaan leluhur, nampaknya tidak berlaku bagi masyarakat Tionghoa di Palu. Menguatnya identitas kebangsaan mereka lewat asimilasi, tidak lantas melunturkan orientasi mereka terhadap kebudayaan leluhur. Hal ini dapat dilihat dari ritual-ritual keagamaan yang bersumber dari kebudayaan leluhur yang masih mereka lakukan hingga saat ini, seperti ritual saat perayaan Imlek maupun ritual Ceng Beng atau sembahyang leluhur, walaupun kebudayaan ini telah terintegrasi dalam keyakinan mereka sebagai penganut agama Buddha.

Bertahannya orientasi terhadap kebudayaan leluhur ini, juga erat kaitannya dengan upaya “resiniasi” yang dilakukan setelah Orde Baru runtuh, terutama setelah Konghucu diakui sebagai salah satu agama resmi di masa Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Mereka mendorong proses “resiniasi” dengan gaya hidup, pendirian tempat ibadah, hingga pendirian sekolah. Hal ini sejalan dengan pendapat Yerry Wirawan tentang bagaimana masyarakat Tionghoa di Makassar membangun relasi dengan masyarakat lokal. Pendapat Yerry bahwa masyarakat peranakan Tionghoa yang beragama Islam kurang mampu bertahan dalam situasi “resiniasi” masyarakat Tionghoa ini, sehingga sedikit demi sedikit melebur dalam masyarakat lokal, tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di Palu. Orang Tionghoa di Palu yang telah menganut agama Islam, memang perlahan meninggalkan kebudayaan leluhur dan melebur ke dalam masyarakat lokal, tetapi tidak serta merta menghilangkan identitas mereka sebagai orang Tionghoa. Hal ini seperti diungkapkan Lisdawati (70) yang menyatakan, walaupun dirinya telah menganut Islam, hubungannya dengan keluarga dan kerabatnya yang non Muslim tetap baik dan silaturahmi tetap terjalin.

“Pada saat Imlek atau Natal misalnya, kami tetap bersilaturahmi ke rumah keluarga yang non Muslim, menikmati suguhan dari mereka tanpa prasangka

apapun tentang apakah sajian yang disuguhkan dalam proses memasaknya “terkontaminasi” dengan unsur-unsur yang diharamkan oleh umat Muslim,” jelas Lisdawati yang memiliki nama asli Mei Li.²³⁰

Hal serupa juga disampaikan oleh Maryam (72), yang mengaku masih berhubungan baik dengan sanak saudara, keluarga serta kerabatnyayang non Muslim, meski pada saat memutuskan untuk mengaut agama Islam, mendapa penolakan dari sang ayah yang beragama Katolik.

“Ayah saya Katolik dan masih memegang erat kebudayaan leluhur, sehingga anak-anaknya tidak bisa menikah dengan selain orang Tionghoa. Namun sepeninggalnya, hubungan silaturahmi dengan keluarga tetap terjalin baik. Kini, silaturahmi tersebut dieratkan dengan adanya arisan keluarga yang dilakukan berpindah tempat dari rumah keluarga yang satu ke rumah keluarga yang lain, tanpa memandang status sosial dan agamanya,” ujar Maryam yang memiliki nama asli Gua ini.²³¹

Kenyataan bahwa pemeluk Islam menjadi mayoritas penduduk di wilayah Palu membuat masyarakat Tionghoa yang bermukim di sana, menjalin relasi dengan masyarakat Muslim. Relasi ini terlihat sejak awal kehadiran masyarakat Tionghoa di wilayah Palu. Mereka menyewa tanah milik Magau Palu, Djanggola (1921-1945), yang terbentang di sepanjang wilayah Ujuna, Kampung Baru, dan Siranindi. Ricky Chowindra mengatakan, saat bermukim di Palu, ayahnya, Tjio Thian Siong menyewa tanah untuk dijadikan tempat tinggal pada Andi Rotja Djanggola, anak dari Magau Palu, Djanggola. Menurutnya, sebagian besar

²³⁰ Lisdawati, “Orang Tionghoa Muslim Di Palu,” interview by Jefrianto, Mei 2023.

²³¹ Maryam, “Silaturahmi Tionghoa Muslim Di Palu,” interview by Jefrianto, Mei 2023.

pendatang Tionghoa menyewa tanah dari Andi Rotja Djanggola untuk dijadikan sebagai tempat tinggal.²³²

Relasi yang dibangun masyarakat Tionghoa dengan keluarga bangsawan di Palu ini, menurut penulis juga merupakan salah satu upaya mereka untuk mendapatkan legitimasi dalam hal keamanan dalam berdagang. Relasi ini juga kemudian dapat dimaknai sebagai bentuk penerimaan kelompok bangsawan di Palu yang juga notabene berprofesi sebagai pedagang, kepada masyarakat Tionghoa yang bermukim di Palu.

Relasi ini sendiri menghadirkan berbagai kisah menarik. Ricky Chowindra mengisahkan, pada momen Hari Raya Idul Fitri, masyarakat Tionghoa yang tinggal di kawasan Ujuna, Kampung Baru dan Siranindi, akan mengirimkan bingkisan kepada keluarga bangsawan di Palu. Bingkisan itu berupa kue, limun, dan aneka barang lainnya. Bingkisan ini nantinya akan ditukar dengan makanan khas Hari Raya Idul Fitri seperti Ketupat, Burasa, Kalopa, Mandura, serta aneka masakan tradisional khas Idul Fitri lainnya.²³³

Hal serupa juga dilakukan oleh masyarakat Tionghoa di Palu yang beragama Muslim. Salah satunya adalah Moh. Ceng. Pada momen Hari Raya Idul Fitri, dirinya mengirimkan aneka makanan khas Hari Raya Idul Fitri, seperti Burasa, Kalopa, Mandura dan Ketupat, kepada keluarganya yang non Muslim. Selain kepada keluarga, dirinya juga mengirimkan makanan tersebut kepada orang Tionghoa yang menjalin relasi dengannya. Kiriman makanan tersebut biasanya ditukar dengan uang atau bingkisan, berupa kue atau parcel.²³⁴

²³² Chowindra, "Orang Cina Di Kota Palu."

²³³ Ibid.

²³⁴ Putong, "Upaya Membangun Identitas Baru."

Selain di Palu, relasi sosial dalam hal keagamaan antara masyarakat Tionghoa dengan masyarakat Muslim juga dapat dilihat di wilayah Donggala. Idrus Rore menjelaskan, berkaitan dengan tradisi Barzanji yang dilaksanakan komunitas muslim atau pribumi, etnis Tionghoa sering diundang untuk mengikutinya. Undangan kepada masyarakat etnis Tionghoa umumnya menggunakan bahasa Bugis dan dilakukan dengan pendekatan kekeluargaan. Menurut Idrus, di antara berbagai tradisi Islam yang dilakukan oleh masyarakat Donggala, yang paling menonjol adalah Barzanji. Menonjol dalam artian bukan hanya karena Barzanji sering dilaksanakan dalam berbagai kesempatan, namun juga karena secara faktual dikenal luas oleh berbagai elemen masyarakat.²³⁵

Menurut Idrus, etnis Tionghoa mengenal Barzanji karena pernah diundang oleh etnis pribumi yang melaksanakan Barzanji. Secara spesifik ditegaskan, sebelum etnis Tionghoa melaksanakan Barzanji, maka yang terjadi adalah etnis Tionghoa sudah beradaptasi dengan Barzanji dengan cara menghadiri undangan Barzanji yang dilaksanakan oleh pribumi. Hal ini pada akhirnya membawa etnis Tionghoa mengenal lebih dalam mengenai Barzanji, untuk kemudian menjadi pendukung dan pelaksana Barzanji. Setelah mengenal barzanji, terjadi transformasi dalam cara pandang etnis Tionghoa terhadap ungkapan rasa syukur.²³⁶

Selain menjalin relasi yang baik dengan keluarga bangsawan yang ada di Palu, masyarakat Tionghoa juga menjalin relasi yang baik dengan masyarakat setempat. Ricky Chowindra mengisahkan, dirinya bersama anak-anak Tionghoa

²³⁵ Rore, *Ko Dan Ci Menggelar Barzanji Di Kota Donggala*, 71–72.

²³⁶ *Ibid.*, 72–75.

lainnya kerap bermain dan membaur dengan anak-anak setempat, tanpa memperdulikan perbedaan agama, suku, dan ciri fisik.²³⁷

“Kami biasa berkumpul bermain di petak-petak sawah di dekat Lapangan Nokilalaki (sekarang Kompleks Palu Plaza), serta mandi di sungai kecil di dekat lokasi itu,” ujar Ricky.²³⁸

Setali tiga uang dengan Ricky, Djon Tanod juga mengisahkan hal serupa. Saat kecil, dirinya juga bermain dengan anak-anak setempat tanpa memperdulikan perbedaan yang ada. Hal ini juga diamini oleh Moh. Ceng dan Tedi Halim.²³⁹

Kenangan yang sama juga disampaikan oleh Asnani (64), warga Kelurahan Ujuna. Asnani yang tinggal di bekas Sekolah Tionghoa *Chung Hwa Xue Xiao* mengatakan, masa kecilnya dihabiskan dengan bermain bersama anak-anak Tionghoa yang tinggal di wilayah Ujuna.²⁴⁰

“Waktu masih kecil, saya bermain dengan mereka (anak-anak Tionghoa) di sekitar bangunan sekolah Tionghoa ini. Kami orang asli Ujuna berhubungan baik dengan orang-orang Tionghoa di sini. Sampai sekarang, kalau mau hari raya (Idulfetri), biasanya mereka memberikan sembako atau uang tunai,” ujar Asnani.²⁴¹

Keputusan untuk membuka akses *Chung Hwa Xue Xiao* tidak hanya untuk masyarakat Tionghoa tapi juga masyarakat lokal, tampaknya juga menjadi alasan

²³⁷ Chowindra, “Orang Cina Di Kota Palu.”

²³⁸ Ibid.

²³⁹ Tanod, “Daerah Asal Imigran Tionghoa”; Putong, “Upaya Membangun Identitas Baru”; Halim, “Identitas Masyarakat Tionghoa Lewat Pendidikan.”

²⁴⁰ Asnani, “Masa Kecil Dengan Anak Tionghoa,” interview by Jefrianto, June 3, 2023.

²⁴¹ Ibid.

mengapa relasi sosial antara masyarakat Tionghoa dan masyarakat Muslim di Kota Palu, menjadi semakin erat. Hal ini terbukti, saat *Chung Hwa Xue Xiao* ditutup pasca peristiwa G30S pada tahun 1965, selain pindah ke Sekolah Katolik, sebagian besar anak-anak Tionghoa memutuskan pindah ke Sekolah Dasar Muhammadiyah yang terletak tidak jauh dari lokasi *Chung Hwa Xue Xiao*.²⁴² Ricky mengisahkan, anak-anak Tionghoa yang pindah ke SD Muhammadiyah, bahkan ada yang sampai pintar membaca Alquran.²⁴³

Namun relasi sosial yang harmonis ini, tidak berjalan mulus. Pasca G30S pada tahun 1965, sentimen anti Tionghoa menguat secara nasional dan juga berdampak di Palu. Dampak ini tidak terjadi secara langsung berupa penyerangan atau intimidasi terhadap masyarakat Tionghoa di Palu, namun lebih kepada dampak psikis yang berujung pada trauma. Ricky mengisahkan, pasca peristiwa 1965, setiap kali ada pawai yang dilaksanakan oleh Pemuda Anshor di kawasan Jalan Gajah Mada di Palu, yang mayoritas didiami oleh masyarakat Tionghoa, hadir semacam ketakutan dalam diri mereka.

Kemudian pada 25 Juni 1973, gesekan antara masyarakat Tionghoa dengan masyarakat lokal kembali terjadi. Serombongan pemuda dengan batu dan benda-benda keras lainnya, melakukan pengrusakan Toko Sulinda, milik pengusaha Tionghoa, dengan alasan penghinaan terhadap agama Islam. Beberapa orang anggota Polri yang hadir di lokasi kejadian, hanya bisa menyaksikan penghancuran toko tersebut, disusul pengrusakan kaca jendela sebuah toko di sebelahnya, sebuah apotik, dan sebuah pabrik es di pinggir kota.²⁴⁴

²⁴² Halim, "Identitas Masyarakat Tionghoa Lewat Pendidikan"; Chowindra, "Orang Cina Di Kota Palu."

²⁴³ Chowindra, "Orang Cina Di Kota Palu."

²⁴⁴ Sinansari Ecip, "Gara-Gara Tulisan Arab," *Tempo*, July 28, 1973.

Pascakejadian, para pelopor demonstrasi itu hampir seminggu lamanya ditahan oleh polisi, bersama pemilik toko Sulinda. Setelah diusut, aksi ini terjadi karena kertas bertulisan Arab yang menjadi pembungkus kancing yang dibeli seorang anak di Toko Sulinda. Setelah harga kancing dibayar, bocah ini pergi ke tukang jahit membawa kancing yang dibungkus kertas itu. Ketika penjahit Banjar tersebut menyaksikan ruwetnya tulisan Arab pada kertas pembungkus itu, entah mengerti atau tidak apa makna tulisan itu, dirinya berkesimpulan bahwa orang Tionghoa mau menghina umat Islam, dengan menggunakan lembaran-lembaran Kitab Suci Alquran sebagai pembungkus barang dagangan.²⁴⁵



Gambar 17. Bangunan bekas Toko Sulinda di Jalan Sungai Miu

Sumber: Dok. Pribadi

Berita itu segera tersebar-luas di kalangan tokoh-tokoh pemuda Muslim di Palu. Namun, demonstrasi tidak segera dilancarkan, sebab diketahui bahwa saat itu, Gubernur Sulteng saat itu, A.M. Tambunan, akan berangkat ke pedalaman. Baru keesokan harinya, ketika Tambunan belum pulang dari perjalanan dinasny,

²⁴⁵ Ibid.

terjadilah demonstrasi dan perusakan toko-toko Tionghoa di Jalan Kemakmuran.²⁴⁶

Koresponden Tempo, Sinansari Ecip, yang meliput peristiwa tersebut menjelaskan, beberapa orang demonstran yang dihubungnya, menyangkal bahwa demonstrasi itu ada hubungannya dengan protes terhadap pencalonan Tambunan yang dilancarkan oleh 5 ormas pemuda Islam seminggu sebelumnya. Pada 21 Juni 1973, di depan Ketua DPRD Sulteng pada saat penutupan rapat kerja antara gubernur dengan para bupati, 9 orang tokoh pemuda Islam, di antaranya dari HMI, PII, Dewan Mahaiswa IAIN Alauddin Cabang Palu dan Dewan Mahasiswa Alkhairaat, menandatangani surat pernyataan agar pencalonan A.M. Tambunan ditinjau kembali. Selanjutnya, mereka juga mengajukan 3 orang calon lainnya: seorang tokoh pejuang yang berasal dari daerah sana, dan 2 orang militer dari staf Kowilhan III. Hal ini menurut Sinansari, membuat ada pihak yang mencari-cari kaitan antara surat pernyataan ke-5 ormas Islam itu, dengan demonstrasi terhadap toko-toko Tionghoa, yang datangnya juga dari kalangan yang sama. Namun para demonstran mengaku, mereka bergerak secara spontan.²⁴⁷

Sinansari mencatat, pemerintah setempat tidak mau mengambil risiko konflik seperti itu muncul kembali. Pemilik Toko Sulinda masih ditahan oleh Dandim, sementara para demonstran telah dibebaskan. Penahanan pemilik toko ini dimaksudkan untuk menyelidiki tuduhan yang dilontarkan oleh massa terhadapnya dan mengusut dari mana asalnya kertas bertulisan Arab itu. Ada yang menduga, lembaran tulisan Arab itu adalah bahan pelajaran agama Islam, dari sekolah Muhammadiyah, di mana banyak anak-anak Tionghoa bersekolah. Kertas-kertas pelajaran agama itu dengan satu dan lain jalan akhirnya terselip di

²⁴⁶ Ibid.

²⁴⁷ Ibid.

antara tumpukan kertas pembungkus sehingga sampai ke tangan penjahit Banjar tersebut. Jadi bukan kesengajaan si pemilik, untuk mengundang kemarahan massa.²⁴⁸

²⁴⁸ Ibid.

BAB V

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

Kehadiran masyarakat Tionghoa sejak abad ke-19 di wilayah Palu, memberikan warna tersendiri bagi perjalanan Palu sebagai sebuah wilayah yang disebut kota. Mereka hadir di Palu dengan dua cara, yakni dari Tiongkok langsung ke Palu atau menetap di daerah lain di nusantara, kemudian bermigrasi ke Palu. Kemampuan mereka beradaptasi dengan wilayah baru dan keputusan untuk menanggalkan identitas ketionghoannya dan menjadi Kaili, bukanlah sesuatu yang mudah. Sebuah harga yang mahal tentu saja, untuk sebuah legitimasi dalam urusan niaga dan kehidupan di tanah rantau.

Proses perubahan identitas masyarakat Tionghoa di Kota Palu, tidak terjadi begitu saja, namun lahir dari upaya yang dibangun, bahkan sejak awal mereka menginjakkan kaki di Palu. Menjalani relasi dengan bangsawan dan masyarakat setempat, juga masyarakat pendatang lainnya, adalah satu dari sekian langkah yang diambil, untuk memuluskan perubahan identitas ini. Mendirikan sekolah dan memutuskan untuk membuka sekolah ini untuk kalangan umum, juga menjadi salah satu cara bagi masyarakat Tionghoa untuk semakin menegaskan perubahan identitasnya. Penguasaan bahasa, budaya, dan segala hal tentang Palu, menjadikan mereka mampu bertahan hingga saat ini.

Keterbukaan masyarakat Kaili untuk menerima pendatang, juga menjadi faktor penting dari perubahan identitas ini. Masyarakat Kaili dengan budaya *Sintuvu* nya, menjadi sangat terbuka dengan kehadiran pendatang, sehingga memberikan kesan penerimaan yang hangat bagi pendatang, apapun ras, suku, dan agamanya.

Masyarakat Tionghoa di Kota Palu menjalin relasi dengan masyarakat muslim setempat dengan berbagai cara. Salah satunya dengan rutin mengirimkan bingkisan pada momen hari raya keagamaan, kepada masyarakat muslim di sekitarnya. Masyarakat setempat membalas bingkisan tersebut dengan mengirimkan aneka kuliner hari raya.

Hadir dengan identitas baru, tidak serta merta membuat narasi stigma dan stereotipe kepada masyarakat Tionghoa di Kota Palu hilang. Peristiwa 1965 menjadi titik balik dari segala upaya menjadi Kaili yang mereka lakukan. Kendatipun masih memegang teguh prinsip untuk menjadi Kaili, namun hadirnya stigma, dan stereotipe oleh masyarakat dan khalayak, akhirnya menggoreskan luka bagi psikis mereka. Luka yang saat ini kita kenal dengan eksklusivitas, yang lahir dari rasa trauma akan keberulangan tragedi serupa.

B. Saran-saran

Meskipun masih terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, namun penulis berharap, skripsi ini dapat menjadi referensi bagi khalayak, terkait bagaimana sejarah masyarakat Tionghoa di Kota Palu dan relasinya dengan masyarakat muslim setempat. Penulis juga berharap, skripsi ini dapat mengisi kekosongan kajian sejarah masyarakat pendatang, khususnya masyarakat Tionghoa di Kota Palu. Namun, hal yang paling penulis harapkan dari hadirnya skripsi ini, adalah terbangunnya relasi sosial yang harmonis, tanpa stigma, tanpa prasangka, tanpa memandang ras, suku, agama, antar masyarakat di Kota Palu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Arsip

- Afdeeling Bestuurszaken der Buitengewesten, Departement van Binnenlandsch Bestuur. *Overeenkomsten Met de Zelfbesturen in de Buitengewesten*. Nederlands: Landsdrukkerij, 1929.
- “Arsip Pemerintah Propinsi Sulawesi 1950-1960.” BPAD Sulawesi Selatan, 1956. No. Reg. 269. “Laporan Keamanan Tahun 1956.”
- Berg, B.J. van den. “Nota Inzake de Bestuursopvolging in Het Landschap Banawa,” 1936.
- “Dasar Pemandangan Jang Mengenai Kota Palu Dan Sekitarnya.” BPAD Sulawesi Selatan, n.d. Arsip NIT (1946-1950) No. Reg. 77.
- “Dokumen Sacramen Kawin Engelbert Lie Eng Tjhiang,” July 19, 1927.
- Dutrieux, F.B. “Gewijzigde En Aanvullende Memorie van Overgave over de Onderafdeeling Donggala,” September 1931.
- “Het Encyclopaedisch Bureau Aflevering II. Mededeelingen van Het Bureau Voor de Bestuurszaken Der Buitenbezittingen,” n.d.
- “Het Landschap Donggala of Banawa.” *Koninklijk Instituut Voor Taal-, Land- En Volkenkunde*, Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, 58 (1905).
- “Himpunan Keputusan DPRD-GR Provinsi Sulawesi Tengah I: 1964 -1971.” DPRD - GR Provinsi Sulawesi Tengah, September 30, 1971.
- Hirschmann, F.Ch.H. “Vervolg-Memorie (Op M. Junius) Inzake de Afdeeling Donggala,” 1934.
- Jefrianto. “Data Korban 65 Di Palu.” Koleksi Pribadi, 2015.
- Regerings Almanak Voor Nederlandsch - Indie*. Lands-Drukkerij, 1892.
- Regerings Almanak Voor Nederlandsch Indie Tweede Gedeelte Kalender En Personalialia*. Weltevreden: Lands-Drukkerij, 1865.
- Regerings Almanak Voor Nederlandsch Indie Tweede Gedeelte Kalender En Personalialia*. Weltevreden: Lands-Drukkerij, 1926.
- Regerings Almanak Voor Nederlandsch Indie Tweede Gedeelte Kalender En Personalialia*. Weltevreden: Lands-Drukkerij, 1928.
- Regerings Almanak Voor Nederlandsch Indie Tweede Gedeelte Kalender En Personalialia*. Weltevreden: Lands-Drukkerij, 1929.
- Regerings Almanak Voor Nederlandsch Indie Tweede Gedeelte Kalender En Personalialia*. Weltevreden: Lands-Drukkerij, 1930.

Regeerings Almanak Voor Nederlandsch Indie Tweede Gedeelte Kalender En Personalia. Weltevreden: Lands-Drukkerij, 1931.

Regeerings Almanak Voor Nederlandsch Indie Tweede Gedeelte Kalender En Personalia. Weltevreden: Lands-Drukkerij, 1942.

Landsdrukkerij. *Volkstelling 1930 Deel V, Inheemsche Bevolking Van Borneo, Celebes, De Kleine Soenda Eilanden En De Mollukken*. Batavia: Departement van Economische Zaken, 1930.

“Staatblad van Nederlandsch Indie No. 478.” Lands-Drukkerij, 1904.

Voorn, M.C. “Aanvullings Memorie van de Onderafdeeling Paloe,” Desember 1925.

Vorstman, J. A. “Aanvullende Memorie van Overgave van de Onderafdeling Paloe,” February 28, 1935.

B. Sumber Buku

Abubakar, Jamrin. *Donggala Kota Pusaka*. Yogyakarta: Ladang Publishing, 2021.

Bakker, Anton. *Filsafat Sejarah: Refleksi Sistemik*. Yogyakarta: Thafa Media, 2018.

Firdaus, Moh. Syafari, M. Isnaeni Muhidin, Iksam Djorimi, and Iwan Lapasere. “Ringkasan Eksekutif Penelitian Dan Verifikasi Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Peristiwa 1965/1966 Di Kota Palu.” SKP-HAM Sulteng, 2015.

Ham, Ong Hok. *Riwayat Tionghoa Peranakan Di Jawa*. Jakarta: Komunitas Bambu, 2009.

Koentjaraningrat. *Manusia Dan Kebudayaan Di Indonesia*. 19th ed. Jakarta: Djambatan, 2002.

Kruyt, Albert Christiaan. *De West-Toradjas Op Midden Celebes*. Amsterdam: Uitgave van de N.V Noord-Hollandsche Uitgevers-Maatschappij, 1938.

Kuntowijoyo. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003.

Lith, P.A. van der, A.J. Spaan, and F. Fokkens. *Ensiklopædie van Nederlandsch-Indië, Deel III*. Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1919.

Lombard, Denys. *Nusa Jawa: Silang Budaya; Kajian Sejarah Terpadu. Bag. 2: Jaringan Asia*. Jakarta: Gramedia, 1996.

Masyudha, Masyuddin. *Catatan Kritis Palu Meniti Zaman*. Palu: Yayasan Kesenian Sulawesi Tengah, 1997.

Nadjamuddin, Lukman, Idrus A. Rore, Iskandar Ahmad, Nuraedah, and Wilman Darsono Lumangino. *Satu Kota Empat Zaman: Donggala Pada Masa*

- Tradisional Hingga Terbentuknya Kabupaten*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2016.
- Nainggolan, Nurhayati, Daeng Patiro Laintagoa, Rumampuk, and R.E. Nainggolan. *Sejarah Pendidikan Daerah Sulawesi Tengah*. Edited by Sutrisno Kutoyo and S. Sumardi. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1987.
- Poerwanto, Hari. *Cina Khek Di Singkawang*. Jakarta: Komunitas Bambu, 2014.
- Purwanto, Bambang. *Praktik Kewarganegaraan Di Indonesia*. Yogyakarta: Ombak, 2019.
- Rore, Idrus A. *Ko Dan Ci Menggelar Barzanji Di Kota Donggala*. Yogyakarta: Elpueblo Tritama Mandiri, 2022.
- Septiwiharti, Dwi. *Budaya Sintuvu: Refleksi Filosofis Kearifan Lokal Masyarakat Kaili*. Yogyakarta: DIVA Press, 2021.
- Singarimbun, Masri, ed. *Sensus Penduduk 1961 Penduduk Desa Sulawesi Dan Maluku*. Yogyakarta: Pusat Penelitian dan Studi Kependudukan UGM & BPS, 1980.
- Sjamsuddin, Helius. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. 47th ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Suryadinata, Leo. "Negara dan Minoritas Tionghoa di Indonesia." *Wacana* 1, no. 2 (Oktober 1999).
- Suwondo, Bambang. *Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Sulawesi Tengah*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1982.
- Tajfel, Henri, and John C. Turner. "The Social Identity Theory of Intergroup Behavior." In *Political Psychology*. 1st ed. London: Psychology Press, 2004.
- Tick, Donald F. "Kumpulan Silsilah Raja-Raja Di Sulawesi Tengah." Pusat Dokumentasi Kerajaan-kerajaan di Indonesia, n.d.
- Tim Peneliti. "Ringkasan Eksekutif Penelitian Dan Verifikasi Korban Pelanggaran HAM Peristiwa 1965/1966 Di Kota Palu." SKP-HAM Sulteng, 2015.
- Tim Redaksi. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008

C. Sumber Jurnal

- Carneiro, Robert L. "Herbert Spencer as an Anthropologist." *The Journal of Libertarian Studies* 5, no. 2 (1981).
- Dahana, Abdullah. "Kegiatan Awal Masyarakat Tionghoa Di Indonesia." *Wacana: Jurnal Ilmu Pengetahuan Budaya* 2, no. 1 (2000).
- Isnaeni, Noor. "Perkembangan Pendidikan Anak-Anak Tionghoa Pada Abad 19 Hingga Akhir Orde Baru Di Indonesia." *Jurnal Khasanah Ilmu* 3, no. 2 (2012).
- Pelly, Usman. "Murid Pri Dan Nonpri Pada Sekolah Pembauran: Kebijakan Asimilasi Orde Baru Di Bidang Pendidikan Dan Dampaknya Terhadap Masyarakat Multikultural." *Antropologi Indonesia* 71 (2003).
- Prayudi, Gusti Muh., and Dewi Salindri. "Pendidikan Pada Masa Pemerintahan Kolonial Belanda Di Surabaya Tahun 1901-1942." *Publika Budaya* 1, no. 3 (March 2015).
- Sairin, Mohammad. "Dunia Maritim Teluk Palu Masa Prakolonial." *Jurnal Midden Celebes* 1, no. 1 (2012).
- Tjandradipura, Carina, and Ferlina Sugata. "Representasi Dan Orientasi Simbol Penghormatan Dalam Dinamika Ruang Ibadah Agama Buddha (Studi Kasus: Ruang Ibadah Cetiya Di Bandung)." *Jurnal IDEALOG: Jurnal Desain Interior & Desain Produk* 1, no. 1 (April 2016).

D. Sumber Skripsi / Tesis / Disertasi

- Andrayani, Utari. "Gerakan Aisyiyah Di Kota Palu, 1965-2015." Skripsi, UIN Datokarama Palu, 2022.
- Fatma. "Bulonggo, Perubahan Pola Pewarisan Dalam Keluarga Saudagar dan Bangsawan Kaili di Palu 1920-1992." Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2016.
- Jumat, Gani. "Nasionalisme Ulama: Pemikiran Politik Kebangsaan Sayyid Idrus Bin Salim Aljufri 1891-1969." Disertasi, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2012.
- Lumangino, Wilman Darsono. "Mengais Rezeki Di Ayunan Ombak." Skripsi, Universitas Tadulako, 2006.
- Pusadan, Popy Nursiah. "Keberadaan Masyarakat Arab Di Kota Palu." Skripsi, Universitas Tadulako, 2009.
- Sairin, Mohammad. "Bangsawan Sigi Dalam Arus Perubahan: Keluarga Lamakarate Dalam Politik Di Sulawesi Tengah, 1907-1982." Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2016.

Subagja, I Wayan. “Dewata Di Tanah Kaili: Transformasi Sosio-Kultural Orang Bali Di Palu (1983-2008).” Skripsi, Universitas Tadulako, 2009.

E. Sumber Presentasi

Rochwulaningsih, Yety. “Development of Non-Indigenous Schools.” Paper presented at the International Seminar of Developing the International School, Japan Nagoya University, November 8, 2006.

F. Sumber Surat Kabar / Majalah / Buletin

Bataviaasch Nieuwsblad. “Bestuursorganisatie In Midden Celebes II.” September 24, 1906. <https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011034220>.

De Locomotief. “Het Toli-Toli-Rapport.” January 11, 1921.

Ecip, Sinansari. “Gara-Gara Tulisan Arab.” *Tempo*, July 28, 1973.

Jefrianto. “Gedung Bekas Sekolah Cina: Bukti Eksistensi Masyarakat Keturunan Tionghoa Di Kota Palu.” *Mercusuar*, February 8, 2015.

Jefrianto. “Jejak Sejarah Tambak Garam Di Teluk Palu.” *Buletin Syajaratun HMJ SPI IAIN Palu* 8 (June 2021).

G. Sumber Internet

Akurasi 2019. “Jejak Migrasi Etnis Tionghoa di Kalimantan -,” May 8, 2019. <https://www.akurasi.id/ragam/catatan/jejak-migrasi-etnis-tionghoa-di-kalimantan/>.

BBC News Indonesia. “Tionghoa Indonesia dalam pusaran peristiwa 65: Pengalaman, kenangan dan optimisme generasi muda,” October 1, 2021. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58732398>.

Firdausi, Fadrik Aziz. “Wijkenstelsel & Passenstelsel: Mula Stigma Eksklusif Orang Tionghoa.” *tirto.id*. Accessed January 28, 2023. <https://tirto.id/wijkenstelsel-passenstelsel-mula-stigma-eksklusif-orang-tionghoa-euU6>.

GCatholic. “Archdiocese of Fuzhou 福州, China.” Accessed January 25, 2023. <http://www.gcatholic.org/dioceses/diocese/fooc0.htm>.

HS. “Mengenal Lebih Dekat Kelenteng Di Parepare | Dinas Perpustakaan Kota Parepare,” July 4, 2022. <https://perpustakaan.pareparekota.go.id/index.php/mengenal-lebih-dekat-kelenteng-di-parepare/>.

“Hasil Pencarian - KBBI Daring.” Accessed July 27, 2023. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Masyarakat>.

- “Hasil Pencarian - KBBI Daring.” Accessed July 27, 2023. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Tionghoa>.
- “Hasil Pencarian - KBBI Daring.” Accessed July 27, 2023. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Eksistensi>.
- “Hasil Pencarian - KBBI Daring.” Accessed July 27, 2023. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/identitas>.
- Jefrianto. “Riwayat Kapal KPM Di Teluk Palu,” 2021. <https://jefriantogie.blogspot.com/2021/01/riwayat-kapal-kpm-di-teluk-palu.html>.
- Kennedy, Eddward S. “Hilangnya Identitas Orang Tionghoa Akibat Asimilasi Paksa.” *tirto.id*, November 24, 2019. <https://tirto.id/hilangnya-identitas-orang-tionghoa-akibat-asimilasi-paksa-el92>.
- Media, Kompas Cyber. “SBY dan Digantinya Istilah ‘China’ Jadi ‘Tionghoa’...” *KOMPAS.com*, January 31, 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/01/05500071/sby-dan-digantinya-istilah-china-jadi-tionghoa-->.
- Purwanto, Bambang. “Pertahankan Ruang Inklusif Bangsa.” *kompas.id*, June 15, 2021. <https://www.kompas.id/baca/opini/2021/06/16/pertahankan-ruang-inklusif-bangsa>.
- Rustopo. “Kontribusi Orang-Orang Tionghoa Di Surakarta Dalam Kebudayaan Jawa 1895 -1998.” *Dewa Ruci* 8, no. 2 (July 2013).
- Says, Alkev Edrio. “Sekilas Mengenai Marga Li 李 (Lee, Lei).” *TIONGHOA.INFO*, July 31, 2019. <https://www.tionghoa.info/sekilas-mengenai-marga-li-李/>.
- Susmayanti, Riana. “Peralihan Golongan Penduduk.” Malang, 2014. <http://rianasusmayanti.lecture.ub.ac.id/files/2014/07/PHI-13-PERALIHAN-GOLONGAN-PENDUDUK.pdf>.
- Susmayanti, Riana. “Sejarah Pembagian Kelompok Penduduk Di Indonesia.” Malang, 2014. <http://rianasusmayanti.lecture.ub.ac.id/files/2014/07/PHI-11-SEJARAH-PEMBAGIAN-GOLONGAN-PENDUDUK.pdf>.
- Tionghoa. “Marga Oe » Budaya, Sejarah, Tradisi & Adat Istiadat Tionghoa.” Accessed January 27, 2023. <https://www.tionghoa.com/tag/marga-oe/>.
- Umara, Siti Zainatul. “Sejarah Sekolah Tionghoa, Korban Kebijakan Rezim Yang Diskriminatif.” Accessed December 20, 2022. <https://tirto.id/sejarah-sekolah-tionghoa-korban-kebijakan-rezim-yang-diskriminatif-ghCo>.
- Urip, Rizki Syafaat. “Sejarah Kelenteng Kwan Im Miao Di Kota Palu. Mulai Dimanfaatkan Khalayak Umum Sejak 1942 - TUTURA.ID | Bertutur Jernih, Menawarkan Perspektif.” Accessed January 30, 2023.

<https://tutura.id/homepage/readmore/sejarah-klenteng-kwan-im-miau-di-kota-palu-1673937511>.

H. Sumber Wawancara

Asnani. Masa Kecil Dengan Anak Tionghoa. Interview by Jefrianto, June 3, 2023.

Chowindra, Ricky. Orang Cina di Kota Palu. Interview by Jefrianto, January 30, 2023.

Halim, Tedi. Identitas Masyarakat Tionghoa Lewat Pendidikan. Interview by Jefrianto, June 16, 2021.

Hou, Liem Boen. Sekolah Cina di Palu. Interview by Jefrianto, Desember 2022.

Lawputra, Ito. Trauma Generasi Ketiga. Interview by Jefrianto, Desember 2022.

Lisdawati. Orang Tionghoa Muslim di Palu. Interview by Jefrianto, Mei 2023.

Maryam. Silaturahmi Tionghoa Muslim di Palu. Interview by Jefrianto, Mei 2023.

Namin. Perkawinan Campur Orang Tionghoa. Interview by Jefrianto, March 27, 2021.

Putong, Moh. Ceng. Upaya Membangun Identitas Baru. Interview by Jefrianto, June 17, 2021.

Putung, Paulus. Sejarah Keluarga Putung. Interview by Jefrianto, February 7, 2022.

Tanod, Jhon. Daerah Asal Imigran Tionghoa. Interview by Jefrianto, June 16, 2021.

LAMPIRAN


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
 جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو
 STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
 FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
 Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165
 Website : www.uindatokarama.ac.id, email : humas@uindatokarama.ac.id

PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

Nama : JEFRIANTO NIM : 194190008
 TTL : LOMBONGA, 11-12-1990 Jenis Kel. : LAKI-LAKI
 Jurusan : SPI Semester : VII
 Alamat : JL. BAIYA RAYANO.165 No.Hp. : 085255969357

Judul Skripsi :

o Judul I

KOTA KOLONIAL PALU: SEJARAH KAWASAN KOLONIAL PALU

o Judul II

~~ORANG CINA DI PALU~~ ^{Masyarakat} SEJARAH ~~SI~~ TIONGHOA DI KOTA PALU

o Judul III

KABAR BENCANA DARI SURAT KABAR: SEJARAH BENCANA
1938 DARI PERSPEKTIF SURAT KABAR KOLONIAL
 Palu, 22 Agustus 2022
 Mahasiswa

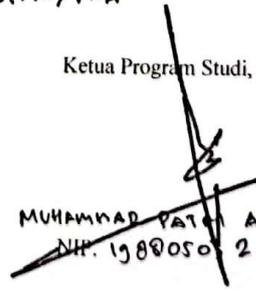
 NIM. 194190008

Telah disetujui penyusunan skripsi dengan catatan :

PEMBIMBING I : Prof. Dr. Lukman S Thahir, M. Ag
 PEMBIMBING II : Mohamad Saifin, M.A

a.n. Dekan
 Wakil Bidang Akademik &
 Pengembangan Kelembagaan


 MOKH. ULIL HIDAYAT, S.Ag., M.Fil.I.
 NIP. 19740610 199903 1 002

Ketua Program Studi,

 MUHAMMAD PATRI ARFIN S.Th.I., M.Th.I
 NIP. 19880501 2015 03 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165
Website : www.uindatokarama.ac.id, email : humas@uindatokarama.ac.id

Nomor : 142 /Un.24/F.III/PP.00.9/1/2023
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

Palu, 27 Januari 2023

Kepada Yth.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

di-
Palu

Assalamu'alaikum War. Wab

Salam silaturahmi kami sampaikan, semoga Bapak/Ibu beserta seluruh Stafnya senantiasa berada dalam lindungan Tuhan dan sukses menjalankan berbagai aktivitasnya.

Selanjutnya dengan hormat disampaikan bahwa Mahasiswa (i) Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah UIN Datokarama Palu yang tersebut namanya dibawah ini :

Nama : Jefrianto
N I M : 19.4.19.0008
Semester : VII
Jurusan : Sejarah Peradaban Islam (SPI)
Alamat : Jln. Baia Raya No.165
No. Hp : 0852 5596 9357

Bermaksud melakukan pengambilan data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : "SEJARAH MASYARAKAT TIONGHOA DI KOTA PALU".

Dosen Pembimbing :
1. Prof. Dr. H. LUKMAN S. THAHIR, M.Ag
2. MOHAMMAD SAIRIN, S.Pd., MA.

Untuk maksud tersebut, kami bermohon kiranya Bapak/Ibu dapat mengizinkan untuk mengadakan penelitian di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Demikian, atas kerjasama dan koordinasi yang baik di ucapkan terima kasih.



Wassalam.
Dekan

Dr. H. Sudik, M.Ag.
NIP. 19640616 199703 1 002

Tembusan :

Rektor UIN Datokarama Palu

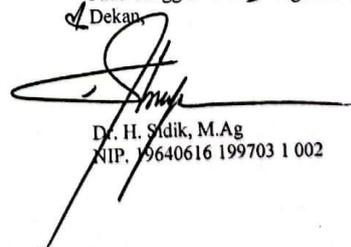
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB & DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU
NOMOR : 596 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBIMBING SKRIPSI FAKULTAS USHULUDDIN ADAB & DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU
TAHUN AKADEMIK 2021/2022
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan Skripsi Fakultas Ushuluddin Adab & Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, dipandang perlu menerbitkan keputusan pengangkatan pembimbing Skripsi Fakultas Ushuluddin Adab & Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu Tahun Akademik 2021/2022, sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini.
b. bahwa yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing Skripsi Fakultas Ushuluddin Adab & Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu Tahun Akademik 2021/2022.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Palu;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
7. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu Nomor : 456 Un.24/KP.07.6/12/2021 tanggal 27 Desember 2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas USHULUDDIN ADAB & DAKWAH Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : PEMBIMBING SKRIPSI FAKULTAS USHULUDDIN ADAB & DAKWAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2021/2022.
- KESATU** : Menunjuk Saudara :
1. Prof. Dr.LUKMAN S. THAHIR, M.Ag.
 2. MOHAMMAD SAIRIN, S.Pd., MA
- Masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II bagi mahasiswa :
- Nama : JEFRIANTO
NIM : 19.4.19.0008
Prodi : SEJARAH PERADABAN ISLAM (SPI)
Semester : VI
Tempat/Tgl lahir : LOMBONGA, 11 DESEMBER 1990
Judul Skripsi : SEJARAH MASYARAKAT TIONGHOA DI KOTA PALU
- KEDUA** : Pembimbing Skripsi bertugas :
1. Memberikan petunjuk yang berkaitan dengan isi draft Skripsi dan naskah Skripsi
 2. Memberikan petunjuk perbaikan mengenai materi, metodologi, bahasa dan kemampuan menguasai isi Skripsi.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada dana DIPA Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan bimbingan Skripsi telah dilaksanakan.
- KELIMA** : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 23 Agustus 2022

✓ Dekan



Dr. H. Sidik, M.Ag
NIP. 19640616 199703 1 002

Tembusan:
1. Rektor UIN Datokarama Palu;

RIWAYAT HIDUP



Jefrianto, lahir di Lombonga, sebuah desa di leher Tanjung Manimbaya, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala, 11 Desember 1990. Anak bungsu dari pasangan alm. Mohammad Ceng dan Nakoria ini menamatkan pendidikan SD di SD Katolik I Santo Fransiskus Xaverius Palu tamat tahun 2002, kemudian SMP Negeri 3 Palu tamat tahun 2005, dan SMA Negeri 4

Palu, tamat tahun 2008.

Dirinya sempat menempuh pendidikan selama 7 tahun di Universitas Tadulako, pada Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) sejak tahun 2008, namun akhirnya tidak selesai dan harus *drop out* (DO). Jefri, sapaan akrabnya, kembali melanjutkan pendidikannya di Jurusan Sejarah Peradaban Islam (SPI) UIN Datokarama Palu, sejak tahun 2019.

Jefri pernah menjabat sebagai Divisi Organisasi dan Kampanye Solidaritas Korban Pelanggaran HAM (SKP-HAM) Sulteng, periode 2011-2014. Kemudian menjadi pegiat sejarah di Komunitas Historia Sulawesi Tengah, sejak 2015 hingga saat ini, serta anggota Komunitas Batu Karang, sejak 2008.

Jefri pernah mewakili Sulawesi Tengah dalam beberapa kegiatan nasional, seperti Pekan Nasional Cinta Sejarah (Pentas) di Palu tahun 2011, Indonesian Youth Conference (IYC) di Jakarta tahun 2011, Forum Indonesia Muda (FIM) ke 13 di Cibubur tahun 2012, Youth Initiative and Civic and Engagement oleh Unesco dan Pamflet di Jakarta tahun 2013, Indonesian Movement Conference (IMC) tahun 2013, serta Re(i)novasi Memori yang dilaksanakan oleh Koalisi

Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran (KKPK) bersama Pamflet atas dukungan Yayasan Tifa.

Selama kuliah, Jefri beberapa kali mendapatkan penghargaan atas prestasinya, di antaranya Juara II Lomba Karya Tulis Sejarah (LKTS) Pentas 2011, Juara II Lomba Penulisan Surat Untuk Rektor UNTAD oleh BEM Fakultas HUKUM UNTAD tahun 2012, Juara Harapan III Lomba Penyuluh Gerakan Sulawesi Tengah Membaca Tingkat Perguruan Tinggi Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013, Juara III Lomba Artikel “Setahun Media Tadulako”, 2013 di Palu, Juara III Lomba Penulisan Artikel “Gebyar Keadilan” Fakultas Hukum UNTAD Tahun 2014, serta Juara II Lomba Penulisan Esai dalam rangka Dies Natalis LPM Qalamun IAIN Palu dan Dies Natalis LPM Silolangi FKIP Untad tahun 2014.

Pada bidang jurnalistik, sebelum terjun sebagai jurnalis. Sejak tahun 2010, telah aktif menulis opini dan artikel, baik di media lokal maupun nasional. Ia memilih terjun ke dunia jurnalistik pada tahun 2015. Jurnalis dengan predikat sertifikasi Wartawan Utama ini, aktif menulis dengan perspektif sejarah, budaya, hingga kebencanaan, di Harian Umum Mercusuar dan Kabar Sulteng Bangkit. Prestasi terbaiknya adalah meraih *Fellowship Jurnalisme Investigasi* Tempo Institute terkait akuntabilitas penanganan bencana, dengan judul tulisan, *Mimpi Punya Benteng Tsunami*.

Sebelum buku individu perdananya ini terbit, Jefri pernah terlibat dalam berbagai project penulisan buku lainnya, baik sebagai tim penulis, maupun sebagai tim peneliti. Dirinya di antaranya, tercatat sebagai tim peneliti buku *Dari Stagnasi Menjemput Harapan Baru*, yang disusun oleh Setara Institute pada tahun 2014. Kemudian, dirinya juga menjadi tim peneliti buku *HAM di Mata Anak*

Muda yang disusun Pamflet tahun 2015, tim peneliti Politik Pemilih Pemula: Partisipasi Politik Anak Muda di Pekanbaru, Jakarta, Cirebon, Palu dan Jayapura tahun 2014, tim penulis buku Tojo Una-una: pesona Masa Lalu dan Biografi Anggota DPRD Periode 2009-2014, serta kontributor Penelitian dan Verifikasi Korban Pelanggaran HAM Peristiwa 1965/1966 di Kota Palu, yang disusun oleh SKP-HAM Sulteng. Jefri juga tercatat pernah menyumbangkan tulisan untuk dimuat di buku-buku kumpulan tulisan, seperti Pulu di Kota Palu, Kumpulan Reportase Tsunami dan Likuefaksi di Sulawesi Tengah, yang diterbitkan oleh PWI, kemudian Tesa Ntodea: Kisah Keberagaman Pascabencana Pasigala yang diterbitkan oleh Komunitas Bela Indonesia (KBI), serta buku Aku Untuk Indonesiaku, yang diterbitkan oleh BEM FMIPA UNJ Tahun 2012.

Untuk memanfaatkan waktu luangnya, Jefri menyukai traveling ke lokasi-lokasi bersejarah dan menulis hasil traveling tersebut di blog pribadinya. Dirinya juga memiliki hobi menelusuri arsip-arsip kuno dan berbahasa asing sebagai bahan untuk tulisan. Selain itu, sebagian besar waktunya juga dihabiskan untuk berkumpul bersama istri, Nurdian Sri Fitriana dan anak semata wayangnya, Raisa Az-Zhira